



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Nomor : 30.A/LHP/XIX.PAL/05/2024
Tanggal : 22 Mei 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	x
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	xii
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	xii
2. Standar Pemeriksaan.....	xii
3. Tujuan Pemeriksaan	xii
4. Entitas yang Diperiksa	xii
5. Lingkup Pemeriksaan	xii
6. Metodologi Pemeriksaan	xii
7. Waktu Pemeriksaan	xiii
8. Batasan Pemeriksaan	xiii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
NERACA	5
LAPORAN OPERASIONAL	7
LAPORAN ARUS KAS.....	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	16
2.1. Ekonomi Makro	16
2.2. Kebijakan Keuangan.....	21
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	27

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	29
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	29
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	32
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	33
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	33
4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.3. Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	35
4.4. Dokumen Sumber sebagai dasar pencatatan transaksi	50
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	56
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	56
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	124
5.3. Neraca	126
5.4. Laporan Operasional	167
5.5. Laporan Arus Kas	206
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	212
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	215
6.1. Gambaran Umum Kabupaten Barito Timur	215
6.2. Gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Barito Timur	217
BAB VII PENUTUP	220
7.1. Kesimpulan	220
7.2. Ikhtisar Laporan Keuangan	220

DAFTAR TABEL

Tabel 1.PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2019-2023	18
Tabel 2.PDRB Atas Harga Konstan.....	18
Tabel 3. TPAK dan TPT 2021-2023	19
Tabel 4.Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2023 .	20
Tabel 5.Rincian APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2023	25
Tabel 6.Ihktisar Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	29
Tabel 7.Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	30
Tabel 8.Penyisihan Piutang.....	39
Tabel 9.Masa Manfaat Aset Tetap	41
Tabel 10.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi.....	50
Tabel 11.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Pendapatan	51
Tabel 12.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Belanja	51
Tabel 13.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Penerimaan Pembiayaan	52
Tabel 14.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Pengeluaran Pembiayaan	52
Tabel 15.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Perubahan Ekuitas.....	53
Tabel 16.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Mutasi Resiprokal	54
Tabel 17.Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Non Kas	54
Tabel 18.Laporan Realisasi Anggaran	56
Tabel 19.Pendapatan Asli Daerah.....	56
Tabel 20.Pendapatan Pajak Daerah.....	57
Tabel 21.Pendapatan Retribusi Daerah.....	58
Tabel 22.Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD.....	60
Tabel 23. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	61
Tabel 24. Lain-Lain PAD yang Sah.....	62
Tabel 25. Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD	63
Tabel 26. Pendapatan Transfer.....	64
Tabel 27. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	64
Tabel 28. Dana Bagi Hasil	65
Tabel 29. Dana Alokasi Umum.....	65
Tabel 30. Dana Alokasi Khusus - Fisik	66

Tabel 31. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik.....	67
Tabel 32. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	68
Tabel 33. Realisasi Dana Desa.....	68
Tabel 34. Tambahan Realisasi Dana Desa.....	72
Tabel 35. Pendapatan Transfer Antar Daerah.....	73
Tabel 36. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	74
Tabel 37. Belanja Daerah.....	74
Tabel 38. Belanja Operasi.....	74
Tabel 39. Belanja Pegawai.....	75
Tabel 40. Belanja Pegawai per SKPD	78
Tabel 41. Belanja Barang dan Jasa	81
Tabel 42. Belanja Barang dan Jasa per SKPD	94
Tabel 43. Belanja Subsidi	96
Tabel 44. Belanja Hibah	97
Tabel 45. Belanja Hibah per SKPD	99
Tabel 46. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik	100
Tabel 47. Belanja Hibah Pemilihan Umum	100
Tabel 48. Belanja Bantuan Sosial	100
Tabel 49. Belanja Bantuan Sosial per SKPD.....	101
Tabel 50. Belanja Modal.....	102
Tabel 51. Belanja Modal Tanah.....	102
Tabel 52. Belanja Modal tanah per SKPD.....	102
Tabel 53. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103
Tabel 54. Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD	105
Tabel 55. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107
Tabel 56. Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD	108
Tabel 57. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109
Tabel 58. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD.....	110
Tabel 59. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111
Tabel 60. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD	111
Tabel 61. Belanja Modal Aset Lainnya	112
Tabel 62. Belanja Tidak Terduga.....	112
Tabel 63. Belanja Tidak Terduga per SKPD	112

Tabel 64. Belanja Transfer.....	113
Tabel 65. Belanja Bagi Hasil	113
Tabel 66. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerinta Desa.....	114
Tabel 67. Belanja Bantuan Keuangan.....	118
Tabel 68. Realisasi Alokasi Dana Desa	118
Tabel 69. Pembiayaan Daerah	122
Tabel 70. Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	123
Tabel 71. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	124
Tabel 72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.....	124
Tabel 73. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	124
Tabel 74. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih.....	125
Tabel 75. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA).....	125
Tabel 76. Saldo Anggaran Lebih Akhir	125
Tabel 77. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	125
Tabel 78. Neraca	127
Tabel 79. Aset	127
Tabel 80. Aset Lancar	127
Tabel 81. Kas di Kas Daerah	128
Tabel 82. Kas di Bendahara Pengeluaran	129
Tabel 83. Kas di Bendahara Penerimaan	130
Tabel 84. Kas di BLUD	130
Tabel 85. Kas Dana Bos.....	131
Tabel 86. Kas Dana Kapitasi FKTP.....	131
Tabel 87. Saldo Akhir BOK Puskesmas	132
Tabel 88. Kas Lainnya	133
Tabel 89. Piutang Pajak	133
Tabel 90. Piutang PBB-P2	133
Tabel 91. Piutang Retribusi.....	134
Tabel 92. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	134
Tabel 93. Piutang Transfer Antar Daerah	135
Tabel 94. Piutang Lainnya	135
Tabel 95. Penyisihan Piutang.....	136
Tabel 96. Penyisihan Piutang PBB-P2.....	136

Tabel 97. Penyisihan Piutang Retribusi	136
Tabel 98. Penyisihan Piutang BLUD	137
Tabel 99. Beban Dibayar Dimuka.....	137
Tabel 100. Persediaan	139
Tabel 101. Persediaan per SKPD.....	139
Tabel 102. Investasi Jangka Pendek	140
Tabel 103. Aset Tetap	141
Tabel 104. Aset Tetap Tanah	142
Tabel 105. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	144
Tabel 106. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD	145
Tabel 107. Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	146
Tabel 108. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD	147
Tabel 109. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	149
Tabel 110. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD	149
Tabel 111. Aset Tetap Lainnya.....	150
Tabel 112. Aset Tetap Lainnya per SKPD.....	151
Tabel 113. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	152
Tabel 114. Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD	152
Tabel 115. Akumulasi Penyusutan.....	152
Tabel 116. Akumulasi Penyusutan per SKPD	153
Tabel 117. Aset Lainnya	155
Tabel 118. Tagihan Penjualan Angsuran	156
Tabel 119. Aset yang tidak diketahui Keberadaannya per SKPD	157
Tabel 120. Aset yang tidak diketahui Keberadaannya per SKPD	157
Tabel 121. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	158
Tabel 122. Kewajiban	159
Tabel 123. Kewajiban Jangka Pendek	160
Tabel 124. Utang Belanja Pegawai per SKPD.....	160
Tabel 125. Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD	161
Tabel 126. Kewajiban Jangka Panjang	163
Tabel 127. Pengurangan Utang Jangka Panjang	164
Tabel 128. Rincian Kewajiban Jangka Panjang.....	164
Tabel 129. Ekuitas	167

Tabel 130. Pendapatan-LO	167
Tabel 131. Pendapatan Asli Daerah-LO	168
Tabel 132. Pendapatan Pajak Daerah-LO	168
Tabel 133. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	169
Tabel 134. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD	171
Tabel 135. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	172
Tabel 136. Lain-Lain PAD yang Sah-LO	173
Tabel 137. Lain-Lain PAD yang Sah-LO per SKPD	174
Tabel 138. Pendapatan Transfer-LO	174
Tabel 139. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	175
Tabel 140. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat--Lainnya-LO	175
Tabel 141. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	176
Tabel 142. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	176
Tabel 143. Pendapatan Hibah-LO	176
Tabel 144. Pendapatan Hibah-LO per Sub Rincian Obyek	177
Tabel 145. Beban Daerah	177
Tabel 146. Beban Operasi	178
Tabel 147. Beban Pegawai	178
Tabel 146. Beban Pegawai per SKPD	181
Tabel 149. Beban Barang dan Jasa	183
Tabel 150. Beban Barang dan Jasa per SKPD	195
Tabel 151. Beban Subsidi	197
Tabel 152. Beban Hibah	197
Tabel 153. Beban Hibah per SKPD	199
Tabel 154. Beban Bantuan Sosial	200
Tabel 155. Beban Bantuan Sosial per SKPD	200
Tabel 156. Beban Penyisihan Piutang	201
Tabel 157. Beban Penyisihan Piutang per SKPD	201
Tabel 158. Beban Lain-Lain	201
Tabel 159. Beban Penyusutan dan Amortisasi	202
Tabel 160. Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD	202
Tabel 161. Beban Transfer	204
Tabel 162. Beban Tidak Terduga	205

Tabel 163. Surplus Non Operasional	205
Tabel 164. Defisit Non Operasional	205
Tabel 165. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	205
Tabel 166. Surplus/(Defisit)-LO	206
Tabel 167. Laporan Arus Kas	206
Tabel 168. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	207
Tabel 169. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	207
Tabel 170. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	208
Tabel 171. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	209
Tabel 172. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.....	209
Tabel 173. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.....	210
Tabel 174. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	210
Tabel 175. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	211
Tabel 176. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris.....	211
Tabel 177. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	211
Tabel 178. Kenaikan/(Penurunan) Kas	212
Tabel 179. Koreksi Ekuitas.....	213
Tabel 180. Topografis Wilayah Barito Timur.....	217
Tabel 181. Demografis Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2023	217
Tabel 182. Jumlah Pegawai PNS Barito Timur	218
Tabel 183. Jumlah Pegawai PNS Barito Timur Menurut Tingkat Pendidikan	218
Tabel 184. Jumlah Pegawai PPPK Barito Timur	219



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup

evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30.B/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 22 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyraf, S.E., Ak., CA., CSFA., CFrA.
Negera Akuntan No. 4510

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017, Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan LKPD Tahun 2023 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

6. Metodologi Pemeriksaan

Tim Pemeriksa LKPD mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara efektif sehingga pemeriksaan fokus pada akun-akun/transaksi-transaksi berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka audit berbasis risiko, pemeriksa harus memperhatikan diantaranya hal-hal sebagai berikut.

- a. Hasil - hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2023;
- b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan signifikan dan hasil pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKPD Tahun 2023;
- c. Hasil pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2023;
- d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan Tahun 2023, diantaranya yaitu:
 - 1) Peraturan daerah (Perda) APBD Tahun 2022 dan 2023, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Kebijakan pemerintah daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 3) Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan keuangan di BLUD, Manajemen Kas pada Bendahara Umum Daerah, dan realisasi belanja wajib (mandatory spending);
 - 4) Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah atau pinjaman daerah;
 - 5) Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); dan
 - 6) Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- e. Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan Tahun 2023; dan
- f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

7. Waktu Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Interim dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 29 Januari s.d. 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 30/ST/XIX.PAL/1/2024 tanggal 25 Januari 2024; dan
- b. Pemeriksaan Terinci dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 1 s.d 3 April 2024 dan 16 April s.d. 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 102/ST/XIX.PAL/03/2024 tanggal 28 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang

berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan ataupun penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, maka akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BUPATI BARITO TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari (a) *Laporan Realisasi Anggaran*; (b) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)*; (c) *Neraca*; (d) *Laporan Operasional*; (e) *Laporan Arus Kas*, (f) *Laporan Perubahan Ekuitas*; dan (g) *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tamiang Layang, 22 Mei 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Indr. Gunawan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	CaLK	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
PENDAPATAN	5.1.1	972.196.218.202,00	983.488.989.615,03	101,16	966.036.183.873,74
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	77.356.166.754,00	60.175.907.942,03	77,79	83.647.710.760,45
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	25.543.000.000,00	18.347.176.559,04	71,83	11.593.759.007,25
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.908.604.800,00	2.766.598.933,00	70,78	2.545.019.804,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.4	-	27.049.142,65	0,00	14.158.036.468,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.5	47.904.561.954,00	39.035.083.307,34	81,49	55.350.895.481,20
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	892.630.147.990,00	923.288.081.673,00	103,43	880.187.448.086,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	766.597.902.000,00	784.533.230.628,00	102,34	752.445.141.065,00
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	169.021.129.000,00	191.068.698.189,00	113,04	194.252.890.381,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	453.323.100.000,00	457.131.088.950,00	100,84	436.257.086.999,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	56.198.036.000,00	52.417.638.397,00	93,27	52.354.260.414,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	88.055.637.000,00	83.915.805.092,00	95,30	69.580.903.271,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	75.534.561.000,00	77.935.147.800,00	103,18	78.780.783.000,00
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	-	-	0,00	4.984.971.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	75.534.561.000,00	77.935.147.800,00	103,18	73.795.812.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	50.497.684.990,00	60.819.703.245,00	120,44	48.961.524.021,29
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	-	-	0,00	-
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	50.497.684.990,00	60.819.703.245,00	120,44	48.961.524.021,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	2.209.903.458,00	25.000.000,00	1,13	2.201.025.027,00
Pendapatan Hibah - LRA		2.209.903.458,00	25.000.000,00	1,13	2.201.025.027,00
Pendapatan Lainnya		-	-	0,00	-
BELANJA DAERAH	5.1.2	1.202.208.265.241,00	1.059.721.629.160,41	88,15	893.668.713.769,09
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	793.117.097.656,00	695.482.303.674,04	87,69	633.502.030.342,09
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	405.736.333.308,00	351.104.087.669,76	86,54	347.439.505.593,09
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	324.145.224.309,00	290.601.816.469,18	89,65	228.529.659.212,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	57.917.790.039,00	50.754.619.535,10	87,63	47.657.860.937,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.717.750.000,00	2.421.780.000,00	51,33	9.275.004.600,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	229.313.802.685,00	201.360.547.759,37	87,81	103.449.098.767,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	3.995.000.468,00	-	0,00	1.098.858.088,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	23.035.833.434,00	21.045.840.294,00	91,36	16.700.733.622,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2	44.575.128.268,00	41.140.779.038,98	92,30	29.782.859.321,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.3	156.653.430.865,00	138.082.480.220,39	88,15	55.462.710.136,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.4	1.054.409.650,00	1.091.448.206,00	103,51	207.889.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.5	-	-	0,00	196.048.200,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	10.000.000.000,00	2.533.187.200,00	25,33	9.540.962.083,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	10.000.000.000,00	2.533.187.200,00	25,33	9.540.962.083,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	169.777.364.900,00	160.345.590.527,00	94,44	147.176.622.577,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	4.133.500.000,00	4.104.711.131,00	99,30	2.843.905.141,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	165.643.864.900,00	156.240.879.396,00	94,32	144.332.717.436,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(230.012.047.039,00)	(76.232.639.545,38)	33,14	72.367.470.104,65

A

Uraian	CaLK	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Penggunaan SILPA		241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Penerimaan Kembali Investasi		-	-	0,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	0,00	-
PEMBIAYAAN NETTO		230.012.047.039,00	230.512.047.039,17	100,22	168.919.576.934,52
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.2	-	154.279.407.493,79	0,00	241.287.047.039,17

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


 Bupati Barito Timur
 Indra Gunawan

7



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited)
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CaLK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	241.287.047.039,17	179.994.576.934,52
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	241.287.047.039,17	179.994.576.934,52
Sub Total		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	154.279.407.493,79	241.287.047.039,17
Sub Total		154.279.407.493,79	241.287.047.039,17
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain	5.2.4	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	154.279.407.493,79	241.287.047.039,17

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

P. Bupati Barito Timur

Inara Gunawan 





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	CaLK	2023	2022
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas dan Setara Kas		154.287.671.538,63	241.378.821.035,19
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	130.879.164.943,04	210.654.411.612,83
Kas di Bendahara Pengeluaran		7.820,00	52.910.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan		13.879.140,82	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.2	22.345.698.167,97	30.573.109.149,40
Kas Dana BOS	5.3.1.1.3	44.551.858,00	14.750.701,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.4	1.004.369.608,80	114.513,96
Kas Lainnya	5.3.1.1.5	-	83.524.558,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.6	9.157.482.968,00	7.768.903.499,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.7	1.762.637.957,00	1.523.481.445,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9	1.479.031.137,00	1.287.827.156,94
Piutang Transfer Antar Daerah		7.326.455.552,00	11.946.081.966,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.10	50.266.728,00	580.876.471,97
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.11	(7.202.260.040,91)	(4.732.575.637,24)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.12	131.832.665,99	149.420.913,29
Persediaan	5.3.1.1.13	19.072.380.101,17	17.909.254.922,54
Jumlah Aset Lancar		186.065.498.606,88	277.812.091.772,69
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Non Permanen		-	-
Investasi kepada BUMN		-	-
Investasi kepada BUMD		-	-
Investasi dalam Obligasi		-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		-	-
Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
Investasi Permanen		86.950.000.000,00	76.175.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	86.950.000.000,00	76.175.000.000,00
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Investasi Permanen		-	-
Jumlah investasi Permanen		86.950.000.000,00	76.175.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		86.950.000.000,00	76.175.000.000,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	238.166.115.999,00	239.970.121.099,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	366.422.958.835,72	348.110.546.785,52
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	612.277.542.968,28	564.911.913.612,28
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.001.460.820.384,85	864.851.885.978,51
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	25.499.766.412,46	24.163.472.206,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	27.684.195.982,05	4.770.691.278,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.085.185.294.019,44)	(961.880.622.808,98)
Jumlah Aset Tetap		1.186.326.106.562,92	1.084.898.008.150,79

A

URAIAN	CaLK	2023	2022
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
Jumlah Dana Cadangan		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tagihan Jangka Panjang		2.149.164.689,67	2.571.186.833,55
Tagihan Penjualan Angsuran		543.000.000,00	575.500.000,00
Tuntutan Ganti Rugi		1.606.164.689,67	1.995.686.833,55
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
Aset Tak Berwujud		1.546.236.200,00	1.448.236.200,00
Aset Lain-Lain		238.351.994.846,79	83.046.116.300,79
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.287.398.640,00)	(1.244.190.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(17.811.421.675,84)	(20.345.444.110,84)
Jumlah Aset Lainnya		222.948.575.420,62	65.475.905.223,50
Jumlah Aset		1.682.290.180.590,42	1.504.361.005.146,98
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		51.905.324,02	135.422.062,02
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		201.410.795,00	252.598.500,00
Utang Belanja		4.278.664.731,00	1.950.438.171,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		18.084.546,00	1.099.229.432,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.550.065.396,02	3.437.688.165,02
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		137.118.477,84	148.830.036,84
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		137.118.477,84	148.830.036,84
Jumlah Kewajiban		4.687.183.873,86	3.586.518.201,86
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	1.677.602.996.716,56	1.500.774.486.945,12
Jumlah Ekuitas		1.677.602.996.716,56	1.500.774.486.945,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.682.290.180.590,42	1.504.361.005.146,98

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL (Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CaLK	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	5.4.1	1.062.501.801.376,03	883.147.002.433,64	179.354.798.942,39	20,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1	61.624.023.151,03	62.394.156.021,80	(770.132.870,77)	(1,23)
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	19.786.943.733,04	12.451.795.211,75	7.335.148.521,29	58,91
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	2.973.255.445,00	2.690.823.104,00	282.432.341,00	10,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	27.049.142,65	14.158.036.468,00	(14.130.987.325,35)	(99,81)
Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.4	38.836.774.830,34	33.093.501.238,05	5.743.273.592,29	17,35
PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	998.727.944.270,00	817.181.333.476,84	181.546.610.793,16	22,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.4.1.2.1	942.527.867.439,00	765.670.179.254,00	176.857.688.185,00	23,10
Dana Bagi Hasil		349.063.335.000,00	207.477.928.570,00	141.585.406.430,00	68,24
Dana Alokasi Umum		457.131.088.950,00	436.257.086.999,00	20.874.001.951,00	4,78
Dana Alokasi Khusus - Fisik		52.417.638.397,00	52.354.260.414,00	63.377.983,00	0,12
Dana Alokasi Khusus - Nonfisik		83.915.805.092,00	69.580.903.271,00	14.334.901.821,00	20,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.4.1.2.2	-	4.984.971.000,00	(4.984.971.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Daerah		-	4.984.971.000,00	(4.984.971.000,00)	(100,00)
Dana Desa		-	-	-	-
Pendapatan Transfer antar Daerah	5.4.1.2.3	56.200.076.831,00	46.526.183.222,84	9.673.893.608,16	20,79
Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
Bantuan Keuangan		56.200.076.831,00	46.526.183.222,84	9.673.893.608,16	20,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3	2.149.833.955,00	3.571.512.935,00	(1.421.678.980,00)	(39,81)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	2.149.833.955,00	3.571.512.935,00	(1.421.678.980,00)	(39,81)
Pendapatan Lainnya-LO		-	-	-	-
BEBAN DAERAH	5.4.2	882.999.447.135,64	813.106.468.063,32	69.892.979.072,32	8,60
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	686.023.137.209,18	602.915.468.267,71	83.107.668.941,47	13,78
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	351.106.200.312,76	347.561.173.174,09	3.545.027.138,67	1,02
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	273.879.145.280,65	197.815.626.159,44	76.063.519.121,21	38,45
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-
Beban Hibah	5.4.2.1.4	52.852.672.985,10	53.353.819.037,00	(501.146.051,90)	(0,94)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	2.421.780.000,00	1.754.532.000,00	667.248.000,00	38,03
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	2.469.684.403,67	1.027.597.542,18	1.442.086.861,49	140,34
Beban Lain-Lain	5.4.2.1.7	2.693.654.227,00	802.720.355,00	1.890.933.872,00	235,57
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	127.635.927.895,46	129.510.684.147,82	(1.874.756.252,36)	(1,45)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		26.166.498.745,43	26.602.969.589,33	(436.470.843,90)	(1,64)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		34.910.387.186,25	33.733.540.272,49	1.176.846.913,76	3,49
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		66.515.833.323,78	69.170.175.286,00	(2.654.341.962,22)	(3,84)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		43.208.640,00	3.999.000,00	39.209.640,00	980,49
BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	66.807.194.831,00	73.380.810.577,00	(6.573.615.746,00)	(8,96)
Beban Bagi Hasil		4.104.711.131,00	2.843.905.141,00	1.260.805.990,00	44,33
Beban Bantuan Keuangan		62.702.483.700,00	70.536.905.436,00	(7.834.421.736,00)	(11,11)
BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4	2.533.187.200,00	7.299.505.070,79	(4.766.317.870,79)	(65,30)
Beban Tak Terduga		2.533.187.200,00	7.299.505.070,79	(4.766.317.870,79)	(65,30)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		179.502.354.240,39	70.040.534.370,32	109.461.819.870,07	156,28
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Non Operasional		11.711.559,00	-	11.711.559,00	-
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		11.711.559,00	-	11.711.559,00	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-

7

URAIAN	CaLK	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Defisit Non Operasional	5.4.2.5	3.863.351.500,00	-	3.863.351.500,00	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		3.863.351.500,00	-	3.863.351.500,00	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(3.851.639.941,00)	-	(3.851.639.941,00)	-
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		175.650.714.299,39	70.040.534.370,32	105.610.179.929,07	150,78
POS LUAR BIASA				-	
Pendapatan Luar Biasa				-	
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
Beban Luar Biasa				-	
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.2.6	175.650.714.299,39	70.040.534.370,32	105.610.179.929,07	150,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

LAPORAN ARUS KAS (Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah	18.347.176.559,04	11.593.759.007,25
Penerimaan Retribusi Daerah	2.766.598.933,00	2.545.019.804,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.049.142,65	14.158.036.468,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	38.870.170.107,34	55.350.895.481,20
Penerimaan Dana Bagi Hasil	191.068.698.189,00	194.252.890.381,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	457.131.088.950,00	436.257.086.999,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.417.638.397,00	52.354.260.414,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	83.915.805.092,00	69.580.903.271,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	4.984.971.000,00
Penerimaan Dana Desa	77.935.147.800,00	73.795.812.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan	60.819.703.245,00	48.961.524.021,29
Penerimaan Hibah	25.000.000,00	2.201.025.027,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	983.324.076.415,03	966.036.183.873,74
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai	351.104.087.669,76	347.439.505.593,09
Pembayaran Barang dan Jasa	290.601.816.469,18	228.529.659.212,00
Pembayaran Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	50.754.619.535,10	47.657.860.937,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.421.780.000,00	9.275.004.600,00
Pembayaran Tak Terduga	2.533.187.200,00	9.540.962.083,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	4.104.711.131,00	2.843.905.141,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.240.879.396,00	144.332.717.436,00
Jumlah Arus Keluar Kas	858.361.081.401,04	790.219.615.002,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	124.962.995.013,99	175.816.568.871,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	152.913.200,00	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Kembali Investasi	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	164.913.200,00	-
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	1.098.858.088,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	21.045.840.294,00	16.700.733.622,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.140.779.038,98	29.782.859.321,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.082.480.220,39	55.462.710.136,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.091.448.206,00	207.889.400,00
Perolehan Aset Lainnya	-	196.048.200,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.775.000.000,00	11.075.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	212.135.547.759,37	114.524.098.767,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(211.970.634.559,37)	(114.524.098.767,00)

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	-	-
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS:		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.985.593.566,00	43.891.828.264,00
Penambahan Jasa Giro Rek Mandiri Bapenda	6.786,82	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	56.985.600.352,82	43.891.828.264,00
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	14.606,82	(39.139.367,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(87.007.624.938,56)	61.253.330.737,65
Rincian Saldo Awal Kas Pemda Kab. Barito Timur	241.295.296.477,19	180.041.965.739,54
- Saldo Awal Kas di BUD	210.654.411.612,83	142.996.573.894,18
- Saldo Awal Kas BLUD	30.573.109.149,40	36.904.430.888,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)	114.513,96	88.495.822,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	14.750.701,00	52.465.134,00
- Saldodi Bendahara Pengeluaran	52.910.500,00	-
Saldo Akhir Kas	154.287.671.538,63	241.295.296.477,19
Selisih	-	-
Rincian Saldo Akhir Kas Pemda Kab. Barito Timur Per 31 Desember 2023	154.287.671.538,63	241.295.296.477,19
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	130.879.164.943,04	210.654.411.612,83
- Saldo Akhir Kas di BLUD	22.345.698.167,97	30.573.109.149,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)	1.004.369.608,80	114.513,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	44.551.858,00	14.750.701,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	13.879.140,82	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	7.820,00	52.910.500,00
- Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	-	83.524.558,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CaLK	2023	2022
Ekuitas Awal		1.500.774.486.945,12	1.428.416.273.131,85
Surplus/Defisit - LO		175.650.714.299,39	70.040.534.370,32
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Lain-Lain		1.177.795.472,05	2.317.679.442,95
Ekuitas Akhir		1.677.602.996.716,56	1.500.774.486.945,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


Pj. Bupati Barito Timur
Anora Gunawan



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- 1.1.1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana;
- 1.1.2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana;
- 1.1.3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 1.1.4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 1.1.5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 1.1.6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 1.1.7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana Dan Arus Kas Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1.2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 1.2.14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembar



Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

1.2.15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8; dan

1.2.16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. **Sistematika penulis Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
- 4.3. Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP



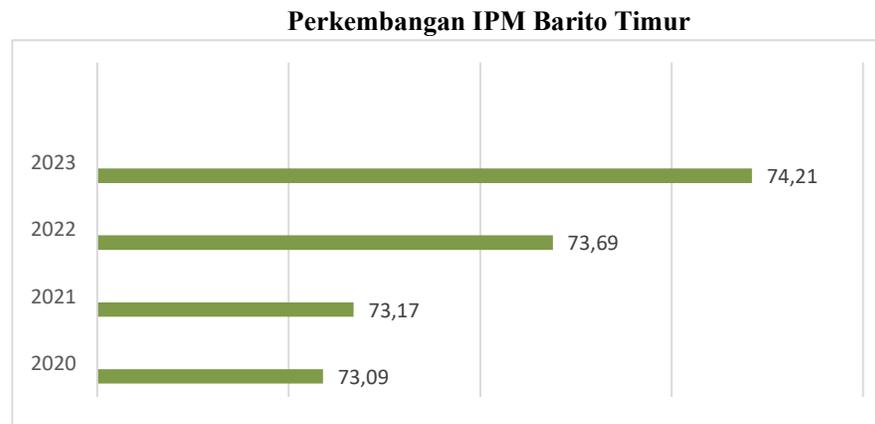
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi Ekonomi Makro Daerah merupakan gambaran tentang kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya diantaranya (Index Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kemiskinan, Gini Ratio, Laju Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi).

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu, umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Berikut diagram perkembangan IPM Kabupaten Barito Timur tahun 2020-2023:



Sumber Kabupaten Barito Timur Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan IPM di Barito Timur terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status Pembangunan manusia di Kabupaten Barito Timur sudah berada dilevel ‘tinggi’. Selama tahun 2020-2023, IPM Barito Timur rata-rata meningkat 0,51 persen per tahun, dari 73,09 pada tahun 2020 menjadi 74,21 pada tahun 2023.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur tahun 2023 sebanyak **8,59 ribu jiwa**, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai **8,42 ribu jiwa**. Sementara, berdasarkan persentase, penduduk miskin Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 mencapai 6,63 persen. Terdapat kenaikan sebesar 0,04 persen apabila dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,59 persen. (*Sumber Statistik Daerah Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2024*)

2.1.2. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (Sumber Kabupaten Barito Timur Dalam Angka Tahun 2024).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar 10.905,12 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 42,94 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (42,03%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,49%), dan Konstruksi (7,69%).

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2023 sebesar 5.856,57 billion rupiah. Meningkat sebesar 3,36% dibandingkan tahun 2022. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Timur



Sumber Kabupaten Barito Timur Dalam Angka Tahun 2024

PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2022 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2022 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 %. Sedangkan PDRB perkapita tahunan 2022 ADHK sebesar 49,04 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 %); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53%); Ekspor Impor (27,42%); Konsumsi Pemerintah (11,27%); dan



Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (0,63%). Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2019-2023

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur 2019-2023 (Miliar Rp)					
Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.839,34	2.946,57	3.060,42	3.177,95	2.435,23
2. Konsumsi LNPTR	60,99	61,17	65,85	68,50	76,96
3. Konsumsi Pemerintah	1.028,55	1.048,04	1.195,30	1.203,89	1.353,25
4. PMTB	3.027,85	2.974,00	3.118,02	3.188,37	3.543,45
5. Perubahan Inventori	241,72	261,95	163,42	140,59	-22,57
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	350,05	-188,04	346,94	3.168,77	2.518,80
PDRB	7.548,50	7.103,69	7.949,95	10.948,06	10.905,12

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Barito Timur Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 2. PDRB Atas Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur 2019-2023 (Miliar Rp)

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Konsumsi Rumah Tangga	1.789,99	1.825,64	1.861,59	1.892,97	1.946,44
4. Konsumsi LNPTR	39,36	39,00	40,16	40,65	43,55
5. Konsumsi Pemerintah	642,36	650,33	709,54	717,39	761,96
6. PMTB	1.879,30	1.846,71	1.860,45	1.878,14	1.956,84
7. Perubahan Inventori	176,55	108,60	110,24	56,31	99,88
8. Net Ekspor Barang dan Jasa	800,37	712,22	754,35	1.074,53	1.047,90
PDRB	5.327,94	5.182,50	5.336,34	5.659,98	5.856,57

*) Angka sementara



**) Angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Barito Timur Dalam Angka, Tahun 2024

2.1.3. TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 3,37%, nilai ini mengalami peningkatan dari pada tahun 2022 yang sebesar 2,95%. Peningkatan pada Tingkat Pengangguran Terbuka ini disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi. Sebagian besar merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan, sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran.

Besarnya nilai TPT Barito Timur merupakan yang terendah kelima di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Lamandau. Sementara, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,79%.

Tabel 3. TPAK dan TPT 2021-2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Timur, 2021-2023 (%)

Rincian	Satuan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK	%	78,4	75,3	74,79
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT	%	3,22	2,95	3,37

Sumber : Kabupaten Barito Timur Dalam Angka, Tahun 2024

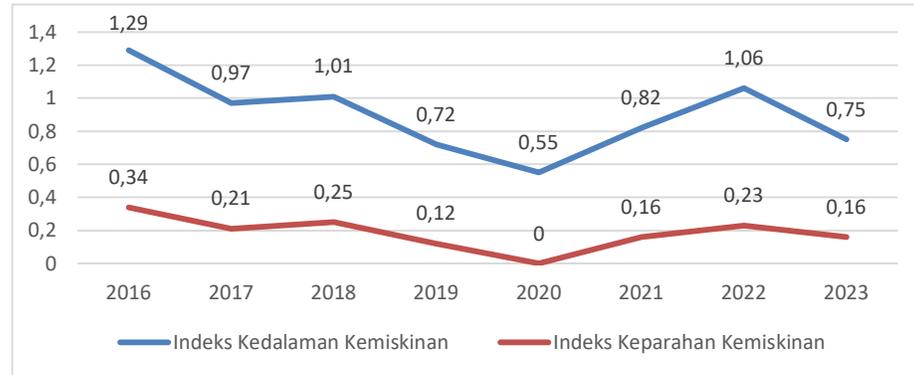
2.1.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menyatakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Nilai rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang digambarkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 0,31 poin. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin hanya mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07 poin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur tahun 2023 sebanyak **8,59 ribu jiwa**, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai **8,42 ribu jiwa**. (Sumber Statistik Daerah Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2024).



Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Timur, 2016-2022



Sumber : Kabupaten Barito Timur Dalam Angka, Tahun 2024

2.1.5. Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Tabel 4. Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2023

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah		
	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	0,323	0,319	0,317
Palangka Raya	0,362	0,383	0,312
Barito Selatan	0,286	0,309	0,289
Barito Timur	0,297	0,294	0,331
Barito Utara	0,308	0,301	0,323
Gunung Mas	0,278	0,262	0,309
Kapuas	0,312	0,303	0,305
Katingan	0,230	0,250	0,261
Kotawaringin Barat	0,317	0,315	0,335
Kotawaringin Timur	0,325	0,292	0,290
Lamandau	0,321	0,318	0,333
Murung Raya	0,308	0,260	0,261
Pulang Pisau	0,262	0,288	0,280
Seruyan	0,262	0,292	0,261



Kabupaten/Kota	Gini Ratio Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah		
	2021	2022	2023
Barito Timur	0,290	0,322	0,287

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/23/371/1/gini-rasio.html>

2.1.6. Laju Inflasi

Survey harga pedesaan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap tanggal 10-14 setiap bulan di Pasar Ampah dan Tamiang Layang. Berdasarkan survey tersebut, dapat diperoleh harga rata-rata dari berbagai komoditas baik makanan maupun non makanan. Harga beberapa sembako terpilih seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan sebagainya pada tahun 2022 cukup berfluktuatif setiap bulannya dan mengalami kenaikan harga secara rata-rata jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ditunjukkan oleh komoditas daging sapi, daging ayam ras, dan ikan gabus. Kenaikan harga ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang terjadi pada masa itu.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang mampu mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. **Kabupaten Barito Timur belum memiliki IHK maupun inflasi sendiri.** Perhitungan IHK baru dilaksanakan di Sampit dan Palangkaraya. (Sumber Statistik Daerah Kabupaten Barito Timur 2023)

2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2023 sebesar 3,47%. Nilai tersebut menurun dibandingkan laju pertumbuhan ekonomo tahun 2022 sebesar 6,06%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Timur tahun 2023 berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan berkelanjutan sektor perekonomian makro dan mikro. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing seluruh potensi daerah agar mampu berinovasi dan melipatgandakan nilai dan kegunaannya. Diharapkan produk-produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk luar daerah dan perekonomian daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan Barito Timur dengan pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan;
- Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat mengembangkan daya Tarik pariwisata;
- Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat dengan Optimalisasi pengembangan koperasi, UKM serta industri;
- Meningkatkan investasi daerah dalam mengurangi pengangguran;
- Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas anatar wilayah;
- Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan;



2.2.1. Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran *horizontal* dan kewajaran *vertikal*. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagai hak Pemerintah Daerah. Struktur Pendapatan di Tahun Anggaran 2023, yaitu:

2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah diperoleh dari, Pajak Hotel, Rumah Makan, Jasa Katering dan sejenis, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Lainnya, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta BPHTB.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi diperoleh dari, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan, Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera, Menara Telekomunikasi, Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Terminal, Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Izin Mendirikan Bangunan.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari, Bagian Laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah serta Deviden.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah diperoleh dari, Hasil Penjualan Aset, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda, Pendapatan Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Pendapatan Non Kapitasi JKN serta Pendapatan Kapitasi JKN.



2.1.1.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus – Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

2.1.1.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya di Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Dana Desa.

2.1.1.4. Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pemerintah Provinsi

Pendapat Transfer Antar Daerah – Pemerintah Provinsi di Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

2.1.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah serta Pendapatan Lainnya.

2.2.2. Arah dan Kebijakan Umum Belanja

Belanja Daerah sebagai komponen Keuangan Daerah dalam kerangka Ekonomi Makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang telah memberikan efek *multiplier* lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, Belanja Daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan Belanja sejak proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan hingga Pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Struktur Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2023, yaitu:

2.1.1.6. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan komponen belanja pegawai BOS, sedangkan tahun 2022 tidak ada.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan komponen yaitu belanja barang dan jasa BOS sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak ada.



c) Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak dianggarkan sebab tidak ada kewajiban atas pembayaran bunga atas pinjaman jangka panjang.

d) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi, masih sama dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu Subsidi untuk tarif Air Minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

e) Belanja Hibah

Belanja Hibah selain dianggarkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) juga di Anggarkan pada SKPD tertentu yang sumbernya adalah Dana Alokasi Khusus. Belanja hibah tahun anggaran 2023 terdapat penambahan komponen belanja hibah dana BOS.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial di Anggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan pada SKPD tertentu sesuai dengan penganggaran untuk tugas tertentu yang telah direncanakan pada saat penyusunan RKA-SKPD.

2.1.1.7. Belanja Modal

Belanja modal di tahun anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah. Namun komponen Belanja Modal masih sama sebagaimana berikut:

a) Belanja Modal Tanah

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f) Belanja Modal Aset Lainnya

2.1.1.8. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2023 peruntukannya dimanfaatkan untuk penanganan demam berdarah dan bencana banjir, selain dari dana-dana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Tak Terduga dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dana yang diminta diserahkan ke SKPD teknis penanganan demam berdarah dan bencana banjir.

2.1.1.9. Belanja Transfer

Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang tujuan utamanya untuk dukungan penyertaan modal kepada Badan



Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Belanja Bantuan Keuangan, kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa (ADD), Tunjangan Perangkat Adat Desa, Jamkesda, Subsidi BPJS Perangkat Desa dan Bantuan Parpol.

2.2.3. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi Penggunaan Anggaran. Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja maupun pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal)

2.1.1.10. Penerimaan Pembiayaan

2.1.1.11. Pengeluaran Pembiayaan

2.2.4. Struktur APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2023

Struktur APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5. Rincian APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2023

Nomor	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.112.375.558.245	972.196.218.202	(140.179.340.043)	13%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.091.070.255	77.356.166.754	(122.734.903.501)	61%
1.1.1	Pajak Daerah	41.335.000.000	25.543.000.000	(15.792.000.000)	38%
1.1.2	Retribusi Daerah	37.225.005.926	3.908.604.800	(33.316.401.126)	90%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	59.493.207.046	0	(59.493.207.046)	100%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	62.037.857.283	47.904.561.954	(14.133.295.329)	23%



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Nomor	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	892.240.087.990	892.630.147.990	390.060.000	0 %
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841.742.403.000	842.132.463.000	390.060.000	0%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.497.684.990,00	50.497.684.990	0	0%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.044.400.000	2.209.903.458,00	(17.834.496.542)	89 %
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.044.400.000	2.209.903.458,00	(17.834.496.542)	89%
2	BELANJA DAERAH	1.162.433.763.366	1.202.208.265.241	39.774.501.875	3 %
2.1	BELANJA OPERASI	761.242.101.785	793.117.097.656	31.874.995.871	4%
2.1.1	Belanja Pegawai	398.608.461.452	405.736.333.308	7.127.871.856	2%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	316.512.613.904	324.145.224.309	7.632.610.405	2%
2.1.4	Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0	0%
2.1.5	Belanja Hibah	36.889.276.42	57.917.790.039	21.028.513.610	57%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.631.750.000	4.717.750.000	(3.914.000.000)	45 %
2.2	BELANJA MODAL	207.395.177.681	229.313.802.685	21.918.625.004	11 %
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	3.995.000.468	2.995.000.468	300 %
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.207.606.690	23.035.833.434	7.828.226.744	51 %
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.846.064.323	44.575.128.268	5.729.063.945	15 %



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Nomor	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.091.631.668	156.653.430.865	4.561.799.197	3 %
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	249.875.000	1.054.409.650	804.534.650	322 %
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	25.000.000.000	10.000.000.000	(15.000.000.000)	60 %
2.3.1	Belanja Tidak Teduga	25.000.000.000	10.000.000.000	(15.000.000.000)	60 %
2.4	BELANJA TRANSFER	168.796.483.900	169.777.364.900	10.094.871.198,00	6,61
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.133.500.000	4.133.500.000	0	0%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	164.662.983.900	165.643.864.900	980.881.000	1 %
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.058.205.121)	(230.012.047.039)	(179.953.841.918)	-359 %
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.333.205.121	241.287.047.039	179.953.841.918	293 %
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.333.205.121	241.287.047.039	179.953.841.918	293 %
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.275.000.000	11.275.000.000	0	0%
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	11.275.000.000	11.275.000.000	0	0%
	PEMBIAYAAN NETTO	50.058.205.121	230.012.047.039	179.953.841.918	359 %
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0%

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)



maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di Kabupaten Barito Timur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional, tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah serta isu strategis di Kabupaten Barito Timur, maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 menetapkan skala prioritas, yaitu:

- Prioritas 1 : Peningkatan Ekonomi Kerakyaatan
- Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Susmber Daya Manusia
- Prioritas 3 : Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
- Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Daerah
- Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian atas target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di bidang keuangan yang terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran selama satu tahun anggaran. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini bertujuan untuk mengukur secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi tiga komponen, yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Ikhtisar atas tiga komponen tersebut disajikan sebagai berikut

Tabel 6. Ikhtisar Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		APBD-P	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	972.196.218.202,00	983.488.989.615,03	101,17	966.036.183.873,74
2	Belanja dan Transfer	1.202.208.265.241,00	1.059.721.629.160,41	88,15	893.668.713.769,09
3	Surplus/(Defisit)	(230.012.047.039,00)	(76.232.639.545,38)	0	72.367.470.104,65
4	Penerimaan Pembiayaan	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	230.012.047.039,00	230.512.047.039,17	100,22	168.919.576.934,52
	SiLPA/SiKPA	0,00	154.279.407.493,79		241.287.047.039,17

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pada Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan realisasi Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. Realisasi yang melampaui Pagu Anggaran 2023 dari 2 komponen Dana Bagi Hasil tersebut, disebabkan kurang salur dari Pemerintah Pusat untuk tahun-tahun sebelum direalisasi di Tahun Anggaran 2023. Kenaikan Pendapatan Daerah selain dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam komponen Pendapatan Asli Daerah pun turut memberikan sumbangsih yang signifikan khususnya dari Lain-Lain PAD yang Sah. Kenaikan Pendapatan ini dimanfaatkan secara optimal untuk mendanai Belanja Daerah serta dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Berjalan.

3.1.2. Belanja dan Transfer Daerah

Pada tahun 2023, Belanja dan Transfer Daerah ditargetkan sebesar Rp1.202.208.265.241,00 dan direalisasikan sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.059.721.629.160,41 atau sebesar 88,15. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp893.668.713.769,09. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022. Pencapaian target Belanja Daerah juga



dikategorikan dalam bentuk Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah/(Berkurang)			
		APBD-P	Realisasi	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
0	1	01	Pendidikan	250.923.457.922,00	225.303.320.861,18	(25.620.137.060,82)	89,79
0	1	02	Kesehatan	140.284.638.733,00	123.846.700.597,83	(16.437.938.135,17)	88,28
0	1	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	229.391.277.911,00	206.335.833.131,47	(23.055.444.779,53)	89,95
0	1	04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.202.344.254,00	1.837.120.468,00	(2.365.223.786,00)	43,72
0	1	05	Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	12.922.178.815,00	12.275.581.703,20	(646.597.111,80)	95,00
0	1	06	Sosial	1.273.285.444,00	1.055.362.555,00	(217.922.889,00)	82,88
0	2	07	Tenaga Kerja	4.664.337.810,00	4.187.318.114,00	(477.019.696,00)	89,77
0	2	08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.801.700.081,00	4.440.131.521,00	(361.568.560,00)	92,47
0	2	09	Pangan	921.914.995,00	901.004.515,00	(20.910.480,00)	97,73
0	2	11	Lingkungan Hidup	11.804.330.778,00	11.378.702.131,00	(425.628.647,00)	96,39
0	2	12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.904.507.952,00	4.456.575.853,00	(447.932.099,00)	90,87
0	2	13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.313.771.511,00	4.108.424.437,00	(205.347.074,00)	95,24
0	2	14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.039.774.985,00	3.509.146.666,00	(530.628.319,00)	86,86
0	2	15	Perhubungan	5.651.318.657,00	5.087.354.564,00	(563.964.093,00)	90,02
0	2	16	Komunikasi & Informatika	5.641.430.475,00	5.082.660.565,00	(558.769.910,00)	90,10
0	2	17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.578.095.410,00	1.531.467.250,00	(46.628.160,00)	97,05
0	2	18	Penanaman Modal	3.268.885.825,00	3.112.083.779,00	(156.802.046,00)	95,20
0	2	19	Kepemudaan Dan Olahraga	2.931.264.670,00	2.420.653.853,02	(510.610.816,98)	82,58
0	2	20	Statistik	83.667.000,00	77.683.000,00	(5.984.000,00)	92,85



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD-P	Realisasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 2 21	Persandian	62.213.000,00	61.622.700,00	(590.300,00)	99,05
0 2 22	Kebudayaan	5.285.019.494,00	4.906.497.374,00	(378.522.120,00)	92,84
0 2 23	Perpustakaan	4.160.266.209,00	3.738.527.514,00	(421.738.695,00)	89,86
0 2 24	Kearsipan	73.964.400,00	73.964.000,00	(400,00)	100,00
0 3 25	Kelautan Dan Perikanan	9.131.299.378,00	8.349.105.793,00	(782.193.585,00)	91,43
0 3 26	Pariwisata	185.787.060,00	168.418.500,00	(17.368.560,00)	90,65
0 3 27	Pertanian	43.080.895.480,00	40.121.032.287,00	(2.959.863.193,00)	93,13
0 3 30	Perdagangan	6.769.087.885,00	6.591.105.960,00	(177.981.925,00)	97,37
0 3 31	Perindustrian	161.520.550,00	156.267.150,00	(5.253.400,00)	96,75

Kode	Uraian	Jumlah Rp		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD-P	Realisasi	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 3 32	Transmigrasi	31.499.700,00	31.143.600,00	(356.100,00)	98,87
0 4 01	Sekretariat Daerah	76.177.513.620,00	63.423.350.901,71	(12.754.162.718,29)	83,26
0 4 02	Sekretariat Dprd	45.523.481.796,00	42.330.802.833,00	(3.192.678.963,00)	92,99
0 5 01	Perencanaan	6.573.319.446,00	6.110.494.604,00	(462.824.842,00)	92,96
0 5 02	Keuangan	247.946.403.231,00	202.489.958.737,00	(45.456.444.494,00)	81,67
0 5 03	Kepegawaian	8.242.150.216,00	7.654.353.321,00	(587.796.895,00)	92,87
0 5 05	Penelitian Dan Pengembangan	157.509.200,00	156.224.828,00	(1.284.372,00)	99,18
0 6 01	Inspektorat	8.245.619.389,00	7.874.864.376,00	(370.755.013,00)	95,50
0 7 01	Kecamatan	30.609.233.431,00	28.582.477.743,00	(2.026.755.688,00)	93,38
0 8 01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.189.298.528,00	15.954.291.374,00	(235.007.154,00)	98,55
	Jumlah	1.202.208.265.241,00	1.059.721.629.160,41	(142.486.636.080,59)	88,15

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.



Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng).

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Pemulihan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah (DBD) oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan alokasi Belanja Tak Terduga peruntukannya masih Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir Dan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah (DBD). Kendala lain yang menjadi perhatian adalah efek dari perekonomian nasional maupun dunia yaitu antisipasi dan intervensi dini untuk permasalahan inflasi. Hal tersebut merupakan instruksi secara berjenjang dari Pemerintah Pusat agar setiap Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja wajib dalam rangka penurunan inflasi serta membuat skema maupun langkah-langkah strategis untuk pengendalian tingkat inflasi diwilayahnya masing-masing.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi adalah Unit Pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur selaku Entitas Pelaporan terdiri dari 36 Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran dan 1 Entitas Akuntansi BLUD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD dan SKPKD melaksanakan Entitas Akuntansi Pengguna Anggaran dan Entitas Pelaporan selaku PPKD. Adapun Entitas Akuntansi tersebut tertuang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur:

4.1.1. Dinas Daerah sebanyak 16, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan;
- b) Dinas Kesehatan;
- c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;
- e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f) Dinas Lingkungan Hidup;
- g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial;
- i) Dinas Perhubungan;
- j) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- m) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- o) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- p) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4.1.2. Lembaga Teknis Daerah sebanyak 8 Lembaga, yaitu:

- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- b) Badan Perencanaan, Pembangunan dan Litbang Daerah;
- c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d) Badan Pendapatan Daerah;



- e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g) Inspektorat
- h) Satuan Polisi Pamong Praja

4.1.3. Sekretariat dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur berjumlah 2, yaitu:

- a) Sekretariat Daerah
- b) Sekretariat DPRD

4.1.4. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan, yaitu:

- a) Kecamatan Benua Lima.
- b) Kecamatan Dusun Timur.
- c) Kecamatan Awang.
- d) Kecamatan Patangkep Tutui.
- e) Kecamatan Dusun Tengah.
- f) Kecamatan Pematang Karau.
- g) Kecamatan Paju Epat.
- h) Kecamatan Raren Batuah.
- i) Kecamatan Paku.
- j) Kecamatan Karusen Janang.

4.2. Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah *cash toward accrual basis* yakni menggunakan basis kas dan basis akrual secara bersamaan:

- 1) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan
- 2) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa berdasarkan pengaruhnya terhadap Kas Daerah dan diterapkan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanjadan pembiayaan. Artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pemerintah Kabupaten Barito Timur tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaananggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.Selisih jumlah pendapatan dan belanja ini disebut Surplus/Defisit. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus.Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada



pos-pos aktiva, kewajiban dan ekuitas. Artinya aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (kecuali untuk kasus khusus);
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD dan SKPD. Pendapatan yang sudah diterima oleh SKPD, namun belum disetorkan ke Kas Daerah (Per 31 Desember 2023 pada tanggal neraca), belum dicatat/diaku sebagai pendapatan SKPD Tahun 2023. Penerimaan atas pendapatan tersebut dalam Neraca SKPD/PPKD dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan Ditangguhkan, Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa di setor, kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c) Pendapatan yang diterima oleh suatu SKPD, namun tidak dianggarkan pada SKPD tersebut, melainkan dianggarkan pada SKPD lain (misal BPKAD atau Badan Pendapatan), maka pendapatan tersebut akan dicatat pada SKPD yang terdapat anggaran pendapatan tersebut (misal setoran pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2022 atau tahun sebelumnya, dan jasa giro bendahara pengeluaran, sedangkan kelebihan setoran bendahara pengeluaran atas uang persediaan dan tambah uang persediaan pada tahun anggaran 2023 yang telah disetor selama tahun berjalan dicatat sebagai *penerimaan lain-lain*.
- d) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima.
- e) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (Kecuali untuk Kasus khusus), selanjutnya Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- a) Pendapatan LO adalah Hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



- b) Pendapatan LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned)
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi (realized)
- c) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :
 - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
 - 2) Pendapatann-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- d) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (kecuali untuk kasus khusus).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Barito Timur;
- b) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- c) Koreksi atas penerimaan belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama (Kontrapos);
- d) Koreksi atas pengeluaran belanja (disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran berikutnya), sepanjang proses penyusunan laporan keuangan masih berlangsung/pemeriksaan atas laporan keuangan tengah dilaksanakan/masih memungkinkan untuk dilakukan koreksi, dibukukan sebagai pengurang belanja;
- e) Pengembalian/koreksi belanja tersebut termasuk pengembalian karena adanya temuan atas pemeriksaan belanja oleh aparat pengawas/pemeriksa;
- f) Penerimaan kembali belanja, termasuk pengembalian atas temuan Inspektorat dan LHP BPK RI pada Pemeriksaan Laporan Keuangan atas realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya, sepanjang tidak memungkinkan lagi untuk dibukukan sebagai pengurang belanja (kontrapos), dicatat sebagai penerimaan lain-lain di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Badan Pendapatan Daerah;
- g) Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah; Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Belanja disajikan di muka (*on face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi urusan, organisasi, program dan kegiatan, kelompok, serta jenis belanja.
- h) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (yang nantinya akan menjadi aset tetap), jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :



- 1) Manfaat ekonomi, barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional pemerintah daerah dan pelayanan, serta tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga;
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
- 4) Apabila dalam APBD terdapat Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria di atas, dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap dilaporkan sebagai Belanja Modal, namun demikian tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (tidak masuk dalam daftar inventaris barang maupun dalam neraca), Belanja Modal dimaksud diperlakukan sebagai Belanja Modal tidak membentuk Barang Milik Daerah (BMD). Ketentuan Belanja Modal tidak membentuk Barang Milik Daerah dapat terjadi karena kesalahan Penganggaran pada tingkat SKPD saat Penyusunan APBD.
- 5) Apabila dalam Pelaksanaan APBD terdapat Belanja non Belanja Modal, namun menghasilkan aset yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap, maka atas belanja tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap dilaporkan sebagai Belanja non Modal, namun dikapitalisasi menjadi aset tetap. Belanja non Modal dimaksud diperlakukan sebagai Belanja non Modal membentuk Barang Milik Daerah yang dilaporkan dalam Neraca pada Komponen Aset Tetap.
 - i) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - j) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi untuk Beban-LO

Beban-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban yang artinya saat terjadinya peralihan hak dari Pihak Lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Terjadinya konsumsi aset yang artinya saat pengeluaran kas kepada Pihak Lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah seperti pemakaian persediaan;
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang artinya pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu;
- d) Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai Beban/Belanja Dibayar Dimuka.



4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali SiLPA; karena SiLPA bisa saja terjadi tidak mencapai 100% akibat adanya koreksi terhadap *Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD* tahun anggaran sebelumnya yang tidak bisa dianggap sebagai bagian lancar dan telah diterbitkan SKTJM untuk menindaklanjuti Saldo Kas dimaksud, guna mempercepat proses penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Akuntansi pembiayaan dilaksanakan berdasar azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- e) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.



a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

- 1) *Kas dan Setara kas* adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang setiap dicairkan menjadi setara kas bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid siap untuk dicairkan menjadi kas serta mempunyai masa jatuh tempo bersifat jangka pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 2) *Kas dan setara kas* disajikan dalam neraca berdasarkan nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya yang menunjukkan nilai kebenaran tidak hanya nilai kewajaran. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. *Kas* meliputi Kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran; sedangkan setara kas meliputi simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan
- 3) *Piutang* dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya (SKPD & SKRD) dan *Piutang Lainnya* muncul akibat pendapatan asli daerah yang tidak sempat disetor ke Kas Umum Daerah hingga batas akhir Tahun Anggaran 2023; tidak termasuk dalam kelompok Piutang yang dimaksud pada Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- 4) *Penyisihan Piutang* untuk disajikan dalam nilai bersihnya (net realizable value) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 8. Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5%
b.	Kurang Lancar	10%
c.	Diragukan	50%
d.	Macet	100%



- 5) *Persediaan* adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. *Persediaan* dicatat di neraca berdasarkan:
 - (a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- b) *Investasi*
 - 1) *Investasi* adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) *Investasi* pemerintah diklasifikasikan ke dalam *investasi jangka pendek* dan *investasi jangka panjang*. *Investasi jangka pendek* adalah *investasi* yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. *Investasi jangka panjang* adalah *investasi* yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun;
 - 3) *Investasi jangka panjang* dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen;
 - 4) *Investasi Non Permanen* dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
 - 5) *Investasi jangka panjang* pemerintah daerah terhadap perusda/ pihak ketiga, dicatat menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk kepemilikan *investasi* di bawah 20% dan metode ekuitas (*equity method*) untuk kepemilikan *investasi* 20% atau lebih.
- c) *Aset Tetap*
 - 1) *Aset Tetap* mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, *Aset tetap* diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai *aset tetap* harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.



- (f) Nilai rupiah pembelian barang atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 2) *Penilaian Aset Tetap* dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3) *Biaya Perolehan* adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - 4) *Harga Perolehan* suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 5) mencakup seluruh aset yang memiliki sumber daya ekonomi dan dapat dimanfaatkan pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
 - 6) Masa manfaat aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Berikut tabel masa manfaat:

Tabel 9. Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat/Tahun
I	Peralatan dan Mesin	
1	Alat Besar	8
2	Alat Angkut	8
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5
4	Alat Pertanian dan Peternakan	5
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4
6	Alat Studio dan Komunikasi	4
7	Alat Kedokteran	4
8	Alat Laboratorium	4
9	Alat Keamanan	4
II	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan dan Gedung	20
2	Monumen	20
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan	



No.	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat/Tahun
1	Jalan dan Jembatan	16
2	Bangunan Air/Irigasi	16
3	Instalasi	16
4	Jaringan	16
IV	Aset Tetap Lainnya	
1	Alat-Alat Olahraga	4

- 7) Dalam hal ini Aset tetap dalam Neraca SKPD/PPKD dilaporkan berdasarkan atas harga perolehan (*Original Cost*) saat mengkapitalisasi aset tetap tersebut, yaitu per 31 Desember 2023.
- 8) Pengakuan aset tetap yang perolehannya didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, antara lain:
- (a) Pengeluaran untuk persatuan *peralatan dan mesin*, peralatan olah raga, serta peralatan lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*); dan
 - (b) Pengeluaran untuk *gedung dan bangunan* yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - (d) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - (e) Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya menambah nilai aset yang bersangkutan.
- 9) *Biaya* yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- (a) Biaya persiapan tempat;
 - (b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - (c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - (d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - (e) Biaya konstruksi; dan



- (f) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- 10) *Aset tetap lainnya* mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap selain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan instalasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.
- 11) *Konstruksi dalam pengerjaan* mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu, dimana periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 12) *Suatu benda berwujud* harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 13) *Konstruksi Dalam Pengerjaan* biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika telah memenuhi 2 (dua) kriteria, pertama konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; kedua konstruksi dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 14) *Konstruksi Dalam Pengerjaan* dicatat dengan biaya perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok dan jenis asetnya.
- 15) *Perolehan Aset* dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak konstruksi dapat meliputi kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitek; kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.



16) *Konstruksi Dalam Pengerjaan* ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok dan jenis asetnya.

17) Tanah

BULETIN TEKNIS TANAH

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 08 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lebih lanjut, PSAP 07 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah, yaitu pada Paragraf 61 sampai dengan 64 yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan pengakuan tanah di luar negeri.

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Buletin Teknis Aset Tetap Tanah memberikan pedoman sebagai berikut:

- (a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (b) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- (c) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah



tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengukuran Tanah

PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa :

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selanjutnya, PSAP 07 Paragraf 30 menyatakan bahwa :

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

d) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pada masa yang akan datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga. Dana cadangan dapat dibentuk lebih dari satu peruntukan, apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus dirinci menurut tujuan peruntukannya masing-masing.

e) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Aset yang akan dihibahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat, dan Aset Lain-lain (dalam kondisi rusak).

- 1) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tagihan Penjualan Angsuran berasal dari penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas lingkungan pemerintah daerah.
- 2) **Tuntutan Perbendaharaan** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil sebagai bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (SKP) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3) **Tuntutan Ganti Rugi** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan



setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke rekening kas umum daerah.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

- 4) **Aset tak berwujud** adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), hak paten, dan *goodwil*; hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- 5) **Aset lain-lain** merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dana yang dibatasi penggunaannya, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), aset yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, aset dalam kondisi rusak, dan piutang tidak tertagih (macet) juga termasuk dalam kelompok aset Lain-lain.

BULETIN TEKNIS ASET TETAP HILANG

Aset Tetap Hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap Hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat berupa kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, serta kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) *Kewajiban Jangka Pendek*

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, Bunga dimaksud berasal dari utang jangka panjang dalam negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan; jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pengakuan utang perhitungan pihak ketiga (*account payable*) adalah pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori kewajiban lancar yang ada, termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah mencakup seluruh biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengakuan untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai bersangkutan. Contoh lainnya yang termasuk dalam kategori kewajiban lancar lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, maka jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita



acara kemajuan pekerjaan walaupun realisasi keuangan masih dibawah realisasi fisik. Nilai nominal atas utang jangka pendek lainnya pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada pemberi utang (Pihak III) sebesar pokok utang dan bunga tidak dikelompokkan, karena utang yang dimaksud muncul akibat keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga pada unit kerja SKPD yang diakibatkan karena keterlambatan pembayaran belanja sedangkan kontrak atas pekerjaan telah dilaksanakan dan mencapai realisasi fisik 100%.

b) *Kewajiban Jangka Panjang*

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari penerimaan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Suatu kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dan Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); transaksi tanpa pertukaran (*non exchange transactions*) sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang obligasi yang dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung (*take care of*) seperti yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

c) *Kewajiban Kontijensi*

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kabupaten Barito Timur, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Kebijakan ekuitas dana yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah akuntansi ekuitas dana yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yaitu selisih antara aset dan utang



Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan, biasanya dititipkan pada lembaga keuangan bank.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Sentral (Bank Indonesia) yang terjadi pada tanggal transaksi.

Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4. Dokumen Sumber sebagai dasar pencatatan transaksi

Dokumen sumber merupakan pedoman/dasar penyajian akun-akun pada laporan realisasi anggaran dan neraca. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di Neraca SKPD dan PPKD lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi

No.	Nama Akun	Dokumen Sumber
1.	Kas	- Berita acara kas opname
2.	Piutang	- SKPD/SKRD yang belum dilunasi - Surat keputusan alokasi difinitif tunggakan pendapatan - Surat keputusan penghapusan piutang
3.	Persediaan	- Berita acara inventarisasi fisik persediaan - Surat keputusan penghapusan persediaan
4.	Aset tetap	- Kuitansi pembelian/ kontrak pengadaan barang - Daftar NJOP - Berita acara hasil appraisal - Surat keputusan penghapusan aset tetap
5.	Utang/kewajiban	- Kontrak/SPK pengadaan yang belum dilunasi - Surat perjanjian pinjaman



Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi *Pendapatan di PPKD* adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Pendapatan

No.	Transaksi pendapatan	Dokumen Sumber
1.	Penerimaan dana perimbangan	- Surat tanda bukti transfer pembayaran dari Bendahara Umum Negara (BUN) berupa Nota Kredit Bank - Bukti penerimaan lainnya
2.	Lain – lain pendapatan daerah yang sah	- Surat tanda bukti penerimaan - Bukti penerimaan lainnya (berita acara penerimaan)

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi *Belanja di PPKD* adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Belanja

No.	Transaksi Belanja	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1.	Belanja bunga	- SP2D LS - Nota debit bank - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD
2.	Belanja subsidi	- SP2D LS - Nota debit bank - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah
3.	Belanja hibah	- SP2D LS - Nota debit bank - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah
4.	Belanja Bantuan Sosial	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah
5.	Belanja bagi hasil	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Transaksi Belanja	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
6.	Belanja bantuan keuangan	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah
7.	Belanja tidak terduga	- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara - Keputusan kepala daerah

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi *Penerimaan Pembiayaan di PPKD* adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Penerimaan Pembiayaan

No.	Transaksi belanja	Dokumen sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1.	Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya	- Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- Nota kredit bank
2.	Pencairan dana cadangan	- Nota kredit bank - Perda tentang dana cadangan	- Copy surat perintah pemindahbukuan
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	- Bukti penerimaan pembayaran	- Berita acara
4.	Penerimaan pinjaman daerah	- Surat tanda bukti penerimaan/bukti transfer - Bukti penjualan obligasi	- Nota kredit bank
5.	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman	- Surat tanda bukti penerimaan/bukti transfer	- Nota kredit bank
6.	Penerimaan piutang daerah	- Surat tanda bukti penerimaan/bukti transfer	- Nota kredit bank

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi *Pengeluaran Pembiayaan di PPKD* adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Transaksi belanja	Dokumen sumber	Lampiran Dokumen
1.	Pembentukan dana cadangan	- SP2D LS - Perda tentang dana cadangan	- SPD - SPM



No.	Transaksi belanja	Dokumen sumber	Lampiran Dokumen
2.	Penyertaan modal pemerintah daerah	- SP2D LS - Perda tentang penyertaan modal	- SPD - SPM
3.	Pembayaran pokok utang	- SP2D LS - Perda tentang pembayaran utang	- SPD - SPM
4.	Pemberian pinjaman daerah	- SP2D LS - Perda tentang pemberian pinjaman	- SPD - SPM - Perjanjian pinjaman

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat perubahan ekuitas dana sama dengan yang digunakan untuk mencatat transaksi *corollary*-nya, adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Perubahan Ekuitas

No.	Jenis transaksi	Dokumen Sumber
1.	Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2.	Ekuitas dana lancar-cadangan piutang	- SKP/SKR yang belum dibayar - Surat perjanjian pemberian pinjaman - Bukti transfer
3.	Ekuitas dana lancar-cadangan persediaan	- Berita acara hasil inventarisasi fisik
4.	Ekuitas dana lancar-dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	- Surat perjanjian pinjaman (utang) SP2D
5.	Ekuitas dana investasi-diiinvestasikan dalam investasi jangka panjang	- SP2D copy surat perintah pemindahbukuan
6.	Ekuitas dana investasi-diiinvestasikan dalam aset tetap	- Berita acara serah terima barang - Surat keputusan dum
7.	Ekuitas dana investasi-diiinvestasikan dalam aset lainnya	- Surat keputusan penempatan SP2D
8.	Ekuitas dana investasi-dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	- Surat perjanjian pinjaman (utang) SP2D
9.	Ekuitas dana cadangan- diinvestasikan dalam dana cadangan	- Perda tentang dana cadangan SP2D

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat mutasi akun resiprokal (*reciprocal account*) R/K SKPD/Dinas merupakan dokumen yang terkait antar kantor, antara SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD/Pemda, yaitu dokumen transfer antar kedua kantor tersebut, adalah sebagai berikut:



Tabel 16. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Mutasi Resiprokal

No.	Jenis transaksi	Dokumen Sumber
1.	PPKD mengeluarkan SP2D kepada SKPD (transfer uang dari PPKD)	- SP2D UP - SP2D GU - SP2D TU
2.	PPKD mengeluarkan tembusan pelunasan belanja LS kepada SKPD (transfer belanja dari SKPD)	- Tembusan SP2D LS
3.	PPKD menerima setoran pendapatan atau sisa kas ke PPKD (transfer uang ke PPKD)	- STS
4.	PPKD melakukan penyesuaian atas persediaan, piutang pendapatan, dan depresiasi	- Berita acara inventarisasi fisik - Surat penetapan DAU/DAK - Bukti penghitungan depresiasi

Dokumen sumber yang dijadikan sebagai dasar dalam pencatatan transaksi non kas, adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Dokumen Sumber Pencatatan Transaksi Non Kas

No.	Transaksi	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1.	Koreksi kesalahan pencatatan	- Bukti memorial	- Bukti transaksi pendukung
2.	Pengakuan aset dan ekuitas	- Berita acara penerimaan barang - Berita acara serah terima pekerjaan/barang - Berita acara penyelesaian pekerjaan	- Bukti transaksi pendukung
3.	Penerimaan pinjaman daerah	- Surat tanda bukti penerimaan /bukti transfer - Bukti penjualan obligasi	- Nota kredit bank
4.	Depresiasi	- Bukti memorial	- Bukti transaksi pendukung
5.	Transaksi yang bersifat <i>accrual</i> dan <i>prepayment</i>	- Bukti memorial	- Bukti transaksi pendukung

Transaksi akuntansi di PPKD secara umum terbagi atas akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, akuntansi aset, akuntansi ekuitas dana, akuntansi R/K PPKD dan R/K SKPD, serta akuntansi transaksi selain kas. Terdapat standar jurnal untuk



mencatat setiap transaksi yang terjadi di tingkat PPKD. Namun yang terpenting adalah pengidentifikasian dari tiap transaksi tersebut (yang didukung oleh dokumen relevan) untuk kemudian dapat dibuat pencatatan ke dalam jurnal yang benar. Jika dasar pemahaman atas pembuatan jurnal ini sudah baik, maka untuk proses selanjutnya yakni Pelaporan Keuangan tidak akan ditemui masalah yang berarti.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan – LRA

Realisasi Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp983.488.989.615,03R dan p966.036.183.873,74, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Daerah	972.196.218.202,00	983.488.989.615,03	101,16	966.036.183.873,74
Pendapatan Asli Daerah	77.356.166.754,00	60.175.907.942,03	77,79	83.647.710.760,45
Pendapatan Transfer	892.630.147.990,00	923.288.081.673,00	103,43	880.187.448.086,29
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.209.903.458,00	25.000.000,00	1,13	2.201.025.027,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.175.907.942,03 dan Rp83.647.710.760,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Asli Daerah	77.356.166.754,00	60.175.907.942,03	77,79	83.647.710.760,45
Pendapatan Pajak Daerah	25.543.000.000,00	18.347.176.559,04	71,83	11.593.759.007,25
Pendapatan Retribusi Daerah	3.908.604.800,00	2.766.598.933,00	70,78	2.545.019.804,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	27.049.142,65	0,00	14.158.036.468,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.904.561.954,00	39.035.083.307,34	81,49	55.350.895.481,20



5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah semua Anggaran dan Realisasinya berada pada Badan Pendapatan Daerah. Adapun sub rincian obyek pendapatan Pajak Daerah dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.347.176.559,04 dan Rp11.593.759.007,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Pajak Daerah	25.543.000.000,00	18.347.176.559,04	71,83	11.593.759.007,25
Pajak Hotel	252.000.000,00	66.106.128,00	26,23	67.892.261,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.600.000.000,00	2.171.728.973,00	83,53	2.794.350.885,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	40.000.000,00	13.756.000,00	34,39	10.125.000,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	500.000.000,00	309.616.095,00	61,92	380.567.400,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	6.916.555.370,00	98,81	6.248.037.090,00
Pajak Parkir	5.000.000,00	1.150.000,00	23,00	1.120.000,00
Pajak Air Tanah	500.000.000,00	199.940,00	0,04	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000.000,00	9.355.000,00	0,94	5.450.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	9.146.000.000,00	492.425.840,04	5,38	113.510.279,25
PBBP2	1.500.000.000,00	869.366.418,00	57,96	888.976.862,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	7.496.916.795,00	249,90	1.083.729.230,00

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Adapun Sub Rincian obyek Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.766.598.933,00 dan Rp2.545.019.804,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 21. Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Retribusi Daerah	3.908.604.800,00	2.766.598.933,00	70,78	2.545.019.804,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	425.200.000,00	436.143.000,00	102,57	469.819.200,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.000.000,00	1.920.000,00	9,60	0,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.200.000,00	16.400.000,00	65,08	17.910.000,00
Retribusi Pelataran	10.000.000,00	5.742.000,00	57,42	10.406.000,00
Retribusi Los	467.900.000,00	218.579.000,00	46,71	210.526.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	86.700.000,00	173,40	60.320.000,00
Retribusi Penyediaan Peta Foto	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	15.000.000,00	7.079.000,00	47,19	12.249.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	50.000.000,00	44.903.375,00	89,91	34.679.700,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	280.000.000,00	226.620.800,00	80,94	106.607.200,00
Retribusi Penyewaan Tanah	134.000.000,00	25.000.000,00	18,66	107.592.000,00
Retribusi Pemakaian Ruang	498.200.000,00	226.330.000,00	45,43	182.726.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	137.755.000,00	137,76	62.199.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	85.000.000,00	42.725.000,00	50,26	85.840.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan	1.069.512.800,00	753.433.308,00	70,45	783.680.240,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir	15.000.000,00	8.615.000,00	57,43	5.969.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	15.000.000,00	32.410.000,00	216,07	3.700.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000,00	42.825.000,00	171,30	10.610.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	150.736.000,00	92.099.000,00	61,10	122.651.280,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	300.000,00	0,50	24.840.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	33.856.000,00	30.046.000,00	88,75	2.852.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	140.000.000,00	72.900.000,00	52,07	105.835.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	65.000.000,00	88.964.000,00	136,87	47.584.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	19.000.000,00	5.000.000,00	26,32	5.500.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	164.109.450,00	109,41	70.924.184,00

Sedangkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah beserta Realisasi per SKPD disajikan sebagai berikut.



Tabel 22. Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	125.000.000,00	96.235.000,00	76,99	58.950.000,00
2	Dinas Kesehatan	425.200.000,00	436.143.000,00	102,57	469.819.200,00
3	BLUD-RSUD	24.450.000,00	29.850.000,00	122,09	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	301.864.450,00	120,75	62.199.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00	9.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	17.920.000,00	59,73	4.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	130.200.000,00	186.950.000,00	143,59	98.509.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	50.000.000,00	44.903.375,00	89,81	34.679.700,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	70.924.184,00
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	167.592.000,00	38.116.000,00	22,74	46.413.000,00
11	Dinas Perikanan dan Peternakan	120.000.000,00	68.764.000,00	57,30	70.090.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	258.250.000,00	132.225.000,00	51,20	209.025.000,00
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.542.112.800,00	1.074.295.308,00	69,66	1.083.279.520,00
14	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	130.500.000,00	43,50	76.506.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	15.000.000,00	2.500.000,00	16,67	750.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.500.000,00	6.300.000,00	28,00	4.500.000,00



No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
17	Badan Pendapatan Daerah	125.000.000,00	107.885.800,00	86,31	80.607.200,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	17.000.000,00
19	Kecamatan Dusun Tengah	165.000.000,00	5.800.000,00	3,52	115.092.000,00
20	Kecamatan Pematang Karau	18.000.000,00	8.250.000,00	45,83	4.300.000,00
21	Kecamatan Awang	14.500.000,00	5.000.000,00	34,48	2.200.000,00
22	Kecamatan Patangkep Tutui	20.000.000,00	2.380.000,00	11,90	3.520.000,00
23	Kecamatan Dusun Timur	20.000.000,00	15.992.000,00	79,96	15.406.000,00
24	Kecamatan Benua Lima	20.800.000,00	5.975.000,00	28,73	2.400.000,00
25	Kecamatan Paku	10.000.000,00	8.000.000,00	80,00	400.000,00
26	Kecamatan Paju Epat	13.000.000,00	5.200.000,00	40,00	1.550.000,00
27	Kecamatan Raren Batuah	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00	2.000.000,00
28	Kecamatan Karusen Janang	7.000.000,00	8.250.000,00	117,86	1.900.000,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	3.908.604.800,00	2.766.598.933,04	70,78	2.545.019.804,00

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.049.142,65 dan Rp14.158.036.468,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	27.049.142,65	0,00	14.158.036.468,00



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal	0,00	27.049.142,65	0,00	14.158.036.468,00

Realisasi senilai Rp27.049.142,65 diperoleh dari Deviden yang dibagikan oleh PT.Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah dengan dua kali penyaluran masing-masing Rp12.169.054,00 dan Rp14.880.088,65.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp39.035.083.307,34 dan Rp55.350.895.481,20, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Lain-Lain PAD yang Sah	47.904.561.954,00	39.035.083.307,34	81,49	55.350.895.481,20
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	152.913.200,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Hewan	105.000.000,00	12.000.000,00	11,43	22.633.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	15.282.224.750,00	8.042.463.919,97	52,63	4.470.819.617,44
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Penjabat Lain	4.542.768.150,00	1.234.285.424,32	27,17	1.895.220.699,10
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	900.000.000,00	447.996.583,90	49,78	175.517.473,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.988.408.850,00	3.034.757.480,10	152,62	1.394.597.149,07
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	472.608,00	235.257,00	49,78	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.723.596,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PBB-P2	7.000.000,00	61.858.004,00	883,69	66.597.829,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	181.272.309,05	181,27	220.560.688,59
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000.000,00	31.304.220,00	5,22	658.872.397,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Pendapatan BLUD	20.174.464.000,00	20.195.966.789,00	100,11	42.166.763.409,00
Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	2.000.000,00	1.576.840,00	78,84	111.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.200.000.000,00	5.638.453.280,00	134,25	4.278.701.819,00

Lain-lain PAD yang sah berdasarkan SKPD disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 25. Lain-Lain PAD yang Sah per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Kesehatan	4.200.000.000,00	5.638.651.457,00	134,25	4.278.710.806,00
2	BLUD-RSUD Tamiang Layang	20.664.161.810,00	20.920.571.325,57	101,24	43.015.016.939,00
3	Dinas Perikanan dan Peternakan	105.000.000,00	12.000.000,00	11,43	22.633.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.292.526.940,00	7.201.872.212,57	50,39	3.195.655.597,94
5	Badan Pendapatan Daerah	8.642.873.204,00	5.314.898.812,20	61,49	4.838.879.138,26
	Jumlah	47.904.561.954,00	39.087.993.807,34	81,60	55.350.895.481,20



5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp923.288.081.673,00 dan Rp880.187.448.086,29, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Pendapatan Transfer

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Transfer	892.630.147.990,00	923.288.081.673,00	103,43	880.187.448.086,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	766.597.902.000,00	784.533.230.628,00	102,34	752.445.141.065,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	75.534.561.000,00	77.935.147.800,00	103,18	78.780.783.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.497.684.990,00	60.819.703.245,00	120,44	48.961.524.021,29

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp784.533.230.628,00 dan Rp752.445.141.065,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Dana Perimbangan	766.597.902.000,00	784.533.230.628,00	102,34	752.445.141.065,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	169.021.129.000,00	191.068.698.189,00	113,04	194.252.890.381,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	453.323.100.000,00	457.131.088.950,00	100,84	436.257.086.999,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik	56.198.036.000,00	52.417.638.397,00	93,27	52.354.260.414,00
Dana Alokasi Khusus-Nonfisik	88.055.637.000,00	83.915.805.092,00	95,30	69.580.903.271,00

5.1.1.2.2. Dana Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp191.068.698.189,00 dan Rp194.252.890.381,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 28. Dana Bagi Hasil

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Dana Bagi Hasil (DBH)	169.021.129.000,00	191.068.698.189,00	113,04	194.252.890.381,00
DBH Pajak	20.413.445.000,00	20.413.445.000,00	100,00	34.808.546.742,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.484.969.000,00	12.239.885.000,00	98,04	27.234.089.662,00
DBH Pajak Penghasilan	7.928.476.000,00	8.173.560.000,00	103,09	7.574.457.080,00
DBH Sumber Daya Alam	148.607.684.000,00	170.655.253.189,00	114,84	159.444.343.639,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	305.663.000,00	305.663.000,00	100,00	204.030.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	144.238.734.000,00	157.463.772.066,00	109,17	152.550.278.639,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.776.538.000,00	11.599.069.123	417,75	4.731.724.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.286.749.000,00	100,00	1.958.311.000,00

5.1.1.2.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp457.131.088.950,00 dan Rp436.257.086.999,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Dana Alokasi Umum

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Dana Alokasi Umum (DAU)	453.323.100.000,00	457.131.088.950,00	100,84	436.257.086.999,00
DAU- Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	324.545.334.000,00	328.353.322.950,00	101,17	436.257.086.999,00
DAU- Formasi PPPK	806.664.000,00	806.664.000,00	100,00	0,00
DAU-Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
DAU-Bidang Pendidikan	41.918.154.000,00	41.918.154.000,00	100,00	0,00
DAU-Bidang Kesehatan	38.798.349.000,00	38.798.349.000,00	100,00	0,00



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
DAU-Bidang Pekerjaan Umum	46.654.599.000,00	46.654.599.000,00	100,00	0,00

5.1.1.2.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp52.417.638.397,00 dan Rp52.354.260.414,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Dana Alokasi Khusus - Fisik

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Dana Alokasi Khusus-Fisik	56.198.036.000,00	52.417.638.397,00	93,27	52.354.260.414,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- PAUD	568.650.000,00	566.155.800,00	99,56	926.967.700,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SD	3.930.997.000,00	3.771.120.800,00	95,93	10.110.810.557,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.721.698.000,00	1.567.335.512,00	91,03	7.785.205.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	000	199.684.400,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peng	718.520.000,00	699.300.000,00	97,33	2.320.303.133,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.007.314.000,00	3.484.328.388,00	86,95	4.840.749.992,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	1.228.054.611,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.155.829.000,00	2.749.510.446,00	87,12	173.533.594,00
DAK Fisik-Pertanian- Penugasan-Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate	3.936.918.000,00	3.892.400.450,00	98,87	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	33.597.105.000,00	31.300.309.389,00	93,16	14.030.710.013,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-	0,00	0,00	0,00	6.926.446.114,00



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting				
DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan- Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	3.811.794.800,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan-Ketahanan Pangan	4.561.005.000,00	4.387.177.612,00	96,19	0,00

5.1.1.2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp83.915.805.092,00 dan Rp69.580.903.271,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Dana Alokasi Khusus- Nonfisik	88.055.637.000,00	83.915.805.092,00	95,30	69.580.903.271,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	14.352.040.000,00	14.341.209.099,00	99,92	14.526.758.986,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	970.000.000,00	970.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.928.069.000,00	43.891.457.840,00	97,69	41.433.938.730,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.799.250.000,00	1.341.500.000,00	74,56	1.158.275.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	709.717.000,00	774.054.000,00	109,07	604.420.888,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.191.200.000,00	2.187.240.000,00	99,82	2.148.389.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	869.000.000,00	869.000.000,00	100,00	607.500.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	5.158.000.000,00	3.328.552.953,00	64,53	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas	11.954.282.000,00	11.954.282.000,00	100,00	5.930.112.347,00



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.377.915.000,00	2.942.066.800,00	87,10	2.175.524.520,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	387.395.000,00	92,16	329.299.000,00
DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal	500.800.000,00	439.047.400,00	87,67	356.135.800,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	310.549.000,00

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.935.147.800,00 dan Rp78.780.783.000,00 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	75.534.561.000,00	77.935.147.800,00	103,18	78.780.783.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	4.984.971.000,00
Dana Desa (DD)	75.534.561.000,00	77.935.147.800,00	103,18	73.795.812.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Desa sama dengan realisasi Bantuan Keuangan untuk sub rincian Belanja Bantuan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa. Terdapat 2 Desa yang tidak Salur Tahap 3 yaitu Desa Harara Kecamatan Dusun Timur sebesar Rp107.471.250,00 dan Desa Muara Palantau Kecamatan Pematang Karau sebesar Rp159.489.450,00. Realisasi melebihi Pagu Anggaran disebabkan ada Tambahan Dana Desa yang tidak dianggarkan namun ada realisasi untuk 21 Desa sebesar Rp2.932.482.000,00 berikut disajikan Realisasi Dana Desa beserta Tambahan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2023.

Tabel 33. Realisasi Dana Desa

No.	Desa	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Ampah II - 6213052010 KEC. Dusun Tengah	678.699.000,00	688.599.000,00
2	Ampari - 6213042006 KEC. Awang	654.598.000,00	636.949.000,00
3	Ampari Bura - 6213032005 KEC. Patangkep Tutui	785.588.000,00	722.336.000,00
4	Apar Batu - 6213042007 KEC. Awang	762.362.000,00	965.499.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Desa	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5	Bagok - 6213022004 KEC. Banua Lima	719.539.000,00	685.770.000,00
6	Balawa - 6213072007 KEC. Paju Epat	803.764.000,00	796.825.000,00
7	Bamban - 6213022005 KEC. Banua Lima	703.153.000,00	694.110.000,00
8	Bambulung - 6213062009 KEC. Pematang Karau	1.080.919.000,00	840.230.000,00
9	Bangkirayen - 6213042002 KEC. Awang	660.410.000,00	659.727.000,00
10	Bantai Napu - 6213092006 KEC. Paku	639.905.000,00	619.399.000,00
11	Banyu Landas - 6213022003 KEC. Banua Lima	636.701.000,00	639.443.000,00
12	Bararawa - 6213062008 KEC. Pematang Karau	754.181.000,00	692.566.000,00
13	Baruyan - 6213082005 KEC. Raren Batuah	679.900.000,00	689.329.000,00
14	Batuah - 6213082003 KEC. Raren Batuah	952.454.000,00	930.028.000,00
15	Bentot - 6213032004 KEC. Patangkep Tutui	1.049.138.000,00	785.953.000,00
16	Betang Nalong - 6213032008 KEC. Patangkep Tutui	610.611.000,00	620.670.000,00
17	Biwan - 6213042008 KEC. Awang	625.569.000,00	592.290.000,00
18	Danau - 6213042010 KEC. Awang	601.160.000,00	856.605.000,00
19	Dayu - 6213102001 KEC. Karusen Janang	788.496.000,00	795.154.000,00
20	Didi - 6213012009 KEC. Dusun Timur	680.190.000,00	675.126.000,00
21	Dorong - 6213012008 KEC. Dusun Timur	947.146.000,00	672.189.000,00
22	Gandrung - 6213092009 KEC. Paku	739.110.000,00	715.357.000,00
23	Gudang Seng - 6213022007 KEC. Banua Lima	601.632.000,00	599.501.000,00
24	Gumpa - 6213012022 KEC. Dusun Timur	714.316.000,00	717.901.000,00
25	Harara - 6213012024 KEC. Dusun Timur	501.885.000,00	703.781.000,00
26	Haringen - 6213012011 KEC. Dusun Timur	698.566.000,00	950.903.000,00
27	Hayaping - 6213042003 KEC. Awang	672.724.000,00	687.845.000,00
28	Ipu Mea - 6213102003 KEC. Karusen Janang	719.745.000,00	708.924.000,00
29	Jaar - 6213012006 KEC. Dusun Timur	775.841.000,00	770.191.000,00
30	Janah Jari - 6213042001 KEC. Awang	725.019.000,00	930.717.000,00
31	Janah Mansiwui - 6213042009 KEC. Awang	610.612.000,00	611.887.000,00
32	Jango - 6213032010 KEC. Patangkep Tutui	991.368.000,00	701.945.000,00
33	Jaweten - 6213012018 KEC. Dusun Timur	755.779.000,00	736.338.000,00
34	Juru Banu - 6213072001 KEC. Paju Epat	841.299.000,00	1.034.298.000,00
35	Kalamus - 6213092002 KEC. Paku	832.518.000,00	1.046.506.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Desa	Realisasi 2023	Realisasi 2022
36	Kali Napu - 6213072008 KEC. Paju Epat	660.723.000,00	692.817.000,00
37	Kambitin - 6213032002 KEC. Patangkep Tutui	595.880.000,00	582.003.000,00
38	Kandris - 6213022002 KEC. Banua Lima	762.506.000,00	729.395.000,00
39	Kandris - 6213102007 KEC. Karusen Janang	596.885.000,00	591.566.000,00
40	Karang Langit - 6213012010 KEC. Dusun Timur	674.823.000,00	672.025.000,00
41	Ketab - 6213062002 KEC. Pematang Karau	1.054.697.000,00	1.001.160.000,00
42	Kotam - 6213032006 KEC. Patangkep Tutui	799.028.000,00	776.106.000,00
43	Kupang Baru - 6213092011 KEC. Paku	929.849.000,00	648.131.000,00
44	Kupang Bersih - 6213062003 KEC. Pematang Karau	841.793.000,00	843.050.000,00
45	Lagan - 6213102004 KEC. Karusen Janang	679.153.000,00	644.298.000,00
46	Lalap - 6213032011 KEC. Patangkep Tutui	736.245.000,00	729.762.000,00
47	Lampeong - 6213062007 KEC. Pematang Karau	735.387.000,00	704.151.000,00
48	Lebo - 6213062010 KEC. Pematang Karau	755.251.000,00	732.467.000,00
49	Lenggang - 6213082002 KEC. Raren Batuah	671.084.000,00	680.196.000,00
50	Luau Jawuk - 6213092012 KEC. Paku	943.285.000,00	676.638.000,00
51	Magantis - 6213012005 KEC. Dusun Timur	755.411.000,00	825.590.000,00
52	Maipe - 6213072005 KEC. Paju Epat	637.516.000,00	610.864.000,00
53	Malintut - 6213082007 KEC. Raren Batuah	680.767.000,00	680.239.000,00
54	Mangkarap - 6213012021 KEC. Dusun Timur	719.674.000,00	731.756.000,00
55	Maragut - 6213012020 KEC. Dusun Timur	693.199.000,00	688.262.000,00
56	Matabu - 6213012007 KEC. Dusun Timur	740.340.000,00	742.880.000,00
57	Matarah - 6213012019 KEC. Dusun Timur	716.451.000,00	701.442.000,00
58	Mawani - 6213032009 KEC. Patangkep Tutui	655.508.000,00	647.377.000,00
59	Muara Awang - 6213052025 KEC. Dusun Tengah	817.832.000,00	837.229.000,00
60	Muara Palantau - 6213062001 KEC. Pematang Karau	745.957.800,00	1.244.121.000,00
61	Muru Duyung - 6213062011 KEC. Pematang Karau	631.796.000,00	871.725.000,00
62	Murutuwu - 6213072006 KEC. Paju Epat	989.862.000,00	720.774.000,00
63	Nagaleah - 6213062006 KEC. Pematang Karau	733.218.000,00	725.866.000,00
64	Netampin - 6213052018 KEC. Dusun Tengah	872.707.000,00	797.414.000,00
65	Paku Beto - 6213092008 KEC. Paku	640.160.000,00	645.295.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Desa	Realisasi 2023	Realisasi 2022
66	Pangkan - 6213092010 KEC. Paku	922.175.000,00	692.884.000,00
67	Patung - 6213092004 KEC. Paku	656.693.000,00	652.099.000,00
68	Piangu - 6213042011 KEC. Awang	688.250.000,00	663.711.000,00
69	Pinang Tunggal - 6213062005 KEC. Pematang Karau	939.702.000,00	665.572.000,00
70	Pulau Padang - 6213032001 KEC. Patangkep Tutui	849.572.000,00	596.157.000,00
71	Pulau Patai - 6213012003 KEC. Dusun Timur	803.301.000,00	798.469.000,00
72	Puri - 6213082001 KEC. Raren Batuah	650.019.000,00	652.020.000,00
73	Putai - 6213052012 KEC. Dusun Tengah	946.441.000,00	766.732.000,00
74	Putut Tawuluh - 6213102005 KEC. Karusen Janang	657.206.000,00	659.148.000,00
75	Ramania - 6213032003 KEC. Patangkep Tutui	686.205.000,00	686.378.000,00
76	Rodok - 6213052009 KEC. Dusun Tengah	749.690.000,00	995.036.000,00
77	Runggu Raya - 6213092005 KEC. Paku	992.501.000,00	937.316.000,00
78	Saing - 6213052008 KEC. Dusun Tengah	673.176.000,00	901.633.000,00
79	Sarapat - 6213012004 KEC. Dusun Timur	731.744.000,00	734.789.000,00
80	Sibung - 6213082009 KEC. Raren Batuah	707.223.000,00	691.310.000,00
81	Simpang Bingkuang - 6213092003 KEC. Paku	946.111.000,00	669.098.000,00
82	Simpang Naneng - 6213102006 KEC. Karusen Janang	897.408.000,00	625.270.000,00
83	Siong - 6213072009 KEC. Paju Epat	695.227.000,00	682.511.000,00
84	Sumber Garunggung - 6213052024 KEC. Dusun Tengah	747.639.000,00	970.850.000,00
85	Sumber Rejo - 6213062013 KEC. Pematang Karau	701.396.000,00	675.411.000,00
86	Sumur - 6213012023 KEC. Dusun Timur	671.464.000,00	664.070.000,00
87	Tampa - 6213092001 KEC. Paku	770.319.000,00	644.304.000,00
88	Tampu Langit - 6213072003 KEC. Paju Epat	733.392.000,00	735.379.000,00
89	Tangkan - 6213042004 KEC. Awang	714.439.000,00	928.111.000,00
90	Tangkum - 6213082008 KEC. Raren Batuah	697.850.000,00	675.876.000,00
91	Tarinsing - 6213092007 KEC. Paku	589.584.000,00	597.855.000,00
92	Telang - 6213072004 KEC. Paju Epat	1.096.345.000,00	784.412.000,00
93	Telang Baru - 6213072002 KEC. Paju Epat	746.905.000,00	737.222.000,00
94	Tewah Pupuh - 6213022006 KEC. Banua Lima	725.671.000,00	707.394.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Desa	Realisasi 2023	Realisasi 2022
95	Tumpang Ulung - 6213062012 KEC. Pematang Karau	679.825.000,00	676.598.000,00
96	Turan Amis - 6213082006 KEC. Raren Batuah	714.679.000,00	668.125.000,00
97	Tuyau - 6213062004 KEC. Pematang Karau	726.977.000,00	920.794.000,00
98	Unsum - 6213082004 KEC. Raren Batuah	654.287.000,00	652.096.000,00
99	Wungkur Nanakan - 6213042005 KEC. Awang	675.532.000,00	648.702.000,00
100	Wuran - 6213102002 KEC. Karusen Janang	701.833.000,00	688.990.000,00
	Jumlah Realisasi Dana Desa	75.002.665.800,00	73.795.812.000,00

Tambahan Dana Desa untuk 21 Desa di Tahun Anggaran 2023, sebagaimana berikut.

Tabel 34. Tambahan Realisasi Dana Desa

No.	Nama Desa dan Kecamatan	Realisasi Tambahan Dana Desa TA 2023
1	Desa Ampah II, Kec Dusun Tengah	139.642.000,00
2	Desa Bagok, Kec Banua Lima	139.642.000,00
3	Desa Bamban, Kec Banua Lima	139.642.000,00
4	Desa Hayaping, Kec Awang	139.642.000,00
5	Desa Ipu Mea, Kec Karusen Janang	139.642.000,00
6	Desa Janah Jari, Kec Awang	139.642.000,00
7	Desa Kalamus, Kec Paku	139.642.000,00
8	Desa Kambitin, Kec Patangkep Tutui	139.642.000,00
9	Desa Lalap, Kec Patangkep Tutui	139.642.000,00
10	Desa Lampeong, Kec Pematang Karau	139.642.000,00
11	Desa Lenggang, Kec Raren Batuah	139.642.000,00
12	Desa Luau Jawuk, Kec Paku	139.642.000,00
13	Desa Malintut, Kec Raren Batuah	139.642.000,00
14	Desa Nagaleah, Kec Pematang Karau	139.642.000,00
15	Desa Pangkan, Kec Paku	139.642.000,00
16	Desa Patung, Kec Paku	139.642.000,00
17	Desa Sibung, Kec Raren Batuah	139.642.000,00
18	Desa Simpang Bingkuang, Kec Paku	139.642.000,00
19	Desa Tangkan, Kec Awang	139.642.000,00



No.	Nama Desa dan Kecamatan	Realisasi Tambahan Dana Desa TA 2023
20	Desa Tewah Pupuh, Kec Banua Lima	139.642.000,00
21	Desa Wungkur Nanakan, Kec Awang	139.642.000,00
	Jumlah Tambahan Dana Desa Tahun 2023	2.932.482.000,00

5.1.1.2.4. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.819.703.245,00 dan Rp48.961.524.021,29, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.497.684.990,00	60.819.703.245,00	120,44	48.961.524.021,29
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	50.497.684.990,00	60.819.703.245,00	120,44	48.961.524.021,29

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak dianggarkan per Sub Rincian, namun di Anggarkan pada Bantuan Keuangan. Hal tersebut disebabkan dalam SIPD tidak menyediakan Sub Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp2.201.025.027,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 36. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.209.903.458,00	25.000.000,00	1,13	2.201.025.027,00
Pendapatan Hibah	2.209.903.458,00	25.000.000,00	1,13	2.201.025.027,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	2.091.025.027,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.209.903.458,00	25.000.000,00	1,13	0,00

Realisasi sebesar Rp25.000.000,00 diperoleh dari PT. Bukit Makmur Mandiri Utama ke SDN 1 Tamiang Layang untuk paving halaman sekolah.

5.1.2. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.059.721.629.160,41 dan Rp893.668.713.769,09, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Belanja Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Daerah	1.202.208.265.241,00	1.059.721.629.160,41	88,15	893.668.713.769,09
Belanja Operasi	793.117.097.656,00	695.482.303.674,04	87,69	633.502.030.342,09
Belanja Modal	229.313.802.685,00	201.360.547.759,37	87,81	103.449.098.767,00
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.533.187.200,00	25,33	9.540.962.083,00
Belanja Transfer	169.777.364.900,00	160.345.590.527,00	94,44	147.176.622.577,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp695.482.303.674,04 dan Rp633.502.030.342,09, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Belanja Operasi

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Operasi	793.117.097.656,00	695.482.303.674,04	87,69	633.502.030.342,09
Belanja Pegawai	405.736.333.308,00	351.104.087.669,76	86,54	347.439.505.593,09
Belanja Barang dan Jasa	324.145.224.309,00	290.601.816.469,18	89,65	228.529.659.212,00



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Belanja Hibah	57.917.790.039,00	50.754.619.535,10	87,63	47.657.860.937,00
Belanja Bantuan Sosial	4.717.750.000,00	2.421.780.000,00	51,33	9.275.004.600,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp351.104.087.669,76 dan Rp347.439.505.593,09, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39. Belanja Pegawai

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pegawai	405.736.333.308,00	351.104.087.669,76	86,54	347.439.505.593,09
Belanja Gaji Pokok PNS	184.259.623.938,00	170.914.146.909,27	92,76	174.412.641.101,47
Belanja Gaji Pokok PPPK	13.592.828.512,00	11.404.815.800,00	83,90	10.373.068.143,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.764.323.681,00	15.263.534.686,49	85,92	15.652.291.281,12
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.462.699.946,00	948.637.482,00	38,52	843.727.584,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.835.169.024,00	5.636.929.900,00	71,94	5.473.344.649,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.539.783.960,00	11.375.022.000,00	84,01	11.208.460.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	123.060.000,00	50.610.000,00	41,13	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.347.195.488,00	1.916.345.000,00	57,25	2.347.750.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.368.880.226,00	671.860.000,00	49,08	657.030.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	12.391.792.174,00	9.443.422.480,00	76,21	9.830.870.151,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.921.696.826,00	746.939.880,00	38,87	670.319.520,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.132.028.198,00	915.897.554,00	42,96	591.531.724,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.018.875,00	2.415.846,00	7,55	2.474.158,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	591.500,00	177.354,00	29,98	158.776,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14.237.296.511,00	13.583.181.346,00	95,41	8.750.926.996,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.289.149.269,00	513.083.084,00	15,60	400.593.132,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	826.381.449,00	349.951.645,00	42,35	358.952.671,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	30.000.000,00	23.461.044,00	78,20	8.446.236,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.563.743.403,00	1.049.854.949,00	67,14	1.076.858.020,00
Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	150.000.000,00	70.383.132,00	46,92	25.338.708,00
Belanja Tunjangan Khusus	112.000.000,00	66.600.000,00	59,46	131.244.077,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	49.899.890.274,00	38.452.965.220,00	77,06	42.482.751.226,50
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.919.709.160,00	0,00	0,00	144.905.783,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	654.289.328,00	154.289.316,00	23,58	154.289.316,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	44.928.069.000,00	42.641.865.900,00	94,91	43.896.866.408,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	709.717.000,00	681.082.300,00	95,97	672.868.160,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.799.250.000,00	1.339.575.000,00	74,45	1.167.500.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.550.410.000,00	7.145.120.000,00	94,63	6.562.002.666,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	712.040.000,00	581.100.000,00	81,61	425.996.666,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	37.440.000,00	34.740.000,00	92,79	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	499.920.000,00	466.170.000,00	93,25	543.500.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	553.665.000,00	98,60	561.540.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00	65.543.100,00	83,37	65.795.100,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	74.524.640,00	73,50	66.760.320,00
Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	47.344.500,00	84,31	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	802.814.250,00	98,60	814.233.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	173.717.250,00	88.274.550,00	50,82	74.815.650,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	207.821.250,00	0,00	0,00	15.072.750,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.097.500.000,00	98,33	1.890.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	777.000.000,00	98,67	453.600.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.382.700,00	794.786,00	2,80	781.036,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	59.656.485,00	46.512.774,00	77,97	44.040.528,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.112.000.000,00	2.000.000.000,00	94,70	1.033.200.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.512.000.000,00	3.885.000.000,00	86,10	2.904.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.740.000,00	6.300.000,00	15,46	0,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.999.128,00	42.900.000,00	76,61	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.218.000,00	5.610.000,00	54,90	7.140.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	78,57	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	5.576.340,00	78,57	6.083.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.249.693,00	1.139.492,00	50,65	1.151.456,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.300,00	1.560,00	47,27	1.920,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000,00	160.440.000,00	70,74	88.704.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	375.220.850,00	93,81	300.617.400,00
Belanja Pegawai BOS	1.421.870.000,00	2.444.528.000,00	171,92	0,00

Realisasi Belanja Pegawai per SKPD, sebagai berikut.

Tabel 40. Belanja Pegawai per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	190.192.872.112,0	167.392.887.344,18	88,01	169.543.621.286,00
2	Dinas Kesehatan	50.254.592.133,00	48.540.991.653,67	96,59	47.083.658.996,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	5.906.325.639,00	5.055.916.061,00	85,60	5.456.514.071,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
	dan Kawasan Permukiman				
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.232.000.972,00	3.110.689.541,20	96,25	3.128.964.232,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	3.336.903.340,00	3.312.708.265,00	99,27	3.270.640.260,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	3.113.172.854,00	2.756.105.874,00	88,53	2.941.650.797,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.157.159.147,00	2.856.400.849,00	90,47	2.744.949.407,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.155.475.254,00	3.118.067.339,00	98,81	3.342.763.487,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.473.204.680,00	2.166.408.443,00	87,60	2.236.679.683,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	2.593.183.531,00	2.428.390.737,00	93,65	2.444.213.419,00
11	Dinas Perhubungan	3.604.995.516,00	3.275.183.417,00	90,85	3.144.917.166,43
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2.264.037.398,00	1.790.850.177,00	79,10	1.993.147.368,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.903.622.344,00	1.800.245.822,00	94,57	1.790.413.494,50
14	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.093.072.233,00	2.928.199.077,00	94,67	2.792.235.131,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.635.386.208,00	2.217.878.666,00	84,16	2.445.983.378,00
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	4.506.010.854,00	4.047.567.118,00	89,83	4.038.975.356,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.815.416.091,00	10.858.177.240,00	84,73	12.681.732.929,00
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.014.469.186,00	3.916.473.648,00	97,56	3.793.262.508,50



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
19	Sekretariat Daerah	11.982.582624,00	11.268.196.150,71	94,04	11.259.903.559,00
20	Inspektorat	3.799.727.354,00	3.517.676.843,00	92,58	3.227.235.456,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.500.538.275,00	3.112.393.721,00	88,91	3.110.424.568,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.253.999.104,00	23.383.244.217,00	55,34	20.005.500.624,00
23	Badan Pendapatan Daerah	2.214.491.126,00	1.977.674.677,00	89,31	1.992.539.452,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.239.700.238,00	2.143.731.125,00	95,72	2.127.028.102,00
25	Sekretariat DPRD	15.727.961.937,00	14.040.392.638,00	89,27	10.543.286.107,00
26	Kecamatan Dusun Tengah	2.765.385.531,00	2.645.134.737,00	95,65	2.630.216.640,00
27	Kecamatan Pematang Karau	1.932.258.126,00	1.735.525.325,43	89,82	1.948.422.550,66
28	Kecamatan Awang	2.038.197.974,00	1.807.815.005,00	88,70	1.866.444.502,00
29	Kecamatan Patangkep Tutui	1.744.928.746,00	1.432.222.766,00	82,08	1.474.013.545,00
30	Kecamatan Dusun Timur	2.491.446.223,00	2.226.570.510,57	89,37	2.374.241.707,00
31	Kecamatan Benua Lima	1.989.489.191,00	1.962.234.987,00	98,63	1.866.466.150,00
32	Kecamatan Paku	1.741.871.700,00	1.513.006.910,00	86,86	1.601.736.882,00
33	Kecamatan Paju Epat	1.355.845.451,00	1.265.874.712,00	93,36	1.253.571.515,00
34	Kecamatan Raren Batuah	1.701.501.432,00	1.615.119.614,00	94,92	1.502.207.373,00
35	Kecamatan Karusen Janang	1.577.933.730,00	1.533.749.367,00	97,20	1.470.007.590,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.426.575.054,00	2.350.383.092,00	96,86	2.311.936.301,00
	Jumlah Belanja Pegawai	405.736.333.308,00	351.104.087.669,76	86,54	347.439.505.593,09

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 290.601.816.469,18 dan Rp228.529.659.212,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 41. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Barang dan Jasa	324.145.224.309,00	290.601.816.469,18	89,65	228.529.659.212,00
Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	856.559.523,00	845.921.123,00	98,76	513.632.790,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	397.602.700,00	385.434.350,00	96,94	571.255.400,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.080.272.468,00	2.682.111.342,00	65,73	1.611.248.117,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	955.653.750,00	955.472.262,00	99,98	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	29.410.000,00	27.575.000,00	93,76	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	156.435.000,00	134.794.000,00	86,17	107.205.500,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	573.900.000,00	566.409.500,00	98,69	14.630.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.122.824.300,00	1.086.732.435,00	96,79	606.574.852,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	607.213.760,00	508.605.349,00	83,76	420.410.445,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	35.550.900,00	35.527.500,00	99,93	22.146.740,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	99.690.000,00	86.498.000,00	86,77	167.628.901,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.901.336.427,00	3.782.720.071,00	96,96	2.618.203.099,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	25.999.600,00	24.571.500,00	94,51	39.591.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.473.689.942,00	5.823.265.424,00	89,95	3.877.360.214,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	667.802.468,00	647.979.500,00	97,03	453.423.745,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	88.931.859,00	85.695.714,00	96,36	91.052.349,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabotan Kantor	399.078.000,00	371.613.680,00	93,12	176.723.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.401.654.970,00	2.313.743.015,00	96,34	391.907.383,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	476.296.080,00	403.462.850,00	84,71	77.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	550.975.000,00	522.650.000,00	94,86	303.936.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	866.996.950,00	828.879.600,00	95,60	622.867.718,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	2.476.588.870,00	2.212.813.665,00	89,35	32.000.300,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.989.013.956,00	2.333.903.174,00	117,34	2.452.450.607,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.144.345.244,00	16.644.600.923,00	97,09	7.305.940.128,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.250.000,00	11.011.400,00	97,88	102.581.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	214.775.000,00	214.313.250,00	99,79	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.176.677.900,00	7.412.633.200,00	90,66	4.530.664.760,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.314.661.930,00	3.261.498.703,00	98,40	1.915.189.853,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	577.617.100,00	524.675.000,00	90,83	167.236.500,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	50.944.000,00	50.944.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.575.130.000,00	1.440.390.000,00	91,45	516.285.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	54.390.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	125.000.000,00	124.597.500,00	99,68	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.701.230.600,00	1.580.356.967,00	92,89	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	281.502.250,00	275.133.319,00	97,74	32.184.478,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	96.737.500,00	95.418.068,00	98,64	0,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.780.000,00	21.758.200,00	99,90	0,00
Belanja Pakaian Penyelamat	5.701.760,00	5.632.500,00	98,79	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	45.437.500,00	44.380.450,00	97,67	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	86.080.500,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	781.462.100,00	764.531.111,00	97,83	16.050.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	277.217.500,00	267.444.680,00	96,47	29.404.500,00
Belanja Pakaian Paskibraka	107.063.275,00	105.858.229,00	98,87	76.612.866,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	43.500.000,00	43.476.500,00	99,95	0,00
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	142.350.000,00	142.350.000,00	100,00	0,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.695.000,00	1.695.000,00	100,00	400.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	32.160.000,00	32.160.000,00	100,00	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.123.096.000,00	2.492.592.000,00	79,81	1.071.189.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.229.723.500,00	7.225.710.000,00	87,80	6.241.248.700,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	498.600.000,00	459.000.000,00	92,06	45.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	50.000.000,00
Honorarium Rohaniwan	34.400.000,00	17.050.000,00	49,56	12.250.000,00
Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	208.788.000,00	154.200.000,00	73,85	122.500.000,00
Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	40.300.000,00	16.000.000,00	39,70	28.600.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	26.125.000,00	23.375.000,00	89,47	7.575.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	348.000.000,00	281.400.000,00	80,86	287.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.402.550.000,00	7.642.200.000,00	90,95	11.156.550.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.442.471.349,00	7.794.803.106,16	120,99	22.787.188.776,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	45.000.000,00	17.245.000,00	38,32	84.386.500,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	59.242.000,00	58.986.400,00	99,57	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamat	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	29.300.000,00	29.300.000,00	100,00	37.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	280.400.000,00	259.454.000,00	92,53	215.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.736.650.000,00	18.656.221.000,00	89,97	13.996.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.200.250.000,00	1.020.300.000,00	85,01	1.004.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.778.615.000,00	3.731.639.000,00	98,76	3.644.860.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.154.350.000,00	964.530.800,00	83,56	664.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.157.800.000,00	3.747.016.800,00	90,12	3.472.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	936.484.000,00	812.557.000,00	86,77	783.428.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	378.900.000,00	257.800.000,00	68,04	343.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	76.650.000,00	76.650.000,00	100,00	104.997.315,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	46.000.000,00	45.500.000,00	98,91	0,00
Belanja Jasa Tata Rias	34.400.000,00	34.400.000,00	100,00	2.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.061.400.000,00	1.044.044.000,00	98,36	390.000.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	633.476.500,00	506.647.046,00	79,98	156.619.217,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	29.300.000,00	23.978.728,00	81,84	16.655.700,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	362.500.000,00	329.704.750,00	90,95	209.336.250,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	55.400.000,00	73,87	37.728.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	1.542.300.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1.626.800.000,00	1.584.010.500,00	97,37	27.400.000,00
Belanja Tagihan Telepon	403.850.000,00	202.213.865,00	50,07	182.687.504,00
Belanja Tagihan Air	501.344.600,00	241.094.662,00	48,09	172.391.160,00
Belanja Tagihan Listrik	4.368.545.047,00	3.521.583.028,00	80,61	3.150.150.019,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.315.816.494,00	1.219.788.200,00	92,70	2.716.036.840,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	2.022.647.510,00	1.137.175.131,00	56,22	1.418.001.114,00
Belanja Paket/Pengiriman	23.410.000,00	11.682.000,00	49,90	8.365.000,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00	44.000.000,00	88,00	40.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	934.140.000,00	664.277.677,00	71,11	237.494.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Lembur	4.486.852.000,00	4.019.235.395,00	89,58	2.948.117.560,00
Belanja Medical Check Up	0,00	0,00	0,00	122.033.100,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	150.000.000,00	110.000.000,00	73,33	0,00
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.372.391.000,00	11.867.988.907,00	88,75	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.500.000.000,00	149.850.000,00	9,99	101.800.800,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Grader	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	224.000.000,00	224.000.000,00	100,00	83.800.000,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	95.300.000,00	93.700.000,00	98,32	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	154.200.000,00	133.450.000,00	86,54	78.200.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	140.875.000,00	74.327.000,00	52,76	79.276.602,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor lainnya	264.000.000,00	264.000.000,00	100,00	95.700.000,00
Belanja Sewa Alat Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	57.500.000,00	95,83	110.708.200,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	153.500.000,00	152.000.000,00	99,02	137.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	18.600.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	4.000.000,00	3.706.680,00	92,67	3.112.959,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	115.800.000,00	102.750.000,00	88,73	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	7.753.564,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	23.000.000,00	17.000.000,00	73,91	31.250.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	218.465.000,00	147.550.000,00	67,54	83.100.000,00
Belanja Sewa Taman	6.050.000,00	6.050.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.250.000,00	46.250.000,00	100,00	83.750.000,00
Belanja Sewa Hotel	130.700.000,00	110.250.000,00	84,35	81.841.000,00
Belanja Sewa Musik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	2.500.000,00
Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.275.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.005.939.469,00	1.703.223.570,00	84,91	1.013.272.512,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	674.022.188,00	610.441.540,00	90,57	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	191.675.000,00	91.328.606,00	47,65	711.947.096,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	977.704.300,00	955.096.580,00	97,69	708.055.630,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.411.127.062,00	1.035.105.572,00	73,35	3.246.768.944,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa Lainnya	60.317.788,00	57.312.400,00	95,02	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	156.231.672,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	573.901.110,00	570.633.050,00	99,43	5.997.250,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	765.459.600,00	753.007.582,00	98,37	352.309.732,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4.360.990.133,00	4.035.943.770,00	92,55	2.077.402.618,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	468.704.200,00	464.499.230,00	99,10	533.895.345,00
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	0,00	0,00	0,00	83.706.200,00
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	4.000.000,00	2.710.000,00	67,75	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	49.500.000,00	45.330.500,00	91,58	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	50.000.000,00	48.600.000,00	97,20	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-	766.500.000,00	748.469.010,00	97,65	422.626.596,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				
Belanja Jasa Konsultasi BerorientasiBidang-Transportasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	2.040.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00	357.600.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	709.133.500,00	707.133.500,00	99,72	746.920.000,00
Belanja Sosialisasi	201.368.000,00	201.368.000,00	100,00	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	2.735.167.000,00	2.314.455.533,00	84,62	605.014.024,00
Belanja Sewa Aset Tidak berwujud	9.810.000,00	9.808.750,00	99,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	341.918.752,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	199.999.996,00	199.700.000,00	99,85	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	98.995.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	121.800.000,00	69.676.600,00	57,21	120.612.855,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.642.968.301,00	1.410.880.943,00	85,87	5.850.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	844.480.882,00	802.181.266,00	94,99	1.751.107.875,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan Barang	275.232.500,00	230.212.118,00	83,64	168.046.815,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	36.000.000,00	21.374.200,00	59,37	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1.500.000,00	1.484.000,00	98,93	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur Bengkel tak bermesin-Peralatan Tukang Kayu	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.997.543,00	99,99	12.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	107.550.000,00	74.600.000,00	69,36	369.780.107,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	580.670.000,00	536.381.152,00	92,37	1.233.382,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	481.900.000,00	463.649.192,00	96,21	362.453.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	140.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	23.465.000,00	23.001.663,00	98,03	132.158.557,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.230.000,00	33.995.000,00	91,31	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.600.000,00	14.599.900,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	31.144.205,00	25.883.000,00	83,11	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	63.200.000,00	30.117.000,00	47,65	0,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	875.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.478.500,00	11.898.000,00	76,87	13.574.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.306.620.148,00	7.161.109.681,00	98,01	2.818.657.004,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	164.031.410,00	163.168.250,00	99,47	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	0,00	0,00	0,00	818.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Gedung Tempat Pertemuan				
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.783.181.000,00	1.757.124.500,00	98,54	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	68.303.368,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.210.947,00	2.210.947,00	100,00	330.010.327,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bonglow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	98.877.400,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	75.000.000,00	74.997.150,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	250.523.840,00	250.200.000,00	99,87	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.000.000,00	49.965.250,00	99,93	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	19.381.202.061,00	19.379.886.600,00	99,99	9.698.091.350,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.850.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	750.000.000,00	748.980.000,00	99,86	949.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	700.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai	518.000.297,00	517.150.000,00	99,84	1.214.909.392,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	16.733.057,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	1.251.562.250,00	1.201.388.900,00	95,99	962.000.035,00
Belanja Pemeliharaan Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Ol ahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	99.850.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	16.500.000,00	7.500.000,00	98,06	23.290.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.000.000,00	108.844.500,02	89,25	24.035.254.506,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	46.027.280.024,00	41.080.594.966,00	0,00	675.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	88,29	11.751.733.880,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.300.346.508,00	16.157.163.613,00	88,06	63.994.000,00
Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	155.108.000,00	136.593.000,00	89,53	0,00
Belanja Beasiswa	268.970.000,00	240.809.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.548.203.000,00	2.548.203.000,00	82,97	58.828.513,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	477.745.144,00	396.386.000,00	79,84	267.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	236.700.000,00	188.970.000,00	92,65	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.932.913.670,00	10.129.062.936,00	77,21	46.684.226.143,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD, sebagai berikut.

Tabel 42. Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	34.114.305.090,00	31.865.229.469,00	93,41	15.366.341.581,00
2	Dinas Kesehatan	42.705.481.911,00	40.366.729.713,16	94,52	29.413.572.008,00
3	BLUD-RSUD	32.518.674.094,00	25.107.533.677,00	77,21	46.684.226.143,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.247.116.472,00	37.149.040.419,00	94,65	28.322.156.050,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.827.693.260,00	2.775.571.512,00	98,16	2.981.938.449,00
6	Badan Penanggulangan	3.289.732.683,00	2.910.462.385,00	88,47	2.671.925.940,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
	Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran				
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1.670.785.206,00	1.546.428.590,00	92,56	1.248.774.766,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.684.315.919,00	5.092.877.338,00	89,60	4.273.531.704,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.777.317.359,00	6.429.178.792,00	94,86	5.332.709.317,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.113.127.792,00	1.985.369.910,00	93,95	1.576.565.257,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	2.516.967.452,00	2.298.161.835,00	91,31	1.662.608.073,00
12	Dinas Perhubungan	1.965.264.131,00	1.722.606.690,00	88,06	1.016.011.714,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	3.026.101.007,00	2.936.280.588,00	97,03	2.522.476.512,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.340.819.366,00	1.287.487.957,00	96,02	1.369.540.611,00
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.183.328.231,00	2.954.631.151,02	92,82	2.820.165.149,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.401.723.131,00	1.397.533.313,00	99,70	702.354.761,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	6.020.762.439,00	5.613.564.760,00	93,24	3.759.923.128,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.735.378.913,00	21.846.546.547,00	96,09	10.926.500.598,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.079.052.577,00	3.952.909.562,00	96,91	2.796.025.501,00
20	Sekretariat Daerah	38.293.434.894,00	29.636.984.421,00	77,39	19.070.541.648,00
21	Inspektorat	4.393.507.325,00	4.308.103.403,00	98,06	2.211.137.578,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.051.052.541,00	2.977.025.411,00	97,57	2.521.379.300,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.944.711.185,00	8.774.922.254,00	67,79	5.640.804.363,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.677.478.795,00	1.655.457.832,00	98,69	1.489.432.426,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.940.758.758,00	5.450.437.996,00	91,75	4.791.692.836,00
26	Sekretariat DPRD	29.117.057.224,00	27.618.131.845,00	94,85	20.326.125.883,00
27	Kecamatan Dusun Tengah	1.144.409.650,00	1.087.110.184,00	94,99	848.698.088,00
28	Kecamatan Pematang Karau	833.465.691,00	805.995.650,00	96,70	623.347.557,00
29	Kecamatan Awang	755.361.085,00	680.378.542,00	90,07	373.232.500,00
30	Kecamatan Patangkep Tutui	737.492.191,00	705.133.307,00	95,61	442.046.340,00
31	Kecamatan Dusun Timur	1.414.923.626,00	1.343.803.909,00	94,97	828.822.352,00
32	Kecamatan Benua Lima	1.177.326.001,00	1.064.174.061,00	90,39	752.904.677,00
33	Kecamatan Paku	954.321.587,00	948.184.864,00	99,36	540.638.506,00
34	Kecamatan Paju Epat	794.442.943,00	792.615.900,00	99,77	540.132.103,00
35	Kecamatan Raren Batuah	674.459.231,00	663.232.500,00	98,34	421.231.670,00
36	Kecamatan Karusen Janang	879.405.575,00	857.816.945,00	97,55	343.480.190,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.152.668.974,00	1.994.163.237,00	92,64	1.316.663.933,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	324.145.224.309,00	290.601.816.469,18	89,65	228.529.659.212,00

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 dan Rp600.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Belanja Subsidi

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00



Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atas selisih tarif air minum. Belanja Subsidi ini dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.754.619.535,10 dan Rp47.657.860.937,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 44. Belanja Hibah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Hibah	57.917.790.039,00	50.754.619.535,10	87,63	47.657.860.937,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.560.000.000,00	10.560.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.909.990.515,00	2.686.562.000,00	92,32	3.710.743.610,00
Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	283.000.000,00	281.802.260,00	99,58	0,00
Belanja Hibah Barang kepada BUMN	2.330.000.000,00	0,00	0,00	111.759.842,00
Belanja Hibah Barang kepada BUMD	3.799.751.462,00	3.745.075.055,10	98,56	7.077.546.113,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	110.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	141.994.500,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki	20.736.962.400,00	19.478.412.400,00	93,93	7.348.172.975,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Surat Keterangan Terdaftar				
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.938,00	399.100.000,00	99,77	830.593.600,00
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.883.200.000,00	2.969.019.000,00	102,98	2.854.272.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.983.700.000,00	4.684.500.000,00	58,68	750.030.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.748.089.880,00	4.705.091.280,00	99,09	9.267.013.271,00
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	65.689.844,00	47.652.540,00	72,54	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Negeri	0,00	0,00	0,00	14.563.010.026,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	279.680.000,00	279.680.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	892.725.000,00	892.725.000,00	100,00	892.725.000,00



Realisasi Belanja Hibah per SKPD, sebagaimana berikut.

Tabel 45. Belanja Hibah per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	3.290.380.000,00	3.337.780.000,00	101,44	17.427.282.026,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.691.522.639,00	9.062.074.735,10	77,51	18.265.868.735,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	37.624.000,00
4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2.006.962.400,00	1.506.962.400,00	75,09	285.000.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.295.000.000,00	3.253.077.400,00	98,73	2.936.482.201,00
6	Sekretariat Daerah	22.024.400.000,00	20.977.200.000,00	95,25	7.260.548.975,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.500.000.000,00	508.000.000,00	14,51	147.330.000,00
9	Kantor Kecamatan Dusun Tengah	387.600.000,00	387.600.000,00	100,00	290.700.000,00
10	Kantor Kecamatan Dusun Timur	157.200.000,00	157.200.000,00	100,00	0,00
11	Kantor Kecamatan Benua Lima	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.452.725.000,00	11.452.725.000,00	100,00	892.725.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	57.917.790.039,00	50.754.619.535,10	87,63	47.657.860.937,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang penganggarnya ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Tabel 46. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

No.	Nama Partai Politik Penerima	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Partai Nasional Demokrat	96.885.000,00	96.885.000,00
2	Partai Demokrat	130.365.000,00	130.365.000,00
3	Partai Persatuan Pembangunan	76.890.000,00	76.890.000,00
4	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	135.195.000,00	135.195.000,00
5	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan	101.130.000,00	101.130.000,00
6	Partai Golongan Karya	166.455.000,00	166.455.000,00
7	Partai Gerindra	66.000.000,00	66.000.000,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	38.280.000,00	38.280.000,00
9	Partai Persatuan Indonesia	81.525.000,00	81.525.000,00
	Jumlah	892.725.000,00	892.725.000,00

Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat yang penganggarnya ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan peruntukannya untuk tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dengan komposisi.

Tabel 47. Belanja Hibah Pemilihan Umum

No.	Nama Institusi	Nilai
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (KPU)	7.800.000.000,00
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Bawaslu)	2.760.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	10.560.000.000,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.421.780.000,00 dan Rp9.275.004.600,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Bantuan Sosial	4.717.750.000,00	2.421.780.000,00	51,33	9.275.004.600,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.716.000.000,00	1.497.300.000,00	87,26	88.100.000,00



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	120.000.000,00	88.400.000,00	73,67	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	824.000.000,00	356.200.000,00	43,23	1.533.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	42.750.000,00	41.880.000,00	97,96	126.932.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.015.000.000,00	438.000.000,00	21,74	7.526.972.600,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per SKPD, sebagaimana berikut.

Tabel 49. Belanja Bantuan Sosial per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	56.250.000,00	55.380.000,00	98,45	133.432.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial	157.500.000,00	124.700.000,00	79,17	19.200.000,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	7.520.472.600,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.000.000.000,00	1.739.500.000,00	43,49	1.097.900.000,00
5	Kecamatan Dusun Tengah	216.000.000,00	214.200.000,00	99,17	216.000.000,00
6	Kecamatan Dusun Timur	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00
7	Kecamatan Benua Lima	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	108.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	4.717.750.000,00	2.421.780.000,00	51,33	9.275.004.600,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp201.360.547.759,37 dan Rp103.449.098.767,00, dengan rincian Belanja Modal sebagai berikut.



Tabel 50. Belanja Modal

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
BELANJA MODAL	229.313.802.685,00	201.360.547.759,37	87,81	103.449.098.767,00
Belanja Modal Tanah	3.995.000.468,00	0,00	0,00	1.098.858.088,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.035.833.434,00	21.045.840.294,00	91,36	16.700.733.622,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.575.128.268,00	41.140.779.038,98	92,30	29.782.859.321,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	156.653.430.865,00	138.082.480.220,39	88,15	55.462.710.136,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.054.409.650,00	1.091.448.206,00	103,51	207.889.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	196.048.200,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal - Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.098.858.088,00. Belanja Modal Tanah tersebut dianggarkan pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.450.500.468,00 dan pada BLUD-RSUD senilai Rp2.544.500.000,00 namun tidak ada realisasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51. Belanja Modal Tanah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Tanah	3.995.000.468,00	0,00	0,00	1.098.858.088,00
Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Kerja	3.995.000.468,00	0,00	0,00	1.098.858.088,00

Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD, disajikan sebagai berikut.

Tabel 52. Belanja Modal tanah per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	BLUD-RSUD	2.544.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	1.450.500.468,00	0,00	0,00	1.098.858.088,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah	3.995.000.468,00	0,00	0,00	1.098.858.088,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.045.840.294,00 dan Rp16.700.733.622,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 53. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.035.833.434,00	21.045.840.294,00	91,36	16.700.733.622,00
Belanja Modal Mesin Proses	6.936.000,00	6.260.000,00	90,25	0,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0	0	0,00	812.000.000,00
Belanja Modal Compressor	0	0	0,00	11.385.000,00
Belanja Modal Pompa	19.000.000,00	18.894.200,00	99,44	4.500.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	35.520.000,00	35.344.900,00	99,51	67.004.100,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Perorangan	308.218.000,00	301.200.000,00	97,72	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0,00	1.615.540.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	93.087.000,00	72.600.000,00	77,99	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	175.000.000,00	172.686.250,00	98,68	35.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0	0	0,00	1.723.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	850.000.000,00	843.700.500,00	99,26	821.561.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0	0	0,00	63.225.600,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0	0	0,00	17.178.920,00
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0	0	0,00	29.000.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	130.450.000,00	16.000.000,00	12,27	282.000.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	204.476.500,00	202.709.380,00	99,14	6.999.000,00
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	32.465.000,00	32.357.000,00	99,67	0,00
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.430.000,00	7.427.500,00	99,97	0,00
Belanja Modal Alat Processing	0	0	0,00	39.516.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	139.633.106,00	138.829.470,00	99,42	35.126.760,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.563.261.220,00	2.134.985.250,00	83,29	174.350.930,00
Belanja Modal Mebel	1.999.926.280,00	1.868.721.600,00	93,44	160.973.310,00
Belanja Modal Alat Pembersih	97.985.000,00	97.795.100,00	99,81	2.886.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	689.436.307,00	645.286.597,00	93,60	181.167.800,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Alat Dapur	19.766.863,00	12.516.000,00	63,32	16.172.950,00
Belanja Modal Alat Rumah Tanggal Lainnya (Home Use)	501.986.431,00	468.034.150,00	93,24	318.995.980,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	29.579.150,00	0	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	48.500.000,00	48.365.999,00	99,72	103.066.650,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	57.205.000,00	56.519.750,00	98,80	104.191.140,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0	0	0,00	76.423.500,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	0	0,00	12.987.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	56.668.260,00	56.376.300,00	99,48	24.636.450,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	57.636.350,00	53.738.500,00	93,24	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	325.453.020,00	318.810.930,00	97,96	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0	0	0,00	4.339.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.500.000,00	10.267.500,00	97,79	14.700.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	13.063.080,00	13.063.080,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	76.203.120,00	43.456.500,00	57,03	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.902.247.275,00	3.476.699.921,00	89,09	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0	0	0,00	601.701.611,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.909.100,00	2.500.000,00	63,95	1.020.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	482.885.744,00	478.123.600,00	99,01	3.409.283.592,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0	0	0,00	70.318.650,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	0	0	0,00	73.716.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	630.000.000,00	628.440.000,00	99,75	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek PAUD/TK	0	0	0,00	50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Umum	3.609.935.055,00	3.188.283.880,00	88,32	2.684.195.430,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	1.815.564.060,00	1.814.406.980,00	99,94	133.193.868,00
Belanja Modal Personal Computer	1.534.751.574,00	1.522.884.665,00	99,23	1.340.392.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.145.528.572,00	1.012.179.802,00	88,36	956.796.400,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	94.976.829,00	92.690.470,00	97,59	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	14.600.000,00	11.751.950,00	80,49	0,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0	0,00	57.720.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	877.689.770,00	837.927.155,00	95,47	254.441.830,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	317.792.268,00	254.950.915,00	80,23	205.495.731,00
Belanja Modal Baju Pengaman	24.310.000,00	24.236.850,00	99,70	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	7.088.500,00	0	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	13.169.000,00	13.096.050,00	99,45	104.530.920,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	12.000.000,00	11.721.600,00	97,68	0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD, disajikan sebagai berikut.

Tabel 54. Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	6.133.638.470,00	5.734.905.610,00	93,50	1.926.094.900,00
2	Dinas Kesehatan	4.452.141.540,00	3.928.035.856,00	88,23	7.640.861.738,00
3	BLUD-RSUD	3.609.935.055,00	3.188.283.880,00	88,32	
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	289.126.700,00	241.971.200,00	83,69	1.787.634.680,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	64.447.050,00	64.000.000,00	99,31	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	171.401.510,00	102.150.000,00	59,60	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	73.400.000,00	72.194.400,00	98,36	32.371.865,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.871.538.165,00	1.831.456.000,00	97,86	1.029.842.400,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	318.175.480,00	304.797.500,00	95,80	189.615.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	123.423.810,00	116.784.420,00	94,62	22.082.895,00
11	Dinas Perhubungan	90.059.010,00	89.564.457,00	99,45	194.933.316,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	207.672.070,00	205.785.500,00	99,09	47.600.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.444.115,00	24.350.000,00	99,61	54.600.900,00
14	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	118.708.360,00	105.777.099,00	89,11	10.269.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	197.121.270,00	197.079.535,00	99,98	0,00
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	841.974.904,00	839.067.655,00	99,65	94.878.100,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	429.976.560,00	428.098.350,00	99,56	111.487.350,00
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	103.664.170,00	103.390.000,00	99,74	0,00
19	Sekretariat Daerah	1.646.595.634,00	1.223.754.830,00	74,32	704.180.165,00
20	Inspektorat	52.384.710,00	49.084.130,00	0,00	5.509.270,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	179.237.830,00	177.300.300,00	98,92	77.806.800,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	523.334.915,00	518.110.250,00	99,00	2.572.500.075,00
23	Badan Pendapatan Daerah	65.483.360,00	65.388.780,00	99,86	32.123.400,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.691.220,00	60.184.200,00	97,56	0,00
25	Sekretariat DPRD	678.462.635,00	672.278.350,00	99,09	78.588.000,00
26	Kecamatan Dusun Tengah	78.827.310,00	78.827.310,00	100,00	0,00
27	Kecamatan Pematang Karau	27.892.045,00	27.892.045,00	100,00	0,00
28	Kecamatan Awang	66.820.121,00	65.575.432,00	98,14	14.800.518,00
29	Kecamatan Patangkep Tutui	51.733.360,00	51.733.360,00	100,00	0,00



No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
30	Kecamatan Dusun Timur	76.662.105,00	75.689.000,00	98,73	19.100.000,00
31	Kecamatan Benua Lima	75.729.700,00	75.252.450,00	99,37	36.352.500,00
32	Kecamatan Paku	59.498.640,00	59.470.000,00	99,95	0,00
33	Kecamatan Paju Epat	29.755.350,00	29.755.350,00	100,00	17.500.000,00
34	Kecamatan Raren Batuah	23.091.000,00	23.091.000,00	100,00	0,00
35	Kecamatan Karusen Janang	60.455.760,00	57.742.000,00	95,51	0,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	157.329.500,00	157.020.045,00	99,80	0,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.035.833.434,00	21.045.840.294,00	91,36	16.700.733.622,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp41.140.779.038,98 dan Rp29.782.859.321,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.575.128.268,00	41.140.779.038,98	92,30	29.782.859.321,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.524.893.093,00	2.504.353.750,00	71,05	1.237.294.500,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	2.299.314.000,00	1.833.111.068,00	79,72	997.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.324.627.030,00	9.174.943.100,00	88,86	541.890.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000.000,00	199.500.000,00	33,25	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.502.281.774,00	21.172.967.170,98	98,47	18.734.490.534,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.243.000.005,00	2.197.841.500,00	97,99	1.764.225.602,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	3.834.004.409,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.338.520.366,00	2.334.312.450,00	99,82	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Bangunan Parkir	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
Belanja Modal Taman	200.000.000,00	199.600.000,00	99,80	975.001.476,00
Belanja Modal Pagar	442.492.000,00	441.450.000,00	99,76	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	850.000.000,00	833.400.000,00	98,05	1.698.952.800,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD, disajikan sebagai berikut.

Tabel 56. Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	16.417.212.600,00	16.099.015.232,00	98,06	15.987.890.414,00
2	Dinas Kesehatan	2.299.314.000,00	1.833.111.068,00	79,72	997.000.000,00
3	BLUD-RSUD	1.900.000.000,00	882.014.750,00	46,42	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.135.732.298,00	18.910.025.538,98	93,91	12.747.638.407,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	195.982.162,00	195.750.000,00	99,88	0,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	12.176.700,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	249.500.000,00	249.050.000,00	99,82	0,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	34.523.800,00
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.339.200.000,00	2.334.978.950,00	99,82	0,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	149.997.362,00	149.800.000,00	99,87	0,00
11	Sekretariat Daerah	600.000.000,00	199.500.000,00	33,25	0,00
12	Badan Pendapatan Daerah	199.320.366,00	198.833.500,00	99,76	0,00



No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88.869.480,00	88.700.000,00	99,81	0,00
14	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.575.128.268,00	41.140.779.038,98	92,30	29.782.859.321,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp138.082.480.220,39 dan Rp55.462.710.136,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 57. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	156.653.430.865,00	138.082.480.220,39	88,15	55.462.710.136,00
Belanja Modal Jalan Kabupaten	147.622.454.801,00	129.914.401.739,39	88,00	51.805.062.810,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	79.980.168,00	79.800.000,00	99,77	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	250.000.000,00	248.890.000,00	99,56	672.276.100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.960.582.500,00	4.210.578.609,00	84,88	1.321.824.000,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.169.269.400,00	1.166.575.297,00	99,77	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.998.600.000,00	1.890.680.000,00	94,60	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	150.000.000,00	149.800.000,00	99,87	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal saluran Pembuangan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	468.049.900,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	249.420.626,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	217.523.500,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.400.500,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	149.628.200,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	203.793.996,00	203.204.575,00	99,71	568.524.500,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD, disajikan sebagai berikut.

Tabel 58. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	156.323.798.417,00	137.753.925.645,39	88,12	55.117.581.436,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	149.628.200,00
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	104.130.092,00	103.804.575,00	99,69	35.425.500,00
5	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00
6	Kecamatan Dusun Tengah	98.730.168,00	98.550.000,00	99,82	0,00
7	Kecamatan Benua Lima	126.772.188,00	126.200.000,00	99,55	0,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.653.430.865,00	138.082.480.220,39	88,15	55.462.710.136,00



5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.091.448.206,00 dan Rp207.889.400,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 59. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.054.409.650,00	1.091.448.206,00	103,51	207.889.400,00
Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	195.919.400,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	188.000.000,00	125.715.500,00	66,87	11.970.000,00
Belanja Modal Ternak Lainnya	46.260.000,00	46.260.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Software	101.350.000,00	101.349.500,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	718.799.650,00	818.123.206,00	113,82	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk sub rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya yang merupakan Buku dari sumber Dana BOS namun salah penganggaran dan Nilai Anggaran lebih kecil dari realisasi yang mekanisme pencatatannya melalui Pengesahan belanja dan bukan melalui SP2D. Hal tersebut karena dana BOS lalu lintas dananya tidak melalui RKUD namun melalui RKUN langsung ke rekening bank sekolah.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD, disajikan sebagai berikut.

Tabel 60. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
1	Dinas Pendidikan	718.799.650,00	818.123.206,00	113,82	0,00
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	195.919.400,00
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	46.260.000,00	46.260.000,00	100,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	180.000.000,00	117.715.500,00	65,40	0,00
6	Badan Pendapatan Daerah	101.350.000,00	101.349.500,00	100,00	0,00
7	Kecamatan Awang	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00



No.	SKPD	Jumlah			Realisasi 2022
		APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.054.409.650,00	1.091.448.206,00	103,51	207.889.400,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp196.048.200,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 61. Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	196.048.200,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	196.048.200,00

Tahun Anggaran 2023 Belanja Modal Aset Lainnya tidak dianggarkan, sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp196.048.200,00 yang merupakan pengadaan Aplikasi PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.533.187.200,00 dan Rp9.540.962.083,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.533.187.200,00	25,33	9.540.962.083,00
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.533.187.200,00	25,33	9.540.962.083,00

Anggaran Belanja Tidak Terduga penganggarannya berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun dananya dimanfaatkan oleh SKPD Teknis. SKPD Teknis yang mendapatkan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana banjir dan penanggulangan demam berdarah, sebagaimana berikut.

Tabel 63. Belanja Tidak Terduga per SKPD

No.	SKPD	Realisasi 2023
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.535.275.000,00
2	BPBD Damkar	47.849.000,00
3	Satua Polisi Pamong Praja	31.136.000,00
4	RSUD	331.945.000,00



No.	SKPD	Realisasi 2023
5	Dinas Kesehatan	76.032.000,00
6	Inspektorat	21.400.000,00
7	DPUPR	386.630.200,00
8	Dinas Perikanan dan Peternakan	102.920.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.533.187.200,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp160.345.590.527,00 dan Rp147.176.622.577,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 64. Belanja Transfer

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Transfer	169.777.364.900,00	160.345.590.527,00	94,44	147.176.622.577,00
Belanja Bagi Hasil	4.133.500.000,00	4.104.711.131,00	99,30	2.843.905.141,00
Belanja Bantuan Keuangan	165.643.864.900,00	156.240.879.396,00	94,32	144.332.717.436,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.104.711.131,00 dan Rp2.843.905.141,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 65. Belanja Bagi Hasil

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Bagi Hasil	4.133.500.000,00	4.104.711.131,00	99,30	2.843.905.141,00
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	4.133.500.000,00	4.104.711.131,00	99,30	2.843.905.141,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan ke Pemerintah Desa sebagaimana disajikan berikut ini.



Tabel 66. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerinta Desa

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Kecamatan Dusun Timur			
1	Pulau Patai	35.449.048,00	26.932.602,00
2	Sarapat	52.168.653,00	57.660.204,00
3	Magantis	47.747.806,00	22.294.823,00
4	Ja'ar	110.220.737,00	50.713.748,00
5	Matabu	99.818.882,00	73.757.088,00
6	Dorong	47.043.971,00	31.064.727,00
7	Didi	45.154.333,00	40.404.140,00
8	Karang Langit	52.186.836,00	40.792.840,00
9	Haringen	44.789.388,00	23.277.400,00
10	Jaweten	165.473.825,00	175.304.560,00
11	Matarah	37.905.752,00	24.896.341,00
12	Maragut	32.000.289,00	30.451.815,00
13	Mangkarap	34.311.895,00	22.149.464,00
14	Gumpa	37.129.823,00	36.495.664,00
15	Sumur	42.359.702,00	19.534.458,00
16	Harara	14.005.298,00	17.620.060,00
Kecamatan Benua Lima			
1	Kandris	25.890.496,00	17.532.512,00
2	Banyu Landas	28.146.043,00	18.021.349,00
3	Bagok	45.632.499,00	47.786.276,00
4	Bamban	33.442.044,00	18.854.530,00
5	Tewah Pupuh	37.741.489,00	36.456.973,00
6	Gudang Seng	28.594.650,00	22.833.272,00
Kecamatan Patangkep Tutui			
1	Pulau Padang	32.895.156,00	20.617.110,00
2	Kambitin	30.173.232,00	18.490.198,00
3	Ramania	31.679.797,00	27.939.838,00
4	Bentot	33.293.361,00	68.016.295,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
5	Ampari Bura	26.067.984,00	21.704.598,00
6	Kotam	53.123.015,00	16.995.449,00
7	Betang Nalong	31.940.489,00	27.524.284,00
8	Mawani	31.978.109,00	16.995.449,00
9	Jango	29.952.673,00	16.995.449,00
10	Lalap	30.979.846,00	25.328.659,00
Kecamatan Awang			
1	Janah Jari	32.867.971,00	23.073.251,00
2	Bangkirayen	35.669.505,00	32.238.927,00
3	Hayaping	41.627.897,00	27.138.906,00
4	Tangkan	31.888.074,00	28.107.866,00
5	Wungkur Nanakan	31.548.565,00	27.672.576,00
6	Ampari	32.697.239,00	18.365.640,00
7	Apar Batu	29.324.619,00	17.040.153,00
8	Biwan	27.848.861,00	20.985.715,00
9	Janah Mansiwui	29.697.093,00	16.995.449,00
10	Danau	28.759.589,00	20.243.993,00
11	Pianggu	31.399.726,00	20.161.358,00
Kecamatan Dusun Tengah			
1	Saing	42.909.590,00	18.338.353,00
2	Rodok	67.447.193,00	54.186.768,00
3	Ampah II	34.191.139,00	17.187.372,00
4	Putai	36.643.459,00	20.059.849,00
5	Netampin	33.638.250,00	29.139.850,00
6	Sumber Garunggung	41.561.529,00	25.788.492,00
7	Muara Awang	28.349.622,00	22.087.218,00
Kecamatan Pematang Karau			
1	Muara Palantau	31.277.168,00	17.433.547,00
2	Ketab	30.252.768,00	16.995.449,00
3	Kupang Bersih	38.324.292,00	17.844.688,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
4	Tuyau	53.990.270,00	22.429.399,00
5	Pinang Tunggal	14.783.571,00	22.755.389,00
6	Nagaleah	33.713.304,00	23.833.659,00
7	Lampeong	35.872.846,00	21.430.617,00
8	Bararawa	31.497.219,00	18.477.520,00
9	Bambulung	90.677.775,00	86.114.154,00
10	Lebo	28.255.115,00	16.995.449,00
11	Muru Duyung	33.967.965,00	24.091.748,00
12	Tumpung Ulung	32.563.866,00	25.806.539,00
13	Sumber Rejo	67.060.033,00	69.921.564,00
Kecamatan Paju Epat			
1	Juru Banu	24.887.425,00	17.040.153,00
2	Telang Baru	170.718.872,00	33.807.416,00
3	Tampu Langit	30.326.707,00	22.542.156,00
4	Telang	35.849.699,00	22.006.286,00
5	Maipe	29.561.960,00	16.995.449,00
6	Murutuwu	35.885.782,00	31.929.890,00
7	Balawa	34.735.766,00	20.727.685,00
8	Kali Napu	24.801.000,00	16.995.449,00
9	Siong	40.366.409,00	32.662.702,00
Kecamatan Raren Batuah			
1	Puri	38.776.771,00	24.291.230,00
2	Lenggang	39.625.831,00	28.798.054,00
3	Batuah	42.115.911,00	30.138.678,00
4	Unsum	39.507.614,00	21.494.445,00
5	Baruyan	32.844.208,00	17.147.442,00
6	Turan Amis	39.602.704,00	17.800.118,00
7	Malintut	33.169.586,00	17.874.439,00
8	Tangkum	48.446.482,00	54.092.698,00
9	Sibung	37.746.317,00	17.107.209,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Kecamatan Paku			
1	Tampa	52.346.093,00	26.574.694,00
2	Kalamus	31.466.233,00	18.101.244,00
3	Simpang Bangkuang	45.320.908,00	28.652.824,00
4	Patung	46.276.656,00	40.939.688,00
5	Runggu Raya	30.186.112,00	17.963.158,00
6	Bantai Napu	32.232.657,00	16.995.449,00
7	Tarinsing	27.099.408,00	16.995.449,00
8	Paku Beto	31.330.374,00	17.342.910,00
9	Gandrung	31.143.048,00	23.299.037,00
10	Pangkan	30.442.996,00	22.160.778,00
11	Kupang Baru	27.233.217,00	17.793.663,00
12	Luau Jawuk	82.177.881,00	27.453.219,00
Kecamatan Karusen Janang			
1	Dayu	49.277.371,00	25.915.643,00
2	Wuran	34.865.606,00	18.400.411,00
3	Ipu Mea	39.064.497,00	18.888.876,00
4	Lagan	47.628.679,00	46.397.331,00
5	Putut Tawuluh	27.594.813,00	19.214.571,00
6	Simpang Naneng	36.586.506,00	31.771.674,00
7	Kandris	33.865.798,00	27.209.390,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4.104.711.131,00	2.843.905.141,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp156.240.879.396,00 dan Rp144.332.717.436,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 67. Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Belanja Bantuan Keuangan	165.643.864.900,00	156.240.879.396,00	94,32	144.332.717.436,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	27.629.881.000,00	15.826.308.696,00	57,28	14.200.091.336,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100	245.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	62.234.422.900,00	62.234.422.900,00	100,00	55.851.814.100,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.534.561.000,00	77.935.147.800,00	103,18	73.795.812.000,00

Realisasi Rp15.826.308.696,00 merupakan Iuran BPJS untuk masyarakat tidak mampu (Jamkesda), sedangkan Rp245.000.000,00 berupa kontribusi pendanaan bersama (Sharing) terhadap kerjasama pembayaran sewa transponder (transmitter responder) dengan TVRI Kalteng, dan untuk realisasi Rp77.935.147.800,00 merupakan realisasi Dana Desa maupun Tambahan Dana Desa (DD dan TDD) penjelasan terhadap realisasi Dana Desa maupun Tambahan Dana Desa sebagaimana tercantum pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya di bagian Dana Desa, serta realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp62.234.422.900,00.

Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan per Desa, yang Dananya digunakan untuk Penghasilan Tetap Perangkat Desa serta Operasional rutin Pemerintah Desa sebagaimana berikut.

Tabel 68. Realisasi Alokasi Dana Desa

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		2023	2022
Kecamatan Dusun Timur			
1	Pulau Patai	638.522.000,00	544.470.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		2023	2022
2	Sarapat	624.445.000,00	504.448.000,00
3	Magantis	610.458.000,00	492.433.000,00
4	Jaar	986.290.000,00	652.841.000,00
5	Matabu	697.067.000,00	567.248.000,00
6	Dorong	531.115.000,00	463.880.000,00
7	Didi	503.026.000,00	415.467.000,00
8	Karang Langit	548.620.000,00	395.989.000,00
9	Haringen	594.454.000,00	536.924.000,00
10	Jaweten	721.872.000,00	532.369.000,00
11	Matarah	576.458.000,00	458.646.000,00
12	Maragut	557.364.000,00	406.685.000,00
13	Mangkarap	527.739.000,00	438.347.000,00
14	Gumpa	578.329.000,00	472.796.000,00
15	Sumur	464.683.000,00	400.756.000,00
16	Harara	506.011.000,00	419.762.000,00
Kecamatan Benua Lima			
1	Kandris	754.725.000,00	420.627.000,00
2	Banyu Landas	486.136.000,00	375.624.000,00
3	Bagok	565.142.000,00	410.233.000,00
4	Bamban	626.747.000,00	477.698.000,00
5	Tewah Pupuh	682.226.000,00	496.976.000,00
6	Gudang Seng	451.560.000,00	364.434.000,00
Kecamatan Patangkep Tutui			
1	Pulau Padang	509.134.000,00	398.880.000,00
2	Kambitin	483.899.000,00	389.149.000,00
3	Ramania	525.970.000,00	412.578.000,00
4	Bentot	812.973.000,00	596.646.000,00
5	Ampari Bura	714.220.000,00	597.581.000,00
6	Kotam	706.294.000,00	577.717.000,00
7	Betang Nalong	488.941.000,00	401.749.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		2023	2022
8	Mawani	508.061.000,00	424.027.000,00
9	Jango	611.906.000,00	456.111.000,00
10	Lalap	689.190.000,00	554.531.000,00
Kecamatan Awang			
1	Janah Jari	615.173.000,00	477.865.000,00
2	Bangkirayen	498.121.000,00	419.743.000,00
3	Hayaping	647.419.000,00	531.505.000,00
4	Tangkan	585.468.000,00	452.550.000,00
5	Wungkur Nanakan	606.688.000,00	439.457.000,00
6	Ampari	544.980.000,00	427.225.000,00
7	Apar Batu	668.555.000,00	489.038.000,00
8	Biwan	444.985.900,00	436.828.000,00
9	Janah Mansiwui	503.669.000,00	419.782.000,00
10	Danau	502.923.000,00	446.173.000,00
11	Pianggu	517.335.000,00	427.674.000,00
Kecamatan Dusun Tengah			
1	Saing	576.626.000,00	444.225.000,00
2	Rodok	659.704.000,00	678.746.000,00
3	Ampah II	568.747.000,00	478.097.000,00
4	Putai	1.046.658.000,00	601.070.000,00
5	Netampin	855.439.000,00	612.298.000,00
6	Sumber Garunggung	649.844.000,00	587.368.000,00
7	Muara Awang	659.710.000,00	556.574.000,00
8	Dambung	0,00	578.205.000,00
Kecamatan Pematang Karau			
1	Muara Palantau	1.169.880.000,00	975.701.800,00
2	Ketab	832.133.000,00	730.845.000,00
3	Kupang Bersih	863.641.000,00	891.572.000,00
4	Tuyau	784.478.000,00	528.031.000,00
5	Pinang Tunggal	517.421.000,00	423.446.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		2023	2022
6	Nagaleah	640.358.000,00	466.190.000,00
7	Lampeong	650.322.000,00	504.566.000,00
8	Bararawa	653.664.000,00	587.950.000,00
9	Bambulung	951.464.000,00	878.946.000,00
10	Lebo	693.030.000,00	569.456.000,00
11	Muru Duyung	515.410.000,00	431.230.000,00
12	Tumpang Ulung	619.354.000,00	470.159.000,00
13	Sumber Rejo	724.118.000,00	509.432.000,00
Kecamatan Paju Epat			
1	Juru Banu	736.029.000,00	512.514.000,00
2	Telang Baru	668.732.000,00	433.468.000,00
3	Tampulangit	553.645.000,00	468.042.000,00
4	Telang	567.485.000,00	462.108.000,00
5	Maipe	500.804.000,00	409.357.000,00
6	Murutuwu	540.267.000,00	413.702.000,00
7	Balawa	703.607.000,00	556.572.000,00
8	Kali Napu	509.743.000,00	398.391.000,00
9	Siong	659.092.000,00	413.485.000,00
Kecamatan Raren Batuah			
1	Puri	677.511.000,00	519.591.000,00
2	Lenggang	588.219.000,00	500.391.000,00
3	Batuah	619.930.000,00	548.766.000,00
4	Unsum	641.462.000,00	468.261.000,00
5	Baruyan	535.417.000,00	422.132.000,00
6	Turan Amis	614.573.000,00	472.432.000,00
7	Malintut	569.593.000,00	491.189.000,00
8	Tangkum	590.860.000,00	470.598.000,00
9	Sibung	755.090.000,00	662.850.000,00
Kecamatan Paku			
1	Tampa	700.576.000,00	541.829.000,00



No.	Nama Desa/Kecamatan	Tahun	
		2023	2022
2	Kalamus	881.775.000,00	650.741.000,00
3	Simpang Bingkuang	523.236.000,00	416.652.000,00
4	Patung	580.853.000,00	414.183.000,00
5	Runggu Raya	632.851.000,00	539.948.000,00
6	Bantai Napu	579.541.000,00	443.820.000,00
7	Tarinsing	482.214.000,00	392.432.000,00
8	Paku Beto	545.951.000,00	435.130.000,00
9	Gandrung	628.620.000,00	498.344.000,00
10	Pangkan	513.683.000,00	495.638.000,00
11	Kupang Baru	515.111.000,00	382.722.000,00
12	Lau Jawuk	482.930.000,00	420.490.000,00
Kecamatan Karusen Janang			
1	Dayu	782.546.000,00	697.066.000,00
2	Wuran	696.554.000,00	549.938.000,00
3	Ipu Mea	539.287.000,00	429.641.000,00
4	Lagan	573.988.000,00	451.673.000,00
5	Putut Tawuluh	496.942.000,00	413.628.000,00
6	Simpang Naneng	525.329.000,00	383.370.000,00
7	Kandris	469.482.000,00	381.227.000,00
	Jumlah ADD	62.234.422.900,00	50.091.890.800,00

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp230.512.047.039,17, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69. Pembiayaan Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2022	Realisasi 2023	%	
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52



Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2022	Realisasi 2023	%	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Pengeluaran Pembiayaan	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Pembiayaan Netto	230.012.047.039,00	230.512.047.039,17	100,22	168.919.576.934,52
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	154.279.407.493,79	0,00	241.287.047.039,17

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp241.287.047.039,17 dan Rp179.994.576.934,52. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Penerimaan Pembiayaan	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.775.000.000,00 dan Rp11.075.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 71. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pengeluaran Pembiayaan	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

5.1.3.3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp154.279.407.493,79, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Uraian	Jumlah			Realisasi 2022
	APBD-P 2023	Realisasi 2023	%	
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan Pembiayaan	241.287.047.039,00	241.287.047.039,17	100,00	179.994.576.934,52
Pengeluaran Pembiayaan	11.275.000.000,00	10.775.000.000,00	95,57	11.075.000.000,00
Pembiayaan Netto	230.012.047.039,00	230.512.047.039,17	100,22	168.919.576.934,52
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	154.279.407.493,79	0,00	241.287.047.039,17

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 73. Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Saldo Anggaran Lebih Awal	241.287.047.039,17	179.994.576.934,52	61.292.470.104,65



5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, disajikan sebagai berikut.

Tabel 74. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	241.287.047.039,17	179.994.576.934,52	61.292.470.104,65

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun anggaran 2023 dan 2022, disajikan sebagai berikut.

Tabel 75. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	154.279.407.493,79	241.287.047.039,17	(87.007.639.545,38)

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan nilai yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, disajikan sebagai berikut.

Tabel 76. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	154.279.407.493,79	241.287.047.039,17	(87.007.639.545,38)

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir di Tahun Anggaran 2023 dan 2022, sebagaimana berikut.

Tabel 77. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No.	Jenis Dana	Tahun 2023	Tahun 2022
1	BOK Kabupaten/Dinas	978.774.890,00	2.164.441.047,00
2	BOK Puskesmas	1.003.979.148,00	0,00
3	BOKB (DPPPAKB)	507.549.000,00	435.848.200,00
4	BOP PAUD (TK Negeri)	0,00	28.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Jenis Dana	Tahun 2023	Tahun 2022
5	BOP KESETARAAN (Disdik)	0,00	0,00
6	ADMINDUK (Disdukcapil)	0,00	50,00
7	PK2UKM (Koperasi)	0,00	32.975.000,00
8	Tamsil Guru (Disdik)	750.000,00	250.000,00
9	Tunjangan Khusus Guru (TKG) (Disdik)	96.112.728,00	3.141.028,00
10	Tunjangan Profesi Guru (TPG) (Disdik)	1.417.614.700,00	168.022.760,00
11	Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	36.541.500,00	61.752.600,00
12	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	0,00	0,00
13	Dana Insentif Daerah Reguler/DIDT	175.373.553,00	175.373.553,00
14	Dak Fisik	6.459.075.171,00	214.099.545,00
15	Dana Kapitasi JKN	390.460,80	114.513,96
16	Dana BOS	44.551.858,00	14.722.701,00
17	Kas di BLUD	22.345.698.167,97	30.573.109.149,40
18	DAU yg tdk ditentukan peruntukannya	23.012.482.732,27	135.875.275.624,14
19	DAU P3K	806.664.000,00	0,00
20	DAU Kelurahan	107.699.605,00	0,00
21	DAU Bidang Pendidikan	10.310.331.268,00	0,00
22	DAU Bidang Kesehatan	9.986.352.895,00	0,00
23	DAU Bidang Pekerjaan Umum	586.300,00	0,00
24	DBH Pusat	59.322.178.312,89	52.967.397.807,41
25	DDL (PAD, DBH Provinsi & Dana Hibah)	17.666.701.203,86	18.600.495.460,27
	Jumlah Rincian Silpa	154.279.407.493,79	241.287.047.039,17

5.3. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Timur terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Neraca menunjukkan Harta atau Aset yang diperoleh dari sumber dana yang berasal dari Kewajiban dan Kekayaan sendiri atau Ekuitas Dana. Kondisi Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Timur per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut.



Tabel 78. Neraca

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Aset	1.682.290.180.590,42	1.504.361.005.146,98	177.929.175.443,44
2	Kewajiban	4.687.183.873,86	3.586.518.201,86	1.100.665.672,00
3	Ekuitas	1.677.602.996.716,56	1.500.774.486.945,12	176.828.509.771,44

5.3.1. Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.682.290.180.590,42 dan Rp1.504.361.005.146,98, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79. Aset

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Aset Lancar	186.065.498.606,88	277.812.091.772,69	(91.746.593.165,81)
2	Investasi Jangka Panjang	86.950.000.000,00	76.175.000.000,00	10.775.000.000,00
3	Aset Tetap	1.186.326.106.562,92	1.084.898.008.150,79	101.428.098.412,12
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	222.948.575.420,62	65.475.905.223,50	157.472.670.197,12
	Jumlah Aset	1.682.290.180.590,42	1.504.361.005.146,98	177.929.175.443,44

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan aset lain selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Barito Timur Per 31 Desember 2023 sebesar Rp186.065.498.606,88 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp277.812.091.772,69, dengan rincian Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

Tabel 80. Aset Lancar

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Aset Lancar	186.065.498.606,88	277.812.091.772,69	(91.746.593.165,81)
Kas dan Setara Kas	154.287.671.538,63	241.378.821.035,19	(87.091.149.496,56)
Kas di Kas Daerah	130.879.164.943,04	210.654.411.612,83	(79.775.246.669,79)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.820,00	52.910.500,00	(52.902.680,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	13.879.140,82	0,00	13.879.140,82
Kas di BLUD	22.345.698.167,97	30.573.109.149,40	(8.227.410.981,43)
Kas Dana BOS	44.551.858,00	14.750.701,00	29.801.157,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.004.369.608,80	114.513,96	1.004.255.094,84
Kas Lainnya	0,00	83.524.558,00	(83.524.558,00)
Piutang Pajak	9.157.482.968,00	7.768.903.499,00	1.388.579.469,00
Piutang Retribusi	1.762.637.957,00	1.523.481.445,00	239.156.512,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.479.031.137,00	1.287.827.156,94	191.203.980,06
Piutang Transfer Antar Daerah	7.326.455.552,00	11.946.081.966,00	(4.619.626.414,00)
Piutang Lainnya	50.266.728,00	580.876.471,97	(530.609.743,97)
Penyisihan Piutang	(7.202.260.040,91)	(4.732.575.637,24)	(2.469.684.403,67)
Beban Dibayar Dimuka	131.832.665,99	149.420.913,29	(17.588.247,30)
Persediaan	19.072.380.101,17	17.909.254.922,54	1.163.125.178,63

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp130.879.164.943,04 dan Rp210.654.411.612,83, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81. Kas di Kas Daerah

No.	Identitas Bank			Saldo Akhir	
	Nama Bank	Nama RKUD	No.Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Bank Kalteng Cab. Tamiang Layang	Bendahara Umum Daerah Bartim	2020101000531	31.516.952.951,47	42.191.755.456,56
2	BRI Cab. Buntok	RKUD Kabupaten Barito Timur	30301000408307	69.447.479.051,48	155.272.522.517,93
3	Bank Kalteng Cab. Tamiang Layang	Pajak Gaji PNS Kabupaten Barito Timur	2020102000772	-	-
4	BRI Cab. Buntok	Rek BPHTB Kab Barito Timur	30301000540303	-	1.001.961.625,96
5	BRI Cab. Buntok	PBB P2 Kabupaten Barito Timur	30301000852302	-	816.769.578,69
6	Bank Mandiri KCP Buntok	Pemda Kabupaten Barito Timur	159000145454567	28.406.900.644,09	11.029.491.368,69
7	BRI Cab. Buntok	Rekening Pengeluaran	30301000892302	1.507.832.296,00	78.875.198,00
8	Bank Kalteng Cab. Tamiang Layang	BPHTB KABUPATEN BARTIM	2020102001634	-	86.933.728,00
9	Bank Kalteng Cab. Tamiang Layang	PBB P2 KABUPATEN BARTIM	2020102001633	-	176.102.139,00
				130.879.164.943,04	210.654.411.612,83



Peruntukan Rekening Kas Umum Daerah tersebut diatas secara singkat, yaitu RKUD:

1. Rekening nomor satu dipergunakan untuk transaksi harian seperti realisasi SP2D, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer dari Pemerintah Provinsi, RKUD;
2. Rekening nomor dua yang terdaftar pada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) sebagai penerima Dana dari Pemerintah Pusat, RKUD;
3. Rekening nomor tiga dipergunakan untuk menampung potongan Gaji CPNS/PNS seperti Askes dan Taspen dan dikeluarkan menggunakan SP2D Non Anggaran, RKUD;
4. Rekening nomor empat dipergunakan untuk penerimaan Pajak Daerah BPHTB yang secara teknis dimanfaatkan oleh Badan Pendapatan Daerah, RKUD;
5. Rekening nomor lima sama dengan rekening empat yaitu untuk penerimaan pembayaran Pajak Daerah PBB-P2, RKUD;
6. Rekening nomor enam untuk memperoleh bunga;
7. Rekening nomor tujuh RKUD selama ini dipergunakan untuk realisasi Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Rekening nomor delapan untuk penerimaan Pajak Daerah BPHTB yang disetor ke Bank Pembangunan Kalteng yang secara teknis dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, RKUD; dan
9. Rekening nomor sembilan untuk penerimaan Pajak Daerah PBB-P2 yang disetor ke Bank Pembangunan Kalteng yang secara teknis dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, RKUD.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.820,00 dan Rp52.910.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.820,00	52.910.500,00	(52.902.680,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran – Tunai	7.820,00	52.910.500,00	(52.902.680,00)

Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai sebesar Rp7.820,00 merupakan Pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Kecamatan Awang, sedangkan di Tahun Anggaran 2022 senilai Rp52.910.500,00 realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran atau pertanggungjawaban pada Inspektorat.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.879.140,82 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 83. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kas di Bendahara Penerimaan	13.879.140,82	0,00	13.879.140,82
Kas di Bendahara Umum Daerah	13.879.140,82	0,00	13.879.140,82

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Jasa Giro yang berasal dari rekening Bank Mandiri dan berstatus sebagai rekening penampungan setoran Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp6.786,82. Untuk dan Penerimaan BPHTB yang diakui Pendapatan Tahun Anggaran 2022 namun dikembalikan karena batal pembelian tanah sebesar Rp12.000.000 serta ASN Pemprov yang salah setor Pengembalian Tambahan Penghasilan PNS di TA 2022 dan di setor ke RKUD Pemprov dari RKUD Barito Timur sebesar Rp1.872.354,00. Untuk kekeliruan mekanisme pengembalian nilai Rp12.000.000,00 dan Rp1.872.354,00 yang telah dilakukan pendebetan dari RKUD tanpa melalui SP2D. untuk menyelesaikan kekeliruan mekanisme tersebut BUD terlebih dahulu mengembalikan dana dimaksud di Tahun Anggaran 2024 lalu mengeluarkannya melalui mekanisme penerbitan SP2D dari Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2024. Sedangkan kekeliruan mekanisme tersebut dicatat sebagai Kas di Bendahara Umum Daerah.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp22.345.698.167,97 dan Rp30.573.109.149,40 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 84. Kas di BLUD

No.	Identitas Bank			Saldo Akhir	
	Nama Bank	Nama RKUD	No.Rekening	Tahun 2022	Tahun 2023
1	BRI Cab. Buntok	Bendahara Penerimaan BLUD	0303-01-000917-30-6	30.573.109.149,40	17.282.547.889,04
2	BRI Cab. Buntok	Bendahara Pengeluaran BLUD	0303-01-000916-30-0	0	0
3	Bank Kalteng Cab. Tamiang Layang	Bendahara Pengeluaran RSUD Tamiang Layang	2020102000793	0	0
4	Bank Mandiri KCP Tamiang Layang	Rumah Sakit Daerah Tamiang Layang	159-00-0559639-9	0	5.063.150.278,93
				30.573.109.149,40	22.345.698.167,97

Kas di BLUD-RSUD mengelola empat rekening, dua pada Bank Rakyat Indonesia, satu pada Bank Pembangunan Kalteng yang merupakan RK SKPD-RSUD pada masa sebelum dikelola secara BLUD serta satu pada Bank Mandiri. Rekening Penerimaan dimanfaatkan untuk menerima Setoran tunai dari Bendahara Penerimaan atau Kasir dan menerima transferan dari pihak BPJS, dan untuk



Rekening Penerimaan digunakan untuk pembayaran operasional BLUD sedangkan Rekening Bendahara Pengeluaran RSUD digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya dari RKUD seperti dana BTT, Bansos dan dana-dana lain yang bersumber dari RKUD dan Rekening Bank Mandiri digunakan untuk penerimaan lain-lain BLUD.

Laporan Keuangan BLUD-RSUD Tamiang Layang per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh auditor independen **Kantor Akuntan Publik (KAP) MOCHAMAD NOVELSYAH** dengan Nomor Laporan Auditor Independen (LAI) 00010/2.1375/AU.5/11/1805-2/1/IV/2024.

5.3.1.1.5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS Rp44.551.858,00 yang terdiri dari Saldo untuk Sekolah Dasar Negeri Rp 5.861.858,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp 38.690.000,00. Sedangkan untuk Sekolah Swasta diperlakukan sebagai Hibah sehingga dianggap tidak memiliki sisa yang terdiri SD Harati Borneo, SD Katolik Trinitas dan SMP Bethel Matarah. Adapun Rekapitulasi Saldo Akhir kas untuk masing-masing Tingkatan Sekolah Tahun 2023 dan 2022 sebagaimana berikut ini.

Tabel 85. Kas Dana Bos

No.	Uraian	Saldo Akhir	
		2022	2023
1	Sekolah Dasar (145 Negeri & 2 Swasta)	10.867.111,00	5.861.858,00
2	Sekolah Menengah Pertama(31 Negeri & 1 Swasta)	3.855.590,00	38.690.000,00
3	TK Pembina Raren Batuah	28.000,00	0,00
	Jumlah	14.750.701,00	44.551.858,00

5.3.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tahun Anggaran 2023 Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencantumkan nilai Rp1.004.369.608,80 yang terdiri Saldo Kas Dana Kapitasi JKN sebesar Rp390.460,80 dan Saldo Kas Dak Nonfisik untuk jenis BOK Puskesmas sebesar Rp1.003.979.148,00 yang mekanisme penyalurannya langsung dari RKUN ke Rekening BNI FKTP/Puskesmas. Adapun rinciannya sebagaimana berikut.

Tabel 86. Kas Dana Kapitasi FKTP

No.	Identitas pada Bank Kalteng		Saldo Akhir	
	Nama pada Buku Bank	No.Rekening	Tahun 2022	Tahun 2023
1	UPTD Puskesmas Bambulung	2020202010022	0,2	0
2	UPTD Puskesmas Ampah	2020202010032	244,4	389.984,40
3	UPTD Puskesmas Unsum	2020202010034	0	0
4	UPTD Puskesmas Tampa	2020202010025	0	0



No.	Identitas pada Bank Kalteng		Saldo Akhir	
	Nama pada Buku Bank	No.Rekening	Tahun 2022	Tahun 2023
5	UPTD Puskesmas Dayu	2020202010029	0	0
6	UPTD Puskesmas Telang Siong	2020202010035	0	0
7	UPTD Puskesmas Tamiang Layang	2020202010027	114.268,00	0
8	UPTD Puskesmas Edison Jaar	2020202010028	0	0
9	UPTD Puskesmas Pasar Panas	2020202010030	0,4	476,4
10	UPTD Puskesmas Hayaping	2020202010053	0	0
11	UPTD Puskesmas Bentot	2020202010031	0,96	0
			114.513,96	390.460,80

Tabel 87. Saldo Akhir BOK Puskesmas

No	Nama pada Buku Bank	No. Rek BNI	Kas Akhir 2022	Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas 2023		
				Kas Bank	Kas Tunai	Kas Akhir
1	060409BOKPKMBAMBULUNG	1590061971	-	125.605.182,00	-	125.605.182,00
2	1060406BOKPKMAMPAH	1590061993	-	189.960.390,00	187.968.533,00	377.928.923,00
3	1060408BOKPKMUNSUM	1590061959	-	2.615.274,00	41.704.789,00	44.320.063,00
4	1060407BOKPKMTAMPA	1590061948	-	27.386.683,00	-	27.386.683,00
5	1060403BOKPKMDAYU	1590061879	-	44.514.203,00	2.478.756,00	46.992.959,00
6	1060402BOKPKMTELANGSiong	1590061891	-	20.861.812,00	-	20.861.812,00
7	1060400BOKPKMTAMIANGLAYANG	1590061982	-	27.942.782,00	184.383.402,00	212.326.184,00
8	1060401BOKPKMEDISONJAAR	1590061960	-	46.344.687,00	-	46.344.687,00
9	1060399BOKPKMPASARPANAS	1590061915	-	2.910.528,00	45.915.031,00	48.825.559,00
10	1060404BOKPKMHAYAPING	1590061937	-	35.244.627,00	-	35.244.627,00
11	1060405BOKPKMBENTOT	1590061880	-	18.142.469,00	-	18.142.469,00
	Jumlah Saldo Kas DAK Nonfisik BOK Puskesmas		-	541.528.637,00	462.450.511,00	1.003.979.148,00

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya saldo per 31 Desember 2023 bersaldo Nol sedang di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp83.524.558,00 yang yang berada pada SKPD Teknis dengan rincian, Rp38.751.558,00 Pajak yang belum disetorkan oleh Sekolah sampai dengan akhir tahun 2022 yang bersumber dari Dana BOS serta Rp44.773.000,00 merupakan Pajak Pusat dari Belanja Tidak Terduga pada Inspektorat yang disetorkan melewati tahun 2022.



Tabel 88. Kas Lainnya

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kas Lainnya	0,00	83.524.558,00	(83.524.558,00)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	83.524.558,00	(83.524.558,00)

5.3.1.1.8. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp9.157.482.968,00 dan Rp7.768.903.499,00, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 89. Piutang Pajak

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.136.303.653,00	543.111.191,00	593.192.462,00
2	Piutang PBB-P2	8.021.179.315,00	7.225.792.308,00	795.387.007,00
	Jumlah	9.157.482.968,00	7.768.903.499,00	1.388.579.469,00

Piutang Pajak Penerangan Jalan dicatat sesuai nilai pada bulan Desember tahun 2023 yang akan diterima dibulan Januari tahun 2024, sedangkan Piutang PBB-P2 dihitung dari Saldo Awal Audited dikurangi Pembayaran Pokok Per 31 Desember 2023. Rekapitulasi Piutang PBB-P2, sebagai berikut.

Tabel 90. Piutang PBB-P2

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Piutang PBB 2014	749.011.832,00	755.850.182,00	(6.838.350,00)
2	Piutang PBB 2015	884.927.613,00	892.017.817,00	(7.090.204,00)
3	Piutang PBB 2016	704.844.380,00	709.759.925,00	(4.915.545,00)
4	Piutang PBB 2017	710.726.003,00	717.464.276,00	(6.738.273,00)
5	Piutang PBB 2018	784.149.311,00	795.251.902,00	(11.102.591,00)
6	Piutang PBB 2019	742.068.624,00	754.677.287,00	(12.608.663,00)
7	Piutang PBB 2020	766.595.750,00	782.173.852,00	(15.578.102,00)
8	Piutang PBB 2021	808.975.228,00	833.945.579,00	(24.970.351,00)
9	Piutang PBB 2022	908.886.772,00	984.651.488,00	(75.764.716,00)
10	Piutang PBB 2023	960.993.802,00	0	960.993.802,00



No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
	Jumlah	8.021.179.315,00	7.225.792.308,00	795.387.007,00

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.762.637.957,00 dan Rp1.523.481.445,00, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 91. Piutang Retribusi

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Rumah Dinas) Bapenda	323.550.600,00	234.637.500,00	88.913.100,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Ruang (Rumah Dinas) Dinas Pendidikan	259.381.000,00	214.091.000,00	45.290.000,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan DisdagKopUKM	1.179.706.357,00	1.074.752.945,00	104.953.412,00
	Jumlah	1.762.637.957,00	1.523.481.445,00	239.156.512,00

Piutang Retribusi yang berada pada SKPD Badan Pendapatan Daerah atas Sewa Rumah Dinas, Dinas Pendidikan yang berasal dari Sewa Rumah Dinas dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berasal dari sewa pada blok pasar Beringin Ampah dan Pasar Temanggung Jayakarti Tamiang Layang.

5.3.1.1.10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.479.031.137,00 dan Rp1.287.827.156,94, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 92. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain (Remunerasi TDF)	-	3.207.473,94	(3.207.473,94)
2	Piutang Pendapatan BLUD	1.410.002.187,00	1.253.817.083,00	156.185.104,00
3	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	69.028.950,00	30.802.600,00	38.226.350,00
	Jumlah	1.479.031.137,00	1.287.827.156,94	191.203.980,06



Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 dan 2022 merupakan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya merupakan **Remunerasi** atas Dana Non Tunai yang berada pada *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan dicatat pada Badan Pendapatan Daerah sedangkan pada Dinas Kesehatan untuk Dana Non Kapitasi JKN serta Piutang BLUD untuk klaim ke BPJS pada BLUD-RSUD.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.326.455.552,00 dan Rp11.946.081.966,00, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 93. Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Piutang Bagi Hasil Kendaraan Bermotor	635.804.158,00	1.316.994.048,43	(681.189.890,43)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	614.229.938,00	1.617.979.130,57	(1.003.749.192,57)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.051.263.379,00	8.979.702.832,01	(2.928.439.453,01)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	25.158.077,00	31.405.954,99	(6.247.877,99)
	Jumlah	7.326.455.552,00	11.946.081.966,00	(4.619.626.414,00)

Piutang Transfer antar Daerah ini adalah kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang pencatatannya menggunakan dasar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/123/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Alokasi Definitif Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.1.12. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp50.266.728,00 dan Rp580.876.471,97, yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 94. Piutang Lainnya

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Piutang Bagian Lancar Ganti Kerugian Daerah Berupa Uang	-	530.609.743,97	(530.609.743,97)
2	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	50.266.728,00	50.266.728,00	-
	Jumlah	50.266.728,00	580.876.471,97	(530.609.743,97)



Piutang Lainnya terdiri dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.266.728,00 yang berada pada Dinas Kesehatan dan nilai tersebut tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya disebabkan belum ada penyelesaian. Piutang Bagian Lancar Ganti Kerugian Daerah berupa Uang dikoreksi karena double catat BPKAD sehingga nilai Rp530.609.743,97 dihapus.

5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.202.260.040,91 dan Rp4.732.575.637,24 yang terdiri atas Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 95. Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	(5.842.504.773,21)	(3.355.988.942,24)	(2.486.515.830,97)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.336.817.717,20)	(1.376.586.695,00)	39.768.977,80
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(22.937.550,50)	-	(22.937.550,50)
	Jumlah	(7.202.260.040,91)	(4.732.575.637,24)	(2.469.684.403,67)

Penyisihan Piutang Pajak dari Pajak PBB-P2 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 96. Penyisihan Piutang PBB-P2

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Macet (> 5 Tahun)	(5.342.323.513,00)	(2.357.627.924,00)	(2.984.695.589,00)
2	Ragu-ragu (> 3-5 Tahun)	(404.487.614,00)	(756.358.089,00)	351.870.475,00
3	Kurang lancar (> 1-3 Tahun)	(90.888.677,20)	(237.079.671,80)	146.190.994,60
4	Belum Jatuh Tempo (Lancar) Kategori umur 0-1 tahun	(4.804.969,01)	(4.923.257,44)	118.288,43
	Jumlah	(5.842.504.773,21)	(3.355.988.942,24)	(2.486.515.830,97)

Penyisihan Piutang Retribusi.

Tabel 97. Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)	(207.642.000,00)	(212.171.000,00)	4.529.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)	(234.652.970,00)	(224.100.000,00)	(10.552.970,00)



No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan)	(894.522.747,20)	(940.315.695,00)	45.792.947,80
	Jumlah	(1.336.817.717,20)	(1.376.586.695,00)	39.768.977,80

Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD, sebagaimana berikut.

Tabel 98. Penyisihan Piutang BLUD

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Macet (> 5 Tahun)	(16.263.800,00)	-	(16.263.800,00)
2	Ragu-ragu (> 3-5 Tahun)	(1.673.750,50)	-	(1.673.750,50)
3	Kurang lancar (> 1-3 Tahun)	(5.000.000,00)	-	(5.000.000,00)
4	Belum Jatuh Tempo (Lancar) Kategori umur 0-1 tahun	-	-	-
	Jumlah	(22.937.550,50)	(0,00)	(22.937.550,50)

5.3.1.1.14. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp131.832.665,99 dan Rp149.420.913,29 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 99. Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	3.689.750,00	5.123.150,00	(1.433.400,00)
2	Dinas Kesehatan	1.196.008,33	13.352.433,33	(12.156.425,00)
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	2.048.233,33	1.402.066,67	646.166,66
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.621.450,00	652.300,00	1.969.150,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	648.050,00	192.800,00	455.250,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	4.088.500,00	1.164.186,67	2.924.313,33
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	274.608,33	151.650,00	122.958,33
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.944.191,67	3.905.375,00	1.038.816,67
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.080.491,67	765.041,67	315.450,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.240.066,67	(1.240.066,67)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	-	881.891,67	(881.891,67)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
12	Dinas Perhubungan	2.612.958,33	3.115.125,00	(502.166,67)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	694.191,67	694.191,67	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	706.208,33	703.241,67	2.966,66
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	814.291,67	834.675,00	(20.383,33)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	645.925,00	2.774.791,67	(2.128.866,67)
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.357.958,33	3.166.833,33	(1.808.875,00)
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.029.433,33	3.026.858,33	1.002.575,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.762.875,00	3.078.908,33	(316.033,33)
20	Sekretariat Daerah	37.378.866,67	43.727.300,00	(6.348.433,33)
21	Inspektorat	1.839.858,33	421.458,33	1.418.400,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	2.112.625,00	3.792.416,67	(1.679.791,67)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.689.582,67	43.648.066,00	2.041.516,67
24	Badan Pendapatan Daerah	1.163.216,67	823.575,00	339.641,67
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.228.258,33	1.425.550,00	(197.291,67)
26	Sekretariat DPRD	4.037.941,67	5.453.985,61	(1.416.043,94)
27	Kecamatan Dusun Tengah	822.908,33	1.036.658,33	(213.750,00)
28	Kecamatan Pematang Karau	694.300,00	-	694.300,00
29	Kecamatan Awang	9.458,33	100.033,33	(90.575,00)
30	Kecamatan Patangkep Tutui	-	8.708,33	(8.708,33)
31	Kecamatan Dusun Timur	401.208,33	9.250,00	391.958,33
32	Kecamatan Benua Lima	253.283,33	1.252.366,67	(999.083,34)
33	Kecamatan Paku	549.816,67	744.666,67	(194.850,00)
34	Kecamatan Paju Epat	802.466,67	-	802.466,67
35	Kecamatan Raren Batuah	117.833,33	143.500,00	(25.666,67)
36	Kecamatan Karusen Janang	-	37.250,00	(37.250,00)
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	515.916,67	570.541,67	(54.625,00)
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	131.832.665,99	149.420.913,29	(17.588.247,30)

Beban Dibayar Dimuka di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.832.665,99 merupakan Beban Jasa Kantor atas Pajak Kendaraan Bermotor Dinas sebesar Rp88.184.599,99 dan Beban di Bayar Dimuka atas Kelebihan Bayar PFK yang dikompensasikan (PPH 21, IWP 8%, dan IWP 1%) pada Tahun Anggaran 2022 namun belum dimanfaatkan oleh Bendahara Umum Daerah sebesar Rp43.648.066,00.

5.3.1.1.15. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp19.072.380.101,17 dan Rp17.909.254.922,54. Persediaan adalah aset



lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pencatatan Persediaan berdasarkan hasil cek fisik (Stock Opname) per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 100. Persediaan

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	14.402.375,44	7.487.823,00	14.402.375,44
2	Persediaan Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	221.000,00	180.000,00	(7.266.823,00)
3	Persediaan Obat-obatan	379.129.232,28	9.193.401.474,06	378.949.232,28
4	Persediaan Bahan Obat-Obatan	10.118.945.112,69	115.482.021,00	925.543.638,63
5	Persediaan Bahan Kimia	641.553.072,31	1.269.613.359,59	526.071.051,31
6	Persediaan Hewan / Ternak	70.130.000,00	55.130.000,00	(1.199.483.359,59)
7	Bahan Lainnya	12.485.000,00	117.772.000,00	(42.645.000,00)
8	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.850.297.720,00	5.757.963.300,00	5.732.525.720,00
9	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	405.751.725,45	344.145.881,89	(5.352.211.574,55)
10	Barang Dalam Proses	619.433.563,00	619.433.563,00	275.287.681,11
11	Persediaan Dalam Proses Lainnya	693.901.300,00	428.645.500,00	74.467.737,00
12	Persediaan Dalam Proses	265.805.000,00	-	(162.840.500,00)
13	Alat Listrik	325.000,00	-	325.000,00
	Jumlah	19.072.380.101,17	17.909.254.922,54	1.163.125.178,63

Nilai Persediaan diperoleh dari Stock Opname pada SKPD dengan daftar sebagaimana berikut.

Tabel 101. Persediaan per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	953.010.800,00	415.255.000,00	537.755.800,00
2	Dinas Kesehatan	10.011.157.152,69	8.539.835.773,10	1.471.321.379,59
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	837.607.228,59	1.797.807.723,55	(960.200.494,96)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.290.956.563,00	6.290.956.563,00	0,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	391.064.890,45	328.846.196,89	62.218.693,56
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial	99.029.920,00	13.390.500,00	85.639.420,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	77.523.955,00	18.723.958,00	58.799.997,00



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
	Anak dan Keluarga Berencana			
8	Dinas Perikanan dan Peternakan	134.948.185,00	187.781.723,00	(52.833.538,00)
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	161.005.896,00	207.249.677,00	(46.243.781,00)
10	Sekretariat Daerah	4.123.765,44	1.725.367,00	2.398.398,44
11	Sekretariat DPRD	823.400,00	616.500,00	206.900,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah		4.978.546,00	(4.978.546,00)
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.830.720,00	15.299.685,00	(10.468.965,00)
14	Badan Pendapatan Daerah	14.686.835,00	347.410,00	14.339.425,00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.170.490,00	86.440.300,00	(81.269.810,00)
16	Kecamatan Benua Lima	86.440.300,00	0,00	86.440.300,00
	Jumlah Persediaan	19.072.380.101,17	17.909.254.922,54	1.163.125.178,63

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang di Tahun Anggaran 2023 ada penambahan sebesar Rp10.775.000.000,00 ke Bank Kalteng sehingga nilai Investasi Jangka Panjang tahun 2023 menjadi Rp86.950.000.000,00 yang di tahun 2022 senilai Rp76.175.000.000,00 dengan komposisi sebagaimana berikut.

Tabel 102. Investasi Jangka Pendek

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	Bank Pembangunan Daerah Kalteng (Cost Method)		
	Saldo Awal	64.000.000.000,00	75.075.000.000,00
	Penambahan Tahun Berjalan	11.075.000.000,00	10.775.000.000,00
	Saldo Akhir	75.075.000.000,00	85.850.000.000,00
2	PDAM Kab. Barito Timur (Equity Method)		
	Penyertaan Sebelum Penyesuaian Laba/(Rugi)	7.027.898.639,00	7.025.898.639,00
	Penyesuaian Nilai Penyertaan Modal (Hasil Koreksi)	7.025.898.639,00	7.025.898.639,00
	Penambahan Tahun Berjalan/HibahTYL	2.821.452.037,00	2.821.452.037,00
	Penyertaan Modal Setelah Rekonsiliasi	9.847.350.676,00	9.847.350.676,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
	Penyesuaian PMP dari Akumulasi Laba/(Rugi):	(23.437.868.230,00)	(21.429.220.390,00)
	Akumulasi Saldo Laba/(Rugi) Tahun yang Lalu	(23.437.868.230,00)	(3.573.900.000,00)
	Koreksi Akumulasi Saldo Laba/(Rugi) Tahun yang Lalu	-	-
	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(1.744.900.142,00)	(189.189.230,00)
	Akumulasi Saldo Laba/(Rugi) s.d Akhir Tahun Berjalan	(23.437.868.230,00)	(25.182.768.372,00)
	Defisit Kerugian Kegiatan Operasional	(1.821.889.370,00)	(67.112.949,00)
3	PD. Janang (Cost Method)		
	Saldo Awal	100.000.000,00	100.000.000,00
	Penambahan Tahun Berjalan	-	-
	Saldo Akhir	100.000.000,00	100.000.000,00
4	PT. Jamrida Kalteng (Cost Method)		
	Saldo Awal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penambahan Tahun Berjalan	-	-
	Saldo Akhir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	76.175.000.000,00	86.950.000.000,00

PD. Janang sudah sangat lama tidak beroperasi, Dewan Direksi pun sudah tidak teridentifikasi, namun dalam Daftar masih dicantumkan karena pembubaran memerlukan Peraturan Daerah, sedangkan untuk PDAM yang menggunakan Equity Method sehingga nilai Penyertaan Modal tidak mempengaruhi apa-apa dan pada saat selesainya penyusunan LKPD TA 2023, Laporan Keuangan PDAM audited belum terbit.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.186.326.106.562,92 dan Rp1.084.898.008.150,79, dengan rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 103. Aset Tetap

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Aset Tetap	1.186.326.106.562,92	1.084.898.008.150,79	101.428.098.412,13
Tanah	238.166.115.999,00	239.970.121.099,00	(1.804.005.100,00)
Peralatan dan Mesin	366.422.958.835,72	348.110.546.785,52	18.312.412.050,20
Gedung dan Bangunan	612.277.542.968,28	564.911.913.612,28	47.365.629.356,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.001.460.820.384,85	864.851.885.978,51	136.608.934.406,34
Aset Tetap Lainnya	25.499.766.412,46	24.163.472.206,46	1.336.294.206,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.684.195.982,05	4.770.691.278,00	22.913.504.704,05



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Akumulasi Penyusutan	(1.085.185.294.019,44)	(961.880.622.808,98)	(123.304.671.210,46)

5.3.1.3.1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp238.166.115.999,00 dan Rp239.970.121.099,00. Nilai Aset Tetap Tanah serta mutasi tambah dan kurang atas penyebab selisihnya. Berikut nilai tanah per SKPD.

Tabel 104. Aset Tetap Tanah

Mutasi Tanah	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Realisasi Belanja Modal Tanah	0	
Hibah ke Rutan Negara kelas II B pada Sekretariat Daerah		1.803.745.000,00
Hibah ke POS Induk PJR Polda Kalteng pada Dinas Perhubungan		260.100,00
Jumlah Mutasi (tidak termasuk dari Belanja Modal)		1.804.005.100,00
Selisih pada Prosedur Analitis	1.804.005.100,00	

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
1	Dinas Pendidikan	17.423.366.510,00	17.423.366.510,00
2	Dinas Kesehatan	2.162.880.842,00	2.162.880.842,00
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	2.865.900.000,00	2.865.900.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	140.634.542.625,00	140.634.542.625,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	507.393.000,00	507.393.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	442.075.000,00	442.075.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1.457.769.250,00	1.457.769.250,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	518.193.036,00	518.193.036,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.000.000,00	135.000.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	154.573.000,00	154.573.000,00
11	Dinas Perhubungan	37.51.475.132,00	3.751.735.232,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.856.000,00	49.856.000,00
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.444.224.600,00	1.444.224.600,00
14	Dinas Perikanan dan Peternakan	19.320.441.388,00	19.320.441.388,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.849.368.488,00	11.849.368.488,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.532.189.300,00	11.532.189.300,00
17	Sekretariat Daerah	14.880.813.088,00	16.684.558.088,00
18	Inspektorat	1.051.250.000,00	1.051.250.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	540.000.000,00	540.000.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	281.937.600,00	281.937.600,00
21	Badan Pendapatan Daerah	176.342.840,00	176.342.840,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86.424.300,00	86.424.300,00
23	Sekretariat DPRD	599.760.000,00	599.760.000,00
24	Kecamatan Dusun Tengah	1.379.907.000,00	1.379.907.000,00
25	Kecamatan Pematang Karau	175.450.000,00	175.450.000,00
26	Kecamatan Awang	116.990.000,00	116.990.000,00
27	Kecamatan Patangkep Tutui	679.871.100,00	679.871.100,00
28	Kecamatan Dusun Timur	303.639.000,00	303.639.000,00
29	Kecamatan Benua Lima	2.218.042.900,00	2.218.042.900,00
30	Kecamatan Paku	204.440.000,00	204.440.000,00
31	Kecamatan Paju Epat	682.000.000,00	682.000.000,00
32	Kecamatan Raren Batuah	190.000.000,00	190.000.000,00
33	Kecamatan Karusen Janang	50.000.000,00	50.000.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000.000,00	300.000.000,00
	Jumlah	238.166.115.999,00	239.970.121.099,00

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp366.422.958.835,72 dan Rp348.110.546.785,52. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 ada penambahan dari Belanja, Hibah dan mutasi tambah lainnya dibandingkan tahun 2022 dengan nilai per SKPD sebagaimana berikut.



Tabel 105. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Mutasi Peralatan dan Mesin	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.045.840.294,00	
Hibah dari BNPB ke BPBD Rp667.600.000,00 Menkes ke Dinkes Rp1.318.650.000,00 dan Bank BRI ke RSUD Rp61.060.000,00 dari Satdikdas ke Disdik Rp20.920.000,00	2.068.230.000,00	
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Rp48.419.400,00, Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan Rp 89.200.680,00, Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Bapenda Rp 3.349.500,00 Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Kec. Awang Rp8.000.000,00 serta Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Rp 30,654,510,00	179.624.090,00	
Kapitalisasi dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Disdukcapil Rp2.120.000,00, Badan Pendapatan Daerah Rp.2.040.000,00 Dinas Kesehatan Rp129.771.600,00, DISDAGKOP Rp199.883.250,00, Setda Rp179.950.000,00, Bupar Rp19.400.000,00 dan Kec. DUSTENG Rp3.400.000,00	536.564.850,00	
Penyesuaian Saldo Awal pada Disdukcapil	1,00	
Penghapusan BMD akbibat dari Penjualan BMD, Dinas Kesehatan Rp346.500.000,00 Setda Rp2.749.161.500,00, BPKAD Rp342.628.000,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah Rp425.062.000,00		3.863.351.500,00
Belanja Modal tidak membentuk Aset Tetap yang merupakan Barang Habis Pakai pada Dinas Perikanan dan Peternakan Rp208.911.780,00, Dinas Kesehatan Rp12.750.000,00, DLH Rp24.236.850,00 dan Disdik Rp2.500.000,00		248.398.630,00
Ekstra Kompatabel pada Dinas Kesehatan Rp5.350.000,00 RSUD Rp13.531.560,00 Sekretariat Daerah Rp24.309.000,00, DLH Rp38.447.050,00, BUDPAR Rp1.425.000,00, Dinas Perikanan Rp27.533.375,00, Kec. Awang Rp13.462.500,00, Kec. Paku Rp12.325.500,00 serta Dinas Pendidikan Rp622.945.949,80		759.962.634,80
Dalam Proses Hibah ke Sekolah Swasta sehingga direklasifikasi ke Persediaan pada DPMSOS Rp92.334.420,00 serta pada Setda Hibah ke GNOTA dan MPH Sinode Sesuai SK Penghapusan Hibah Peralatan dan mesin Nomor 180/(407/408)/HUK/23 Setda Rp553.800.000,00		646.134.420,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Mutasi (tidak termasuk dari Belanja Modal)	2.784.418.941,00	5.517.847.184,80
Selisih Prosedur Analitis		2.733.428.243,80

Tabel 106. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
1	Dinas Pendidikan	55.299.250.524,21	50.120.451.464,01
2	Dinas Kesehatan	60.233.420.526,00	55.132.362.390,00
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	63.594.756.518,72	60.358.944.198,72
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.323.565.461,08	13.081.594.261,08
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.153.378.834,00	2.089.378.834,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	8.419.080.315,00	7.649.330.315,00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	3.974.397.445,00	3.902.203.045,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.543.355.245,00	6.543.355.245,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	14.841.639.725,00	13.072.867.625,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.255.387.706,98	3.948.470.205,98
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	1.849.207.564,00	1.824.757.564,00
12	Dinas Perhubungan	13.252.986.156,67	13.163.421.699,67
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2.435.166.498,08	2.229.380.998,08
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.319.553.517,00	1.295.203.517,00
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2.415.179.647,00	2.291.427.548,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.774.361.474,95	1.577.281.939,95
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.371.499.492,34	6.738.222.482,34
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.293.501.395,47	7.865.403.045,47
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.969.634.549,59	4.666.361.299,59
20	Sekretariat Daerah	40.724.553.675,00	42.648.119.345,00
21	Inspektorat	2.228.937.770,00	2.179.853.640,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.824.936.045,00	3.990.263.745,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.414.412.211,07	12.321.363.961,07



No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
24	Badan Pendapatan Daerah	3.316.321.290,00	3.247.583.010,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.342.156.100,00	2.279.931.900,00
26	Sekretariat DPRD	11.935.749.380,56	11.263.471.030,56
27	Kecamatan Dusun Tengah	1.552.439.005,00	1.470.211.695,00
28	Kecamatan Pematang Karau	1.157.819.145,00	1.129.927.100,00
29	Kecamatan Awang	1.172.538.560,00	1.112.425.628,00
30	Kecamatan Patangkep Tutui	950.308.360,00	898.575.000,00
31	Kecamatan Dusun Timur	1.655.537.540,00	1.579.848.540,00
32	Kecamatan Benua Lima	1.456.496.705,00	1.381.876.955,00
33	Kecamatan Paku	906.378.098,00	859.233.598,00
34	Kecamatan Paju Epat	864.081.160,00	834.325.810,00
35	Kecamatan Raren Batuah	934.844.300,00	911.753.300,00
36	Kecamatan Karusen Janang	959.246.700,00	901.504.700,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.706.880.195,00	1.549.860.150,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin	366.422.958.835,72	348.110.546.785,52

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp612.277.542.968,28 dan Rp564.911.913.612,28. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 ada penambahan dari Belanja, Hibah dan mutasi tambah lainnya dibandingkan tahun 2022 dengan nilai per SKPD sebagaimana berikut.

Tabel 107. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Mutasi Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.140.779.038,98	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan, Perencanaan dan Pengawasan) pada BPBDDamkar Rp32.000.000,00 Sekda Rp374.600.000,00 Disnakertrans Rp147.000.000,00 DLH Rp99.750.000,00 Dinas Kominfo Rp74.844.500,00 Budpar Rp69.300.000,00 Dinas Perpustakaan Rp149.800.000,00 Dinas Pertanian Rp814.382.076,0000 Inspektorat Rp315.938.400,00 Bappenda Rp72.670.000,00 Kec P Karau Rp48.850.000,00 Kec Paku Rp122.540.198,00 Kec K Janang Rp46.440.000,00 Disdik Rp3.886.501.712,00 dan Didakkop Rp7.500.000 serta DPUPR Rp2.917.117.161,00	9.179.234.047,00	



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Mutasi Gedung dan Bangunan	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Koreksi Saldo Awal	0,02	
Reklasifikasi pada Dinas Perikanan belanja modal gedung dan bangunan ke JIJ Rp138.820.000,00 Dinas Kesehatan aset tetap Gedung & Bangunan ke Aset tetap Peralatan dan Mesin Rp89.200.680,00 Dinas Pendidikan belanja modal gedung dan bangunan ke aset tetap peralatan dan mesin Rp47.219.400,00		275.240.080,00
Dalam Proses Hibah ke Sekolah Swasta sehingga direklasifikasi ke Persediaan pada Dinas Pendidikan Rp537.755.800,00 DPUPR Hibah aset tetap Gedung & Bangunan ke Pemdes Takum Rp142.600.000,00 Dinas Perikanan Hibah aset tetap Gedung & Bangunan ke Masyarakat Rp1.996.658.950,00		2.677.014.750,00
Ekstra Kompatbel pada Dinas Pendidikan		2.128.900,00
Jumlah Mutasi (tidak termasuk dari Belanja Modal)	9.179.234.047,02	2.954.383.730,00
Selisih Prosedur Analitis		6.224.850.317,02

Tabel 108. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
1	Dinas Pendidikan	205.927.019.740,39	180.535.415.179,39
2	Dinas Kesehatan	85.868.914.689,38	74.651.272.201,38
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	28.515.091.234,00	27.333.676.484,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	57.022.990.049,86	53.515.683.449,86
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.309.972.900,00	1.309.972.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	3.538.637.018,00	3.506.637.018,00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	8.592.641.063,00	8.445.641.063,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.488.834.337,00	3.488.834.337,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	4.058.880.696,00	3.959.130.696,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.530.128.460,00	1.530.128.460,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	2.618.738.683,00	2.422.988.683,00
12	Dinas Perhubungan	10.596.835.738,00	10.596.835.738,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	503.994.500,00	180.100.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.816.790.480,00	1.816.790.480,00
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	14.766.909.507,00	14.697.609.507,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.068.873.800,00	919.073.800,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	11.925.909.582,00	11.726.409.582,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.672.799.586,85	17.858.417.510,85
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.095.241.890,99	23.937.941.890,99
20	Sekretariat Daerah	73.107.913.320,89	70.353.479.860,89
21	Inspektorat	2.745.923.597,00	2.429.985.197,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	5.382.805.954,00	5.382.805.954,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.663.693.075,00	6.574.993.075,00
24	Badan Pendapatan Daerah	2.547.809.694,00	2.276.306.194,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.718.544.453,00	2.718.544.453,00
26	Sekretariat DPRD	9.367.385.083,42	9.367.385.083,42
27	Kecamatan Dusun Tengah	6.524.595.960,50	6.400.115.960,50
28	Kecamatan Pematang Karau	1.115.545.808,00	1.066.695.808,00
29	Kecamatan Awang	1.827.031.308,00	1.827.031.308,00
30	Kecamatan Patangkep Tutui	1.070.007.808,00	1.070.007.808,00
31	Kecamatan Dusun Timur	2.436.622.019,00	2.436.622.019,00
32	Kecamatan Benua Lima	4.154.599.941,00	4.048.501.118,00
33	Kecamatan Paku	1.391.151.247,00	1.268.611.049,00
34	Kecamatan Paju Epat	1.264.033.982,00	1.264.033.982,00
35	Kecamatan Raren Batuah	1.354.991.549,00	1.354.991.549,00
36	Kecamatan Karusen Janang	1.272.326.363,00	1.225.886.363,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.413.357.850,00	1.413.357.850,00
	Jumlah Gedung dan Bangunan	612.277.542.968,28	564.911.913.612,28

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.001.460.820.384,85 dan Rp864.851.885.978,51. Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 ada penambahan dari



Belanja, Hibah dan mutasi tambah lainnya dibandingkan tahun 2022 dengan nilai per SKPD sebagaimana berikut.

Tabel 109. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.082.480.220,39	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Perencanaan dan Pengawasan) pada Dinas Kesehatan Rp1.648.350.000,00 serta pada DPUPR Rp22.604.162.253,00,00	24.252.512.253,00	
Reklasifikasi dari dari tetap Gedung & Bangunan ke Aset tetap Jalan Irigasi & Jaringan pada Dinas Perikanan	138.820.000,00	
Belanja Modal yang tidak membentuk Aset Tetap pada DPUPR karena merupakan pemeliharaan dan normalisasi sungai		2.746.128.863,00
Reklasifikasi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Reklas dari belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan Rp5.550.000,00ke Perlatan dan Mesin serta DPUPR Reklas Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke KDP Karena putus kontrak Rp22.913.504.704,03		22.919.054.704,05
Proses Hibah Aset Tetap Jalan Irigasi & Jaringan ke Polres Bartim		199.694.500,00
Jumlah Mutasi (tidak termasuk dari Belanja Modal)	24.391.332.253,00	25.864.878.067,05
Selisih Prosedur Analitis		1.473.545.814,05

Tabel 110. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
1	Dinas Pendidikan	194.317.739,00	194.317.739,00
2	Dinas Kesehatan	8.133.782.395,00	6.485.432.395,00
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	2.702.147.766,00	2.502.347.300,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	958.426.419.299,61	824.127.459.934,27
5	Satuan Polisi Pamong Praja	207.850.000,00	207.850.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	363.811.200,00	363.811.200,00
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1.590.514.849,00	1.590.514.849,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	196.590.000,00	196.590.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.711.263.384,00	1.711.263.384,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	614.842.853,00	614.842.853,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	832.310.750,00	832.310.750,00
12	Dinas Perhubungan	1.799.774.836,00	1.799.774.836,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	624.209.658,00	624.209.658,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000.000,00	15.000.000,00
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	256.979.000,00	256.979.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.792.000,00	14.792.000,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	8.991.903.180,24	8.754.828.605,24
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.714.393.945,00	1.714.393.945,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	599.168.000,00	599.168.000,00
20	Sekretariat Daerah	5.485.823.844,00	5.485.823.844,00
21	Inspektorat	296.572.200,00	296.572.200,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	1.281.904.375,00	1.281.904.375,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	976.330.361,00	976.330.361,00
24	Badan Pendapatan Daerah	306.308.700,00	306.308.700,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	890.394.090,00	890.394.090,00
26	Sekretariat DPRD	1.446.743.660,00	1.446.743.660,00
27	Kecamatan Dusun Tengah	482.200.900,00	383.650.900,00
28	Kecamatan Pematang Karau	22.023.500,00	22.023.500,00
29	Kecamatan Patangkep Tutui	15.000.000,00	15.000.000,00
30	Kecamatan Paju Epat	15.000.000,00	15.000.000,00
31	Kecamatan Dusun Timur	164.000.000,00	164.000.000,00
32	Kecamatan Benua Lima	621.850.200,00	495.650.200,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	466.597.700,00	466.597.700,00
	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.001.460.820.384,85	864.851.885.978,51

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.499.766.412,46 dan Rp24.163.472.206,46. Nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya tahun 2023 beserta Mutasi tambah dan kurang sehingga menjelaskan penyebab selisih, berikut nilai per SKPD sebagaimana berikut.

Tabel 111. Aset Tetap Lainnya

Mutasi Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.091.448.206,00	
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri untuk SD/SMP dan PAUD	20.330.000,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa pada DPUPR	556.461.000,00	
Hibah Aset Tetap Lainnya berupa Alat Musik ke GKE pada Sekda		57.420.000,00
Tidak Membentuk BMD (Setda)		117.715.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Reklas Aset tetap peralatan mesin dan ATB ke Aset Tetap Lainnya pada Bappenda Rp101.349.500.00 Disdik Rp1.200.000.00 Dinas Perikanan Rp25.104.510.00 Kec Awang Rp8.000.000.00		135.654.010,00
Ekstra Kompatabel pada Dinas Perikanan dan Peternakan		21.155.490,00
Jumlah Mutasi (tidak termasuk dari Belanja Modal)	576.791.000,00	331.945.000,00
Selisih Prosedur Analitis		244.846.000,00

Tabel 112. Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
1	Dinas Pendidikan	16.188.705.719,89	15.351.452.513,89
2	Dinas Kesehatan	69.935.000,00	69.935.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.841.769.362,00	5.285.308.362,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.839.250,00	3.839.250,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	97.061.800,00	97.061.800,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	686.349.450,00	686.349.450,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	250.000,00	250.000,00
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	425.740.000,00	425.740.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	947.432.730,65	947.432.730,65
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	392.080.000,00	392.080.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.000.000,00	20.000.000,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75.000.000,00	75.000.000,00
13	Sekretariat Daerah	320.246.000,00	377.666.000,00
14	Inspektorat	53.889.100,00	53.889.100,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	196.037.500,00	196.037.500,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.485.000,00	49.485.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.900.000,00	12.900.000,00
18	Sekretariat DPRD	114.005.499,92	114.005.499,92
19	Kecamatan Karusen Janang	990.000,00	990.000,00
20	Kecamatan Dusun Timur	500.000,00	500.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.550.000,00	3.550.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	25.499.766.412,46	24.163.472.206,46



5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.684.195.982,05 dan Rp4.770.691.278,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 mengalami penambahan nilai dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai per SKPD sebagaimana berikut.

Tabel 113. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Tahun 2023	
	Bertambah	Berkurang
Reklas dari Aset Tetap JIJ yang belum selesai kontrak DPUPR	22.913.504.704,05	
Jumlah Mutasi	22.913.504.704,05	
Selisih Prosedur Analitis		22.913.504.704,05

Tabel 114. Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

No.	SKPD	Tahun	
		2023	2022
1	Dinas Kesehatan	2.012.927.219,00	2.012.927.219,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.584.365.552,05	1.670.860.848,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69.206.000,00	69.206.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	318.207.200,00	318.207.200,00
5	Sekretariat Daerah	112.379.000,00	112.379.000,00
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	65.911.000,00	65.911.000,00
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	521.200.011,00	521.200.011,00
	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	27.684.195.982,05	4.770.691.278,00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.085.185.294.019,44. Saldo tersebut mengalami kenaikan dari saldo per 31 Desember 2022 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp961.880.622.808,98. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan, sebagaimana berikut.

Tabel 115. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Akumulasi Penyusutan	(1.085.185.294.019,44)	(961.880.622.808,98)	(123.304.671.210,46)
Akumulasi Penyusutan – Peralatan dan Mesin	(304.790.163.565,83)	(282.911.695.124,58)	(21.878.468.441,25)
Akumulasi Penyusutan – Gedung dan Bangunan	(342.745.488.612,83)	(307.835.119.167,40)	(34.910.369.445,43)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Akumulasi Penyusutan – Jalan, Irigasi dan Jaringan	(437.649.641.840,78)	(371.133.808.517,00)	(66.515.833.323,78)

Akumulasi Penyusutan per SKPD disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 116. Akumulasi Penyusutan per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	(143.601.739.443,84)	(126.965.669.023,41)	(16.636.070.420,43)
2	Dinas Kesehatan	(101.174.710.486,00)	(90.234.934.214,50)	(10.939.776.271,50)
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	(65.004.406.465,50)	(55.538.478.689,50)	(9.465.927.776,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(444.361.007.120,86)	(376.902.963.884,08)	(67.458.043.236,78)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.843.012.912,00)	(2.732.991.076,00)	(110.021.836,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	(9.787.534.181,00)	(9.040.866.336,00)	(746.667.845,00)
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	(11.845.948.936,00)	(11.171.366.543,00)	(674.582.393,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(6.970.162.556,00)	(6.385.599.188,00)	(584.563.368,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(15.119.901.189,00)	(14.251.360.849,00)	(868.540.340,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.330.599.243,98)	(4.926.579.503,98)	(404.019.740,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	(4.154.800.516,00)	(3.965.599.869,00)	(189.200.647,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
12	Dinas Perhubungan	(20.725.782.992,45)	(19.611.910.665,45)	(1.113.872.327,00)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	(2.858.116.158,08)	(2.645.005.069,08)	(213.111.089,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.371.893.895,00)	(2.240.523.564,00)	(131.370.331,00)
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	(9.539.279.491,00)	(8.653.614.638,00)	(885.664.853,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.179.010.475,95)	(2.034.080.410,95)	(144.930.065,00)
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	(19.481.954.966,34)	(17.906.832.510,34)	(1.575.122.456,00)
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(21.125.631.007,47)	(19.548.303.033,47)	(1.577.327.974,00)
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(17.487.145.081,59)	(16.072.893.558,59)	(1.414.251.523,00)
20	Sekretariat Daerah	(93.237.092.447,33)	(89.351.434.914,00)	(3.885.657.533,33)
21	Inspektorat	(4.417.785.614,00)	(4.186.447.422,00)	(231.338.192,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	(8.490.520.728,00)	(8.414.711.293,00)	(75.809.435,00)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(14.289.701.192,07)	(13.411.921.944,07)	(877.779.248,00)
24	Badan Pendapatan Daerah	(5.115.645.294,00)	(4.860.241.294,00)	(255.404.000,00)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.552.362.662,00)	(4.324.833.068,00)	(227.529.594,00)
26	Sekretariat DPRD	(21.597.604.268,98)	(20.738.923.224,56)	(858.681.044,42)
27	Kecamatan Dusun Tengah	(4.153.785.611,00)	(3.651.646.382,00)	(502.139.229,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
28	Kecamatan Pematang Karau	(1.991.517.911,00)	(1.886.185.892,00)	(105.332.019,00)
29	Kecamatan Awang	(2.161.521.133,00)	(2.069.561.426,00)	(91.959.707,00)
30	Kecamatan Patangkep Tutui	(1.729.940.312,00)	(1.668.355.723,00)	(61.584.589,00)
31	Kecamatan Dusun Timur	(2.850.501.014,00)	(2.662.712.800,00)	(187.788.214,00)
32	Kecamatan Benua Lima	(4.607.290.694,00)	(4.383.283.815,00)	(224.006.879,00)
33	Kecamatan Paku	(1.699.434.048,00)	(1.567.847.376,00)	(131.586.672,00)
34	Kecamatan Paju Epat	(1.706.857.207,00)	(1.609.622.963,00)	(97.234.244,00)
35	Kecamatan Raren Batuah	(1.871.037.985,00)	(1.761.170.498,00)	(109.867.487,00)
36	Kecamatan Karusen Janang	(1.650.851.502,00)	(1.550.396.115,00)	(100.455.387,00)
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.099.207.278,00)	(2.951.754.033,00)	(147.453.245,00)
	Akumulasi Penyusutan	(1.085.185.294.019,44)	(961.880.622.808,98)	(123.304.671.210,46)

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp222.948.575.420,62 dan Rp65.475.905.223,50. Struktur Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 117. Aset Lainnya

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Aset Lainnya	222.948.575.420,62	65.475.905.223,50	157.472.670.197,12
Tagihan Penjualan Angsuran	543.000.000,00	575.500.000,00	(32.500.000,00)
Tuntutan Ganti Rugi	1.606.164.689,67	1.995.686.833,55	(389.522.143,88)
Aset Tidak Berwujud	1.546.236.200,00	1.448.236.200,00	98.000.000,00
Aset Dalam Keadaan Rusak Berat	60.083.068.112,00	62.771.826.377,00	(2.688.758.265,00)
Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	7.049.251.734,79	7.049.251.734,79	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.287.398.640,00)	(1.244.190.000,00)	(43.208.640,00)



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.811.421.675,84)	(20.345.444.110,84)	2.534.022.435,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	171.219.675.000,00	13.225.038.189,00	157.994.636.811,00

1. Tagih Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan atas penyaluran alat-alat pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa *hand tractor* yang diperuntukkan untuk para petani dengan cara penjualan cicilan. Atas penyaluran alat pertanian tersebut, petani memiliki kewajiban untuk mengangsur setelah musim panen. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal setelah dikurangi dengan pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh petani ke Kas Daerah. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 118. Tagihan Penjualan Angsuran

Jenis	2022	Mutasi Tahun 2023		2023
		Penambahan	Angsuran	
Hand Tractor	548.000.000,00	0,00	32.500.000,00	515.500.000,00
Pompa Air	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Power Trasher	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
Jumlah	575.500.000,00	0,00	32.500.000,00	543.000.000,00

2. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh ASN atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Angsuran Taspem setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh ASN yang bersangkutan ke Kas Daerah. Saldo TGR Tahun 2022 senilai Rp1.995.686.833,55 di tahun 2023 menjadi Rp1.606.164.689,67.

3. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.546.236.200,00 dan Rp1.448.236.200,00. Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan atas adanya penambahan perolehan atas pengadaan software serta ada penambahan Software BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah.

4. Aset Dalam Keadaan Rusak Berat

Saldo Aset Dalam Keadaan Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp60.083.068.112,00 dan Rp62.771.826.377,00. Nilai Aset dalam Keadaan Rusak Berat per 31 Desember



2023 senilai Rp60.083.091.112,00 merupakan akumulasi perubahan status dari aset tetap ke aset lain-lain.

5. Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
Saldo Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.049.251.734,79 dan Rp7.049.251.734,79 yang terdiri dari:
 - a. Aset yang tidak diketahui Keberadaannya sebesar Rp2.304.882.802,84 masih sama seperti tahun sebelumnya dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 119. Aset yang tidak diketahui Keberadaannya per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Ketahanan Pangan	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	2.234.762.802,84	2.234.762.802,84	0,00
3	Kecamatan Paku	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.670.000,00	44.670.000,00	0,00
	Aset Yang Tidak Diketahui Keberadaannya	2.304.882.802,84	2.304.882.802,84	0,00

- b. Aset dalam Proses Penyerahan dan Penghapusan senilai Rp4.744.368.931,95 merupakan usulan SKPD untuk proses penilaian yang pada akhirnya bertujuan untuk dilakukan penghapusan.
6. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)
Sesuai Nota Dinas Nomor ND-202/PB.6/2023 dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/ Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang dicatat pada Aset Lainnya, Nilai Pokok yang berada pada TDF untuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp171.219.675.000,00 yang merupakan Penyaluran dari RKUN ke TDF dalam bentuk Non Tunai dengan masa jatuh tempo 31 Maret 2024.
7. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.287.398.640,00 dan Rp1.244.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 120. Aset yang tidak diketahui Keberadaannya per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	RSUD Tamiang Layang	(199.705.000,00)	(199.705.000,00)	0,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(17.000.000,00)	(17.000.000,00)	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
3	Dinas Perhubungan	(30.000.000,00)	(30.000.000,00)	0,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(117.788.000,00)	(117.788.000,00)	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	0,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(15.996.000,00)	(11.997.000,00)	(3.999.000,00)
7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	(392.400.000,00)	(392.400.000,00)	0,00
8	Badan Pendapatan Daerah	(337.729.640,00)	(298.520.000,00)	(39.209.640,00)
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(170.280.000,00)	(170.280.000,00)	0,00
10	Kecamatan Raren Batuah	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	0,00
Akumulasi Amortisasi		(1.287.398.640,00)	(1.244.190.000,00)	(43.208.640,00)

8. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya senilai Rp17.811.421.675,84 merupakan hasil reklasifikasi dari akumulasi penyusutan pada aset tetap yang berstatus rusak berat.

Tabel 121. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	SKPD	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan	(142.074.325,00)	(60.074.325,00)
2	Dinas Kesehatan	(653.757.383,00)	(461.531.500,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang	(895.543.200,00)	(91.638.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	(11.235.022.000,00)	(11.235.022.000,00)
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(85.333.800,00)	(85.333.800,00)
6	Dinas Perhubungan	(322.373.503,00)	(322.373.503,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(222.990.073,00)	(222.990.073,00)
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	(253.500.000,00)	(104.465.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		Tahun 2022	Tahun 2023
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	(104.400.000,00)	-
11	Dinas Perikanan dan Peternakan	(128.910.750,00)	(75.376.750,00)
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(605.081.164,50)	(605.081.164,50)
13	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(34.329.000,00)	(34.329.000,00)
14	Sekretariat Daerah	(2.590.303.563,00)	(1.866.292.461,00)
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(2.090.340.702,84)	(2.040.642.702,84)
16	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	(191.300.000,00)	(85.825.000,00)
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(147.145.250,00)	-
18	Badan Pendapatan Daerah	(40.710.000,00)	(3.975.000,00)
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(34.017.500,00)	(34.017.500,00)
20	Inspektorat	(12.450.000,00)	(12.450.000,00)
21	Kecamatan Dusun Tengah	(147.544.709,00)	(118.888.709,00)
22	Kecamatan Pematang Karau	(41.461.150,00)	(41.461.150,00)
23	Kecamatan Awang	(16.500.000,00)	(16.500.000,00)
24	Kecamatan Patangkep Tutui	(85.333.800,00)	(39.711.800,00)
25	Kecamatan Dusun Timur	(11.580.000,00)	-
26	Kecamatan Paku	(10.875.000,00)	(10.875.000,00)
27	Kecamatan Paju Epat	(118.216.175,00)	(118.216.175,00)
28	Kecamatan Raren Batuah	(2.774.375,00)	(2.774.375,00)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(116.576.687,50)	(116.576.687,50)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(20.345.444.110,84)	(17.811.421.675,84)

5.3.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban pada Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.687.183.873,86 dan Rp3.586.518.201,86 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 122. Kewajiban

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kewajiban	4.687.183.873,86	3.586.518.201,86	1.100.665.672,00
Kewajiban Jangka Pendek	4.550.065.396,02	3.437.688.165,02	1.112.377.231,00
Kewajiban Jangka Panjang	137.118.477,84	148.830.036,84	(11.711.559,00)



5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.550.065.396,02 dan Rp3.437.688.165,02 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 123. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kewajiban Jangka Pendek	4.550.065.396,02	3.437.688.165,02	1.112.377.231,00
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	51.905.324,02	135.422.062,02	(83.516.738,00)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	7.411.094,00	7.411.094,00	0,00
Utang PPh Pasal 21	6.316.473,02	53.942.791,00	(47.626.317,98)
Utang PPh Pasal 23	4.928.474,00	4.928.474,00	0,00
Utang PPN	28.740.584,00	28.740.584,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	4.508.699,00	4.508.699,00	0,00
Lainnya	0,00	35.890.420,02	(35.890.420,02)
Pendapatan Diterima Dimuka	201.410.795,00	252.598.500,00	(51.187.705,00)
Utang Belanja Pegawai	168.809.652,00	162.537.009,00	6.272.643,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.109.855.079,00	1.787.901.162,00	2.321.953.917,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	18.084.546,00	1.099.229.432,00	(1.081.144.886,00)

Komposisi Utang Belanja Pegawai per SKPD.

Tabel 124. Utang Belanja Pegawai per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	17.987.234,00	154.387.000,00	(136.399.766,00)
2	Dinas Kesehatan	62.055.383,00	6.878.156,00	55.177.227,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.717.006,00	1.271.853,00	5.445.153,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.641.414,00	0,00	4.641.414,00
5	Dinas Perhubungan	4.474.626,00	0,00	4.474.626,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.547.787,00	0,00	1.547.787,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.770.966,00	0,00	6.770.966,00
8	Dinas Perikanan dan Peternakan	11.020.125,00	0,00	11.020.125,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	1.547.787,00	0,00	1.547.787,00
10	Sekretariat Daerah	963.383,00	0,00	963.383,00
11	Sekretariat DPRD	2.927.811,00	0,00	2.927.811,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	9.843.570,00	0,00	9.843.570,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.045.277,00	0,00	5.045.277,00
14	Badan Pendapatan Daerah	4.630.224,00	0,00	4.630.224,00
15	Inspektorat	26.325.855,00	0,00	26.325.855,00
16	Kecamatan Benua Lima	2.311.204,00	0,00	2.311.204,00
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	168.809.652,00	162.537.009,00	6.272.643,00

Daftar Utang Belanja Barang dan Jasa Per SKPD.

Tabel 125. Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	12.460.345,00	9.812.732,00	2.647.613,00
2	Dinas Kesehatan	13.778.778,00	19.739.944,00	(5.961.166,00)
3	BLUD-RSUD	3.749.177.957,00	1.495.906.550,00	2.253.271.407,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.601.757,00	9.247.550,00	2.354.207,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.510.140,00	1.124.690,00	385.450,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	2.611.939,00	1.680.039,00	931.900,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	3.850.078,00	2.133.905,00	1.716.173,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.492.267,0	0,00	3.492.267,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	4.424.438,00	5.899.214,50	(1.474.776,50)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	1.174.476,00	0,00	1.174.476,00
11	Dinas Perhubungan	6.606.387,00		6.606.387,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.727.563,00		3.727.563,00
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	5.120.174,00	2.618.692,00	2.501.482,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.760.670,00	4.547.648,00	213.022,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.612.556,00		1.612.556,00
16	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	4.058.540,00	0,00	4.058.540,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	5.227.320,00	4.059.161,00	1.168.159,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.752.479,00	8.271.903,00	480.576,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	3.293.738,00	0,00	3.293.738,00
20	Sekretariat Daerah	192.587.326,00	183.447.991,00	9.139.335,00
21	DPRD	24.943.879,00	0,00	24.943.879,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	5.283.213,00	2.782.315,00	2.500.898,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17.226.696,00	16.224.466,00	1.002.230,00
24	Badan Pendapatan Daerah	4.667.670,00	6.361.994,50	(1.694.324,50)
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.536.539,00	6.021.006,00	(484.467,00)
26	Inspektorat	3.566.521,00	0,00	3.566.521,00
27	Kecamatan Dusun Tengah	1.708.532,00	1.657.432,00	51.100,00



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
28	Kecamatan Dusun Timur	3.226.126,00	5.947.888,00	(2.721.762,00)
29	Kecamatan Patangkep Tutui	321.300,00	0,00	321.300,00
30	Kecamatan Paku	256.290,00	244.454,00	11.836,00
31	Kecamatan Benua Lima	2.546.704,00	0,00	2.546.704,00
32	Kecamatan Paju Epat	742.681,00	171.587,00	571.094,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	4.109.855.079,00	1.787.901.162,00	2.321.953.917,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Sebesar Rp1.099.229.432,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp980.881.000,00 akibat telah dibayarkannya Utang Jamkesda tahun 2018 sesuai hasil Rekonsiliasi menyepakati nilai menjadi dengan nomor SP2D 000186/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2023 tanggal 31 Juli 2023.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp100.263.886,00 pembayaran dengan nomor SP2D 000295/SP2D-LS/DPUPRPERKIM/2023 tanggal 08 November 2023 dengan nilai Pembayaran 5% Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Sp. Dayu - Sarapat, Tahun Anggaran 2022. Sehingga nilai akhir Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp18.084.546,00 yang merupakan Pemoangan dari nilai bruto SP2D Nomor 0565/BL.DAU/LS-BM/DPUPR/2017 Tanggal 28 Desember 2017 dengan Nilai Bruto Rp147.690.454,00 dan rincian Potongan PPN Rp15.070.455,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Rp3.014.091,00 atas nama CV. Ranu Welum Pusat Ampah, yang diterbitkan BUD terhadap Pajak Fihak Ketiga (yang sebenarnya telah menyetorkan Pajak secara terpisah) dan sampai Tahun 2023 pihak ketiga dimaksud belum ada mengajukan tuntutan penggantian/komplin.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp137.118.477,84 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 126. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kewajiban Jangka Panjang	137.118.477,84	148.830.036,84	(11.711.559,00)
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	137.118.477,84	148.830.036,84	(11.711.559,00)

Pengurangan atas Utang Jangka Panjang diperoleh dari ditandatanganinya pernyataan ASN, Lembaga maupun SKPD yang mempunyai Utang Jangka Panjang dengan daftar sebagai berikut.



Tabel 127. Pengurangan Utang Jangka Panjang

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Tahun
1	Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa atas Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya An. SUKANIATI, SP (Bendahara Pengeluaran)	Sekretariat Daerah	365.000,00	2012
2	Pembayaran Uang Jamianna Pemeliharaan (Retensi) 5 atas Pekerjaan Pengadaan Bangunan/Rehab Panti Asuhan Kasih Ibu Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV. PANCA WARGA Pusat Jaar	Sekretariat Daerah	3.720.000,00	2011
3	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Siring Sungai Sirau Lokasi Kecamatan Dusun Timur An. CV. FIRDAUS MANDIRI Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	3.743.790,00	2012
4	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Nirmalisasi Sungai Pulau Patai Harara Lokasi Desa Pulau Patai Harara Kecamatan Dusun Timur An. CV. SASAMEH Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.400.000,00	2012
5	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pemeliharaan Kantor / Garasi dan Taman Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur An. CV. TEPAT GUNA Pusat Tamiang Layang	Badan Lingkungan Hidup	1.482.769,00	2012
Jumlah Pengurangan Utang Jangka Panjang			11.711.559,00	

Rincian Saldo Utang Jangka Panjang sebagaimana, disajikan sebagai berikut.

Tabel 128. Rincian Kewajiban Jangka Panjang

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Tahun
1	Pembayaran Retensi 5 atas pekerjaan Pembangunan Drainase gang Darso Tamiang Layang an. CV BANGUN SENTOSA ABADI PUSAT TAMIANG LAYANG	Dinas Pekerjaan Umum	2.491.500,00	2011
2	Pembayaran Retensi 5 atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Patianom - Magantis An. CV BANGUN SENTOSA ABADI PUSAT TAMIANG LAYANG	Dinas Pekerjaan Umum	4.997.055,00	2011
3	Pembayaran Uang Jaminan Pemeliharaan (Retensi) 5 Atas Pekerjaan Pembuatan Lining Saluran Tersier BTP-3, Lokasi Desa Tampa Kec. Paku Kab. Barito Timur dan GP3A 'URAN RAYU PAKU' PUSAT TAMPA	Dinas Pekerjaan Umum	2.494.500,00	2011
4	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Mungkur Ju'ung KM. 02 An. CV. KAWWEY PERTIWI Pusat Tampa	Dinas Pekerjaan Umum	4.990.000,00	2012
5	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Gang SATRA II Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV RIO CUNDA Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	4.990.000,00	2012
6	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Siong I Desa Telang Siong Lokasi Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur An. CV KAYRA TAKA Pusat Rodok	Dinas Pekerjaan Umum	4.990.000,00	2012
7	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sarunai RT 12 Km. 2 Tumpa Dayu Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV KAYRA TAKA Pusat Rodok	Dinas Pekerjaan Umum	2.499.000,00	2012
8	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Inspeksi Tampiyua	Dinas Pekerjaan Umum	1.245.000,00	2012



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Tahun
	Kecamatan Dusun Timur An. CV KAWEY PERTIWI Pusat Tampa			
9	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Pekuburan Jemaat GKE Unsum Kecamatan raren Batuah An. CV. PUTRA ANAK NEGERI Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.245.000,00	2012
10	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pianggu (PM2L) Lokasi Desa Pianggu Kecamatan Awang An. CV. ANTANG MANARI Pusat HAYAPING	Dinas Pekerjaan Umum	2.497.500,00	2012
11	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan Siring Kuburan Desa Kalamus Kecamatan Paku An. CV. BINTANG HARAPAN Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.492.500,00	2012
12	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan Siring Lapangan Bola Desa Kalamus Kecamatan Paku An. CV. PUTRA BETHO Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.497.000,00	2012
13	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Rehabilitasi Balai Pertemuan Umum Desa Paku Beto Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur An. CV. BINTANG HARAPAN Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	4.990.000,00	2012
14	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Titian Gang Pijat RT. 6 Muara Plantau Lokasi Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur An. CV. EMPAT PUTRA MANDIRI Pusat Muara Plantau	Dinas Pekerjaan Umum	2.495.000,00	2012
15	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Inspeksi BP.I.D.I Tampa Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur An. CV. PITRI KAMARUDIN Pusat Ampah	Dinas Pekerjaan Umum	2.499.000,00	2012
16	Pembayaran Uang Jaminan Pemeliharaan (Retensi) 5 atas Pekerjaan Pembuatan Lining Saluran Tersier BTP-3 D.I Tampa Kecamatan paku Kabupaten Barito Timur An. CV Gunung SINAI Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.493.900,00	2012
17	Pembayaran Uang Jaminan Pemeliharaan (Retensi 5) atas Pekerjaan Pembuatan gudang Pakan Ranch Mini Bangi An. CV BERKAT Pusat Pasa Panas (DAK)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	598.286,00	2011
18	Pembayaran Uang Jaminan Pemeliharaan (Retensi) 5 atas Pekerjaan Pembuatan gudang Pakan Ranch Mini Bangi Wao An. CV BERKAT Pusat Pasa Panas (Pendamping DAK)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	59.828,00	2011
19	Pembayaran Uang Jaminan Pemeliharaan (Retensi) 5 atas Pekerjaan Pembuatan Kolam Ikan untuk Masyarakat di Tampiyua An. CV ANTANG MANDIRI PUSAT HAYAPING	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1.730.000,00	2011
20	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Umum PKM Ampah Lokasi Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur An. CV. DAYA ANUGERAH Pusat Tamiang Layang	Dinas Kesehatan	2.990.000,00	2012
21	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Rehab Ringan Rumah Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur An. CV. BERKAT TEGAR PERMATAKU Pusat Ampari	Dinas Sosial	1.246.500,00	2012
22	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pemeliharaan Halaman / Pagar Rumah Jabtan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur An. CV FIRDAUS MANDIRI Pusat Tamiang Layang	Sekretariat Dewan	2.465.648,84	2012
23	Pembayaran Retensi 5 atas pekerjaan Pembangunan Drainase Desa pu Mea Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum	4.990.000,00	2013



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Tahun
	Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur An. CV. DILLA Pusat Ampah			
24	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Rehabilitasi / Pembangunan Pagar Pemakaman Muslimin Rt. 01 Magntis Lokasi Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV. BETUNG Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	4.990.000,00	2013
25	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Gang TK Desa Pangkan Lokasi Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur An. DANAU LIMUT PERKASA Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.494.470,00	2013
26	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Hybrida Pulau Bali Desa Dayu Lokasi Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur An. CV. DANAU LIMUT PERKASA Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	2.498.650,00	2013
27	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Tanggul Penagkis Banjir BP8 Sawah Desa Wuram Lokasi Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur An. CV. FISKA MIRANI RAYA Pusat Tampa	Dinas Pekerjaan Umum	2.495.500,00	2013
28	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Magantis RT. 02 Lokasi Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV. PUTRA RUHUT Pusat Magantis	Dinas Pekerjaan Umum	1.245.500,00	2013
29	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Siring / Bronjong Pengaman Jembatan Paku Lokasi Kecamatan paku Kabupaten Barito Timur An. FISKA MIRANI RAYA Pusat Tampa	Dinas Pekerjaan Umum	2.498.950,00	2013
30	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Siring Dusun Eba Raya Lokasi Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV. SASAMEH Pusat Tamiang Layang	Dinas Pekerjaan Umum	4.993.500,00	2013
31	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Siring Sungai RT. 05 Desa Magantis Lokasi Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV. JABAL NOOR Pusat Bambulung	Dinas Pekerjaan Umum	2.497.200,00	2013
32	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Konstruksi Kayu di Bagok Lokasi Kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur An. CV. TEPAT GUNA Pusat Tamiang Layang (DAK dan Pendamping DAK)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	4.985.000,00	2013
33	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Pembuatan Kolam Induk di Balai Benih Ikan (BBI) Netampin Lokasi Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur An. CV. KARYA TAKA Pusat Rodok (DAK dan pendamping DAK)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	6.437.356,00	2013
34	Pembayaran Retensi 5 atas Pekerjaan Rehab Kandang Sapi di Bangi Lokasi Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur An. CV. DAYA ANUGERAH Pusat Tamiang Layang	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	2.494.865,00	2013
35	Utang Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Wakatitir - Layung Hanang An. CV. ASIA TIMUR KONSTRUKSI Pusat Telang Siong, Paket Peerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum 2014	Dinas Pekerjaan Umum	9.992.650,00	2014
36	Utang Retensi 5 atas Pekerjaan Penyelesaian Poskesdes Gudang Seng An. CV. LUMBA-LUMBA Pusat Tamiang Layang, Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan 2014	Dinas Kesehatan	2.482.500,00	2014



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Tahun
37	Utang Retensi 5 atas Pekerjaan Pembangunan Tiang Baliho Kantor An. CV. TENTANG ALU Pusat Tamiang Layang, Paket Pekerjaan pada Dinas Sosial 2014	Dinas Sosial	1.484.210,00	2014
38	Pembayaran 100 atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Rumput, Pupuk, Pengolahan Lahan dan Penanaman Rumput Hijauan Makanan Ternak Lokasi Ranch Mini Bangi Wao Kab. Bartim an. CV. SINAR HARAPAN PUSAT TAMIANG LAYANG (Pendamping DAK)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	4.490.909,00	2011
39	Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Etalase/Promosi, Penambahan Ruang Pencucian Alat di Gedung Pengolahan Hasil, Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pasar Ikan Dayu Lokasi Kab. Bartim An. CV. ARTCEL MALAWEN, CE PUSAT BUNTOK. Berdasarkan KOntrak Nomor : 10/PPK-Bid.PHPA/Distanakan/2013, tanggal 01/06/2013	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	13.500.000,00	2011
40	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis atas Pekerjaan Pembuatan Pagar Terminal Tamiang Layang Lokasi Kecamatan Dusun Timur An. CV. BALINGA PERKASA DESIGN Pusat Palangka Raya	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.550.000,00	2012
Jumlah Utang Jangka Panjang			137.118.477,84	

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Barito Timur berasal dari formulasi dari Aset = Kewajiban + Ekuitas. Rincian saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 129. Ekuitas

No.	Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Aset	1.682.290.180.590,42	1.504.361.005.146,98	177.929.175.443,44
2	Kewajiban	4.687.183.873,86	3.586.518.201,86	1.100.665.672,00
3	Ekuitas	1.677.602.996.716,56	1.500.774.486.945,12	176.828.509.771,44

5.4. Laporan Operasional

5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023. Pendapatan Komposisi Pendapatan-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.062.501.801.376,03 dan Rp883.147.002.433,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130. Pendapatan-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Daerah-LO	1.062.501.801.376,03	883.147.002.433,64	179.354.798.942,39
Pendapatan Asli Daerah-LO	61.624.023.151,03	62.394.156.021,80	(770.132.870,77)



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Transfer-LO	998.727.944.270,00	817.181.333.476,84	181.546.610.793,16
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2.149.833.955,00	3.571.512.935,00	(1.421.678.980,00)

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.624.023.151,03 dan Rp62.394.156.021,80, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 131. Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	61.624.023.151,03	62.394.156.021,80	(770.132.870,77)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	19.786.943.733,04	12.451.795.211,75	7.335.148.521,29
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.973.255.445,00	2.690.823.104,00	282.432.341,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	27.049.142,65	14.158.036.468,00	(14.130.987.325,35)
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	38.836.774.830,34	33.093.501.238,05	5.743.273.592,29

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.786.943.733,04 dan Rp12.451.795.211,75, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Pajak Daerah-LO	19.786.943.733,04	12.451.795.211,75	7.335.148.521,29
Pajak Hotel-LO	66.106.128,00	67.892.261,00	(1.786.133,00)
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	2.171.728.973,00	2.794.350.885,00	(622.621.912,00)
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	13.756.000,00	10.125.000,00	3.631.000,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	360.803.800,00	369.644.337,50	(8.840.537,50)



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	7.509.747.832,00	6.308.722.116,00	1.201.025.716,00
Pajak Parkir-LO	1.150.000,00	1.120.000,00	30.000,00
Pajak Air Tanah-LO	199.940,00	0,00	199.940,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	9.355.000,00	5.450.000,00	3.905.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	492.425.840,04	113.510.279,25	378.915.560,79
Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan-LO	1.664.753.425,00	1.697.251.103,00	(32.497.678,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bngunan-Pemberian Hak Baru	7.496.916.795,00	1.083.729.230,00	6.413.187.565,00

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.973.255.445,00 dan Rp2.690.823.104,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 133. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.973.255.445,00	2.690.823.104,00	282.432.341,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	436.143.000,00	469.819.200,00	(33.676.200,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	16.400.000,00	17.910.000,00	(1.510.000,00)
Retribusi Pelataran-LO	5.742.000,00	10.406.000,00	(4.664.000,00)
Retribusi Los-LO	218.579.000,00	210.526.000,00	8.053.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	86.700.000,00	60.320.000,00	26.380.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya-LO	7.079.000,00	12.249.000,00	(5.170.000,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	44.903.375,00	34.679.700,00	10.223.675,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	315.533.900,00	105.692.200,00	209.841.700,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	25.000.000,00	107.592.000,00	(82.592.000,00)
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	271.620.000,00	186.566.000,00	85.054.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	137.755.000,00	62.199.000,00	75.556.000,00
Retribusi Pemakaian Alat-LO	10.225.000,00	5.840.000,00	4.385.000,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan-LO	858.386.720,00	1.026.325.540,00	(167.938.820,00)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	8.615.000,00	5.969.000,00	2.646.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	32.410.000,00	0,00	32.410.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	42.825.000,00	10.610.000,00	32.215.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	92.099.000,00	3.700.000,00	88.399.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	122.651.280,00	(122.651.280,00)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	300.000,00	24.840.000,00	(24.540.000,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	30.046.000,00	2.852.000,00	27.194.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	72.900.000,00	63.435.000,00	9.465.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	88.964.000,00	70.217.000,00	18.747.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	5.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	164.109.450,00	70.924.184,00	93.185.266

Sedangkan Pendapatan Retribusi-LO per SKPD sebagaimana berikut.



Tabel 134. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	141.525.000,00	62.790.000,00	(328.294.200,00)
2	Dinas Kesehatan	465.993.000,00	469.819.200,00	448.083.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	301.864.450,00	62.199.000,00	291.458.450,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	2.500.000,00	9.000.000,00	(208.026.000,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	17.920.000,00	4.000.000,00	(42.400.000,00)
6	Dinas Perhubungan	186.950.000,00	98.509.000,00	186.950.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	44.903.375,00	34.679.700,00	32.654.375,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	70.924.184,00	(34.679.700,00)
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	38.116.000,00	46.413.000,00	(67.576.200,00)
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	68.764.000,00	92.723.000,00	(38.828.000,00)
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99.725.000,00	86.625.000,00	99.725.000,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.179.248.720,00	1.325.924.820,00	993.682.720,00
13	Sekretariat Daerah	130.500.000,00	76.506.000,00	68.301.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	2.500.000,00	750.000,00	(3.340.000,00)
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.300.000,00	3.600.000,00	(1.020.025.540,00)
16	Badan Pendapatan Daerah	196.798.900,00	79.692.200,00	190.829.900,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.000.000,00	17.000.000,00	9.390.000,00
18	Kecamatan Dusun Tengah	5.800.000,00	115.092.000,00	2.100.000,00
19	Kecamatan Pematang Karau	8.250.000,00	4.300.000,00	(114.401.280,00)



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
20	Kecamatan Awang	5.000.000,00	2.200.000,00	(19.840.000,00)
21	Kecamatan Patangkep Tutui	2.380.000,00	3.520.000,00	2.380.000,00
22	Kecamatan Dusun Timur	15.992.000,00	15.406.000,00	13.140.000,00
23	Kecamatan Benua Lima	5.975.000,00	2.400.000,00	(57.460.000,00)
24	Kecamatan Paku	8.000.000,00	400.000,00	(62.217.000,00)
25	Kecamatan Paju Epat	5.200.000,00	1.550.000,00	(300.000,00)
26	Kecamatan Raren Batuah	4.800.000,00	2.000.000,00	(66.124.184,00)
27	Kecamatan Karusen Janang	8.250.000,00	1.000.000,00	7.250.000,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.973.255.445,00	2.690.823.104,00	282.432.341,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.049.142,65 dan Rp14.158.036.468,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 135. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	27.049.142,65	14.158.036.468,00	(14.130.987.325,35)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	27.049.142,65	14.158.036.468,00	(14.130.987.325,35)

Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sama dengan pada bagian LRA.

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Lain-Lain PAD yang Sah – LO pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp38.836.774.830,34 dan Rp33.093.501.238,05 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 136. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	38.836.774.830,34	33.093.501.238,05	5.743.273.592,29
Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	152.913.200,00	0,00	152.913.200,00
Hasil Penjualan Hewan-LO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah- LO	8.042.463.919,97	4.470.819.617,44	3.571.644.302,53
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	6.786,82	0,00	6.786,82
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	844.763.280,44	1.634.760.260,01	(789.996.979,57)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain- LO	444.789.109,96	178.724.946,94	266.064.163,02
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.034.757.480,10	1.394.597.149,07	1.640.160.331,03
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	235.257,00	0,00	235.257,00
Pendapatan Denda PBBP2- LO	61.858.004,00	66.597.829,00	(4.739.825,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	181.272.309,05	220.560.688,59	(39.288.379,54)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	31.304.220,00	658.872.397,00	(627.568.177,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO	0,00	500.000,00	(500.000,00)
Pendapatan dari BLUD-LO	20.352.154.793,00	20.179.113.891,00	173.040.902,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.676.679.630,00	4.288.843.059,00	1.387.836.571,00
Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD – LO	1.576.840,00	111.400,00	1.465.440,00

Sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah-LO per SKPD sebagaimana berikut ini.



Tabel 137. Lain-Lain PAD yang Sah-LO per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Kesehatan	5.676.877.807,00	4.288.852.046,00	1.388.025.761,00
2	BLUD-RSUD Tamiang Layang	21.076.759.329,57	21.027.367.421,00	49.391.908,57
3	Dinas Perikanan dan Peternakan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.201.872.212,57	2.935.195.158,85	4.266.677.053,72
5	Badan Pendapatan Daerah	4.869.265.481,20	4.842.086.612,20	27.178.869,00
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah-LO	38.836.774.830,34	33.093.501.238,05	5.743.273.592,29

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah antar Daerah. Pendapatan Transfer – LO pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp998.727.944.270,00 dan Rp817.181.333.476,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 138. Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Transfer-LO	998.727.944.270,00	817.181.333.476,84	181.546.610.793,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	942.527.867.439,00	765.670.179.254,00	176.857.688.185,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	0,00	4.984.971.000,00	(4.984.971.000,00)
Pendapatan Transfer antar Daerah-LO	56.200.076.831,00	46.526.183.222,84	9.673.893.608,16

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp942.527.867.439,00 dan Rp765.670.179.254,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 139. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	942.527.867.439,00	765.670.179.254,00	176.857.688.185,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA-LO	349.063.335.000,00	207.477.928.570,00	141.585.406.430,00
DAU-LO	457.131.088.950,00	436.257.086.999,00	20.874.001.951,00
DAK Fisik-LO	52.417.638.397,00	52.354.260.414,00	63.377.983,00
DAK Nonfisik-LO	83.915.805.092,00	69.580.903.271,00	14.334.901.821,00

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 nilai antara LRA dengan LO sebesar Rp171.219.675.000,00 adalah Penyaluran Non Tunai ke *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang uraiannya telah dicantumkan pada penjelasan Aset Lainnya (akun Neraca).

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.984.971.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 140. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat--Lainnya-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapata Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	4.984.971.000,00	(4.984.971.000,00)
Dana Insentif Daerah-LO	0,00	4.984.971.000,00	(4.984.971.000,00)
Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Nol dikarenakan Dana Insentif Daerah tidak mendapatkan anggaran sedangkan Dana Desa sebesar Rp77.935.147.800,00 sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang Jurnal pengakuan penerimaan kas tidak berpasangan dengan Pendapatan-LO melainkan dengan akun Utang.

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp56.200.076.831,00 dan Rp46.526.183.222,84 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 141. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Transfer antar Daerah-LO	56.200.076.831,00	46.526.183.222,84	9.673.893.608,16
Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	56.200.076.831,00	46.526.183.222,84	9.673.893.608,16

Penjelasan Bantuan Keuangan, sama dengan pada bagian LRA.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.149.833.955,00 dan Rp3.571.512.935,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 142. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Lo	2.149.833.955,00	3.571.512.935,00	(1.421.678.980,00)
Pendapatan Hibah-LO	2.149.833.955,00	3.571.512.935,00	(1.421.678.980,00)

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Adapun yang membedakan nilai pada LRA dengan LO sebagaimana Daftar berikut.

Tabel 143. Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Ket
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO (Kendaraan Bermotor Penumpang)	BPBDDAMKAR	498.000.000,00	LO
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO (Kendaraan Bermotor Beroda Dua)	BPBDDAMKAR	64.000.000,00	LO



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	SKPD	Nilai	Ket
3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO (Alat Pendukung Pencarian)	BPBDDAMKAR	105.600.000,00	LO
4	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO (Alat Kedokteran Lainnya)	Dinkes	1.318.650.000,00	LO
5	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO (Obat-obatan Lainnya)	DPPPAKB	77.523.955,00	LO
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO (Alat Pendingin)	BLUD-RSUD	61.060.000,00	LO
7	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	BPKAD	25.000.000,00	LO & LRA
	Jumlah		2.149.833.955,00	

Per Sub rincian obyek, sebagaimana berikut.

Tabel 144. Pendapatan Hibah-LO per Sub Rincian Obyek

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pendapatan Hibah_LO	2.149.833.955,00	3.571.512.935,00	(1.421.678.980,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.986.250.000,00	1.236.487.908,00	749.762.092,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	77.523.955,00	0,00	77.523.955,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	61.060.000,00	2.335.025.027,00	(2.273.965.027,00)

5.4.2. Beban Daerah

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Realisasi Beban pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp882.999.447.135,64 dan Rp813.106.468.063,32 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 145. Beban Daerah

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Daerah-Lo	882.999.447.135,64	813.106.468.063,32	69.892.979.072,32
Beban Operasi-LO	686.023.137.209,18	602.915.468.267,71	83.107.668.941,47
Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	127.635.927.895,46	129.510.684.147,82	(1.874.756.252,36)
Beban Transfer-LO	66.807.194.831,00	73.380.810.577,00	(6.573.615.746,00)



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Tidak Terduga-LO	2.533.187.200,00	7.299.505.070,79	(4.766.317.870,79)

5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah dan Beban Bantuan Sosial. Realisasi Beban Operasi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp686.023.137.209,18 dan Rp602.915.468.267,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 146. Beban Operasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Operasi	686.023.137.209,18	602.915.468.267,71	83.107.668.941,47
Beban Pegawai	351.106.200.312,76	347.561.173.174,09	3.545.027.138,67
Beban Barang dan Jasa	273.879.145.280,65	197.815.626.159,44	76.063.519.121,21
Beban Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Beban Hibah	52.852.672.985,10	53.353.819.037,00	(501.146.051,90)
Beban Bantuan Sosial	2.421.780.000,00	1.754.532.000,00	667.248.000,00
Beban Penyisihan Piutang	2.469.684.403,67	1.027.597.542,18	1.442.086.861,49
Beban Lain-Lain	2.693.654.227,00	802.720.355,00	1.890.933.872,00

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp351.106.200.312,76 dan Rp347.561.173.174,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 147. Beban Pegawai

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Pegawai	351.106.200.312,76	347.561.173.174,09	3.545.027.138,67
Beban Gaji Pokok PNS	170.920.419.552,27	174.384.081.682,47	(3.463.662.130,20)
Beban Gaji Pokok PPPK	11.404.815.800,00	10.373.068.143,00	1.031.747.657,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	15.263.534.686,49	15.652.291.281,12	(388.756.594,63)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	948.637.482,00	843.727.584,00	104.909.898,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	5.636.929.900,00	5.473.344.649,00	163.585.251,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	11.375.022.000,00	11.208.460.000,00	166.562.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.916.345.000,00	2.347.750.000,00	(431.405.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	671.860.000,00	657.030.000,00	14.830.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	9.443.422.480,00	9.830.870.151,00	(387.447.671,00)
Beban Tunjangan Beras PPPK	746.939.880,00	670.319.520,00	76.620.360,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	915.897.554,00	745.918.724,00	169.978.830,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.415.846,00	2.474.158,00	(58.312,00)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	177.354,00	158.776,00	18.578,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	13.583.181.346,00	8.750.926.996,00	4.832.254.350,00
Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	513.083.084,00	400.593.132,00	112.489.952,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	349.951.645,00	358.952.671,00	(9.001.026,00)
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.461.044,00	8.446.236,00	15.014.808,00
Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.049.854.949,00	1.076.858.020,00	(27.003.071,00)
Beban luran Jaminan Kematian PPPK	70.383.132,00	25.338.708,00	45.044.424,00
Beban Tunjangan Khusus	66.600.000,00	131.244.077,00	(64.644.077,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	38.452.965.220,00	42.482.751.226,50	(4.029.786.006,50)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	144.905.783,00	(144.905.783,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	44.250.000,00	(44.250.000,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	154.289.316,00	154.289.316,00	-
Beban TPG PNSD	42.641.865.900,00	43.896.866.408,00	(1.255.000.508,00)
Beban TKG PNSD	681.082.300,00	672.868.160,00	8.214.140,00
Beban Tamsil Guru PNSD	1.339.575.000,00	1.167.500.000,00	172.075.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.145.120.000,00	6.562.002.666,00	583.117.334,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	576.940.000,00	421.836.666,00	155.103.334,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	34.740.000,00	0,00	34.740.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	466.170.000,0	543.500.000,00	(77.330.000,00)
Beban Uang Representasi DPRD	553.665.000,00	561.540.000,00	(7.875.000,00)
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	65.543.100,00	65.795.100,00	(252.000,00)
Beban Tunjangan Beras DPRD	74.524.640,00	66.760.320,00	7.764.320,00
Beban Uang Paket DPRD	47.344.500,00	48.132.000,00	(787.500,00)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	802.814.250,00	814.233.000,00	(11.418.750,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.274.550,00	74.815.650,00	13.458.900,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	15.072.750,00	(15.072.750,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.097.500.000,00	1.890.000.000,00	1.207.500.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	777.000.000,00	453.600.000,00	323.400.000,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	794.786,00	781.036,00	13.750,00
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	46.512.774,00	44.040.528,00	2.472.246,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	2.000.000.000,00	1.033.200.000,00	966.800.000,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.885.000.000,00	2.904.000.000,00	981.000.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	54.600.000,00	(11.700.000,00)
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.610.000,00	7.140.000,00	(1.530.000,00)
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	98.280.000,00	(21.060.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.576.340,00	6.083.280,00	(506.940,00)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.139.492,00	1.151.456,00	(11.964,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.560,00	1.920,00	(360,00)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	160.440.000,00	88.704.000,00	71.736.000,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	375.220.850,00	300.617.400,00	74.603.450,00
Beban Pegawai BOS	2.444.528.000,00	0,00	2.444.528.000,00

Beban Pegawai-LO per SKPD sebagaimana berikut.

Tabel 148. Beban Pegawai per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	167.256.487.578,18	169.698.008.286,00	(2.441.520.707,82)
2	Dinas Kesehatan	48.596.168.880,67	47.065.720.752,00	1.530.448.128,67
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.062.633.067,00	5.456.514.071,00	(393.881.004,00)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.110.689.541,20	3.128.964.232,00	(18.274.690,80)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	3.312.708.265,00	3.270.640.260,00	42.068.005,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	2.756.105.874,00	2.941.650.797,00	(185.544.923,00)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.863.171.815,00	2.744.949.407,00	118.222.408,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.116.795.486,00	3.344.035.340,00	(227.239.854,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.168.929.857,00	2.234.559.683,00	(65.629.826,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	2.428.390.737,00	2.444.213.419,00	(15.822.682,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
11	Dinas Perhubungan	3.279.658.043,00	3.144.917.166,43	134.740.876,57
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.790.850.177,0	1.993.147.368,00	(202.297.191,00)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.801.793.609,00	1.790.413.494,50	11.380.114,50
14	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2.928.199.077,00	2.792.235.131,00	135.963.946,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.217.878.666,00	2.445.983.378,00	(228.104.712,00)
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	4.058.587.243,00	4.038.975.356,00	19.611.887,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.858.177.240,00	12.673.282.829,00	(1.815.105.589,00)
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.918.021.435,00	3.793.262.508,50	124.758.926,50
19	Sekretariat Daerah	11.269.159.533,71	11.259.903.559,00	9.255.974,71
20	Inspektorat	3.544.002.698,00	3.227.235.456,00	316.767.242,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.122.237.291,00	3.110.424.568,00	11.812.723,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.388.289.494,00	20.005.500.624,00	3.382.788.870,00
23	Badan Pendapatan Daerah	1.982.304.901,00	1.990.499.452,00	(8.194.551,00)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.141.691.125,00	2.123.585.174,00	18.105.951,00
25	Sekretariat DPRD	14.043.320.449,00	10.543.286.107,00	3.500.034.342,00
26	Kecamatan Dusun Tengah	2.645.134.737,00	2.630.216.640,00	14.918.097,00
27	Kecamatan Pematang Karau	1.735.525.325,43	1.948.422.550,66	(212.897.225,23)
28	Kecamatan Awang	1.807.815.005,00	1.866.444.502,00	(58.629.497,00)
29	Kecamatan Patangkep Tutui	1.432.222.766,00	1.474.013.545,00	(41.790.779,00)
30	Kecamatan Dusun Timur	2.226.570.510,57	2.374.241.707,00	(147.671.196,43)
31	Kecamatan Benua Lima	1.964.546.191,00	1.866.466.150,00	98.080.041,00
32	Kecamatan Paku	1.513.006.910,00	1.601.736.882,00	(88.729.972,00)



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
33	Kecamatan Paju Epat	1.265.874.712,00	1.253.571.515,00	12.303.197,00
34	Kecamatan Raren Batuah	1.615.119.614,00	1.502.207.373,00	112.912.241,00
35	Kecamatan Karusen Janang	1.533.749.367,00	1.470.007.590,00	63.741.777,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.350.383.092,00	2.311.936.301,00	38.446.791,00
	Jumlah Beban Pegawai-LO	351.106.200.312,76	347.561.173.174,09	3.545.027.138,67

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp273.879.145.280,65 dan Rp197.815.626.159,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 149. Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Barang dan Jasa	273.879.145.280,65	197.815.626.159,44	76.063.519.121,21
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	669.242.325,00	397.833.290,00	271.409.035,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	441.611.351,00	497.011.263,00	(55.399.912,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.682.111.342,00	1.611.248.117,00	1.070.863.225,00
Beban Bahan-Bahan Baku	955.472.262,00	0,00	955.472.262,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	27.575.000,00	0,00	27.575.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	134.794.000,00	107.205.500,00	27.588.500,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	551.409.500,00	128.000.000,00	423.409.500,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.190.732.435,00	606.574.852,00	584.157.583,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	508.605.349,00	420.410.445,00	88.194.904,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	35.527.500,00	22.146.740,00	13.380.760,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	970.000,00	(970.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	86.498.000,00	167.628.901,00	(81.130.901,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.775.805.518,56	2.595.862.687,17	1.179.942.831,39



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.571.500,00	39.591.200,00	(15.019.700,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.044.784.580,44	3.907.772.529,00	2.137.012.051,44
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	647.938.500,00	453.648.745,00	194.289.755,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.695.714,00	91.052.349,00	(5.356.635,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	368.213.680,00	176.723.600,00	191.490.080,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	665.068.015,00	391.907.383,00	273.160.632,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	203.579.600,00	77.500.000,00	126.079.600,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	522.650.000,00	303.936.200,00	218.713.800,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	545.754.600,00	622.867.718,00	(77.113.118,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	628.898.545,41	1.155.790.152,86	(526.891.607,45)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.419.121.190,00	2.392.071.544,00	27.049.646,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.644.600.923,00	7.305.940.128,00	9.338.660.795,00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	329.336.280,00	102.581.000,00	226.755.280,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	214.313.250,00	0,00	214.313.250,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.412.633.200,00	4.530.664.760,00	2.881.968.440,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.261.498.703,00	1.915.189.853,00	1.346.308.850,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	524.675.000,00	167.236.500,00	357.438.500,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	50.944.000,00	0,00	50.944.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.440.390.000,00	516.285.000,00	924.105.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	124.597.500,00	0,00	124.597.500,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.580.356.967,00	0,00	1.580.356.967,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	275.133.319,00	32.184.478,00	242.948.841,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	95.418.068,00	0,00	95.418.068,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.758.200,00	0,00	21.758.200,00
Beban Pakaian Penyelamatan	5.632.500,00	0,00	5.632.500,00
Beban Pakaian KORPRI	44.380.450,00	0,00	44.380.450,00
Beban Pakaian Adat Daerah	3.000.000,00	86.080.500,00	(83.080.500,00)
Beban Pakaian Batik Tradisional	764.531.111,00	16.050.000,00	748.481.111,00
Beban Pakaian Olahraga	267.444.680,00	29.404.500,00	238.040.180,00
Beban Pakaian Paskibraka	105.858.229,00	76.612.866,00	29.245.363,00
Beban Pakaian Jas/Safari	43.476.500,00	0,00	43.476.500,00
Beban Komponen-Komponen Peralatan	142.350.000,00	0,00	142.350.000,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	1.695.000,00	400.000,00	1.295.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	32.160.000,00	0,00	32.160.000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.492.592.000,00	1.071.189.000,00	1.421.403.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.225.710.000,00	6.241.248.700,00	984.461.300,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	459.000.000,00	45.000.000,00	414.000.000,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.800.000,00	50.000.000,00	(40.200.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Honorarium Rohaniwan	17.050.000,00	12.250.000,00	4.800.000,00
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	154.200.000,00	122.500.000,00	31.700.000,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	16.000.000,00	28.600.000,00	(12.600.000,00)
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	23.375.000,00	7.575.000,00	15.800.000,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	281.400.000,00	287.200.000,00	(5.800.000,00)
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.642.200.000,00	11.156.550.000,00	(3.514.350.000,00)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	7.665.031.506,16	22.787.188.776,00	(15.122.157.269,84)
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	17.245.000,00	84.386.500,00	(67.141.500,00)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	55.486.400,00	0,00	55.486.400,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	29.300.000,00	37.100.000,00	(7.800.000,00)
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	259.454.000,00	215.650.000,00	43.804.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	18.656.221.000,00	13.996.850.000,00	4.659.371.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.020.300.000,00	1.004.300.000,00	16.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.731.639.000,00	3.644.860.000,00	86.779.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	964.530.800,00	664.500.000,00	300.030.800,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.747.016.800,00	3.472.500.000,00	274.516.800,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	812.557.000,00	783.428.000,00	29.129.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	257.800.000,00	343.200.000,00	(85.400.000,00)
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	76.650.000,00	104.997.315,00	(28.347.315,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00
Beban Jasa Tata Rias	34.400.000,00	2.400.000,00	32.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.044.044.000,00	390.000.000,00	654.044.000,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	326.697.046,00	156.619.217,00	170.077.829,00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	23.978.728,00	16.655.700,00	7.323.028,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	329.704.750,00	209.336.250,00	120.368.500,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	55.400.000,00	37.728.000,00	17.672.000,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	135.000.000,00	1.542.300.000,00	(1.407.300.000,00)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.584.010.500,00	27.400.000,00	1.556.610.500,00
Beban Tagihan Telepon	204.162.871,00	196.778.963,00	7.383.908,00
Beban Tagihan Air	241.882.212,00	186.618.885,00	55.263.327,00
Beban Tagihan Listrik	3.561.532.736,00	3.356.598.765,00	204.933.971,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.219.788.200,00	2.716.036.840,00	(1.496.248.640,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.163.171.377,00	1.420.796.752,00	(257.625.375,00)
Beban Paket/Pengiriman	11.682.000,00	8.365.000,00	3.317.000,00
Beban Registrasi/Keanggotaan	44.000.000,00	40.000.000,00	4.000.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	682.512.090,96	236.975.827,73	445.536.263,23
Beban Lembur	4.019.235.395,00	2.948.117.560,00	1.071.117.835,00
Beban Medical Check Up	0,00	122.033.100,00	(122.033.100,00)
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	580.426.896,00	0,00	580.426.896,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.002.412.000,00	0,00	13.002.412.000,00
Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.907.516.907,00	0,00	12.907.516.907,00
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	149.850.000,00	101.800.800,00	48.049.200,00
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Beban Sewa Grader	45.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	224.000.000,00	83.800.000,00	140.200.000,00
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	93.700.000,00	0,00	93.700.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	133.450.000,00	78.200.000,00	55.250.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.327.000,00	79.276.602,00	(4.949.602,00)
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	264.000.000,00	95.700.000,00	168.300.000,00
Beban Sewa Alat Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	57.500.000,00	110.708.200,00	(53.208.200,00)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	152.000.000,00	137.500.000,00	14.500.000,00
Beban Sewa Alat Studio Lainnya	1.200.000,00	18.600.000,00	(17.400.000,00)
Beban Sewa Alat Komunikasi Sosial	3.706.680,00	3.112.959,00	593.721,00
Beban Sewa Peralatan Umum	102.750.000,00	0,00	102.750.000,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	7.753.564,00	(7.753.564,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	17.000.000,00	31.250.000,00	(14.250.000,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	147.550.000,00	83.100.000,00	64.450.000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.250.000,00	83.750.000,00	(37.500.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Sewa Taman	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
Beban Sewa Hotel	110.250.000,00	81.841.000,00	28.409.000,00
Beban Sewa Musik Lainnya	15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	9.808.750,00	0,00	9.808.750,00
Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	8.275.000,00	(8.275.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	129.221.770,00	10.949.000,00	118.272.770,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	23.992.014,50	0,00	23.992.014,50
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	261.533.510,67	(261.533.510,67)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	221.803.580,00	708.055.630,00	(486.252.050,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	303.794.450,00	76.456.610,00	227.337.840,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	21.499.000,00	0,00	21.499.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	22.102.514,50	5.997.250,00	16.105.264,50
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa	88.656.100,00	80.721.515,00	7.934.585,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung			
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	122.609.700,00	43.400.000,00	79.209.700,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	259.534.230,00	533.895.345,00	(274.361.115,00)
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	0,00	83.706.200,00	(83.706.200,00)
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	45.330.500,00	0,00	45.330.500,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	48.600.000,00	0,00	48.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	748.469.010,00	422.626.596,00	325.842.414,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	2.040.000.000,00	(2.040.000.000,00)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	357.600.000,00	(357.600.000,00)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	707.133.500,00	746.920.000,00	(39.786.500,00)
Beban Sosialisasi	201.368.000,00	0,00	201.368.000,00
Beban Bimbingan Teknis	2.314.455.533,00	605.014.024,00	1.709.441.509,00
Beban Pemeliharaan Tanah- Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	341.918.752,00	(341.918.752,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	98.995.350,00	(98.995.350,00)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	69.676.600,00	120.612.855,00	(50.936.255,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.388.799.543,00	5.850.000,00	1.382.949.543,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	802.181.266,00	1.751.107.875,00	(948.926.609,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	230.212.118,00	168.046.815,00	62.165.303,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.374.200,00	0,00	21.374.200,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	39.997.543,00	12.500.000,00	27.497.543,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	74.600.000,00	369.780.107,00	(295.180.107,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-	536.381.152,00	1.233.382,00	535.147.770,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	463.649.192,00	362.453.700,00	101.195.492,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	140.000,00	(140.000,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan	23.001.663,00	132.158.557,00	(109.156.894,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	33.995.000,00	0,00	33.995.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.599.900,00	0,00	14.599.900,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25.883.000,00	0,00	25.883.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi- Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	30.117.000,00	0,00	30.117.000,00
Beban Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	875.000,00	(875.000,00)
Beban Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Darat Lainnya	11.898.000,00	13.574.000,00	(1.676.000,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	3.744.112.181,00	1.643.551.354,00	2.100.560.827,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	19.023.750,00	0,00	19.023.750,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	68.303.368,00	(68.303.368,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.210.947,00	81.064.947,00	(78.854.000,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	74.997.150,00	0,00	74.997.150,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	75.400.000,00	0,00	75.400.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bongalow/Tempa t Peristirahatan	0,00	98.877.400,00	(98.877.400,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	49.965.250,00	0,00	49.965.250,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	2.198.684.539,00	9.698.091.350,00	(7.499.406.811,00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	199.850.000,00	(199.850.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	748.980.000,00	750.000.000,00	(1.020.000,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	750.000.000,00	700.000.000,00	50.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	517.150.000,00	1.214.909.392,00	(697.759.392,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	16.733.057,00	(16.733.057,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.201.388.900,00	962.000.035,00	239.388.865,00
Beban Pemeliharaan Hewan- Hewan Ternak-Ternak Unggas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replikas, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	0,00	99.850.000,00	(99.850.000,00)
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	108.844.500,02	23.290.000,00	85.554.500,02
Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.080.594.966,00	24.035.254.506,00	17.045.340.460,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	675.000.000,00	(675.000.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.157.163.613,00	11.751.733.880,00	4.405.429.733,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	136.593.000,00	63.994.000,00	72.599.000,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	240.809.000,00	0,00	240.809.000,00
Beban Beasiswa	2.548.203.000,00	0,00	2.548.203.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	396.386.000,00	59.048.379,67	337.337.620,33
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	188.970.000,00	267.500.000,00	(78.530.000,00)
Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	780,2 60.124,80	525.185.535,00	255.074.589,80
Beban Barang dan Jasa BOS	10.129.062.936,00	0,00	10.129.062.936,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	28.320.362.312,30	23.726.881.805,34	4.593.480.506,96

Beban Barang dan Jasa-LO per SKPD disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 150. Beban Barang dan Jasa per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	28.605.754.719,80	15.083.102.487,33	13.522.652.232,47
2	Dinas Kesehatan	37.128.831.992,57	30.192.814.893,53	6.936.017.099,04
3	BLUD-RSUD Tamiang Layang	28.333.035.872,30	23.734.757.255,34	4.598.278.616,96
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.271.335.062,00	20.859.173.570,67	(9.587.838.508,67)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.775.501.712,00	2.982.116.712,00	(206.615.000,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	2.876.469.971,67	2.672.441.792,33	204.028.179,34
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	1.403.364.171,67	1.250.340.296,67	153.023.875,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.110.775.501,33	4.275.117.634,67	835.657.866,66
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.369.276.565,00	5.332.451.242,66	1.036.825.322,34
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.927.883.550,11	1.541.167.863,17	386.715.686,94



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	2.300.218.202,67	1.660.490.682,00	639.727.520,67
12	Dinas Perhubungan	1.729.715.243,67	1.043.433.439,00	686.281.804,67
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2.859.961.311,50	2.524.393.982,50	335.567.329,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.291.212.553,34	1.366.225.939,00	(75.013.385,66)
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	2.869.878.016,35	2.818.378.065,67	51.499.950,68
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.251.474.735,67	704.325.677,66	547.149.058,01
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	5.918.673.577,00	3.609.176.163,67	2.309.497.413,33
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.077.886.253,00	10.893.199.569,34	10.184.686.683,66
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.749.136.083,33	2.797.923.459,34	951.212.623,99
20	Sekretariat Daerah	29.237.548.290,89	18.509.060.363,67	10.728.487.927,22
21	Inspektorat	3.994.313.124,00	2.212.096.469,67	1.782.216.654,33
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	2.981.822.600,67	2.522.278.598,33	459.544.002,34
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.396.397.689,33	5.654.345.660,67	17.742.052.028,66
24	Badan Pendapatan Daerah	1.581.366.715,83	1.524.962.660,50	56.404.055,33
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.445.327.740,67	4.797.068.206,33	648.259.534,34
26	Sekretariat DPRD	27.643.668.367,94	20.327.322.530,72	7.316.345.837,22
27	Kecamatan Dusun Tengah	1.083.975.034,00	848.405.900,00	235.569.134,00
28	Kecamatan Pematang Karau	756.451.350,00	625.253.757,00	131.197.593,00



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
29	Kecamatan Awang	693.931.617,00	374.132.175,00	319.799.442,00
30	Kecamatan Patangkep Tutui	705.463.315,33	442.906.898,34	262.556.416,99
31	Kecamatan Dusun Timur	1.340.690.188,67	834.760.990,00	505.929.198,67
32	Kecamatan Benua Lima	1.068.352.548,34	752.849.160,33	315.503.388,01
33	Kecamatan Paku	838.176.852,00	425.708.846,00	412.468.006,00
34	Kecamatan Paju Epat	792.384.527,33	541.022.473,33	251.362.054,00
35	Kecamatan Raren Batuah	663.258.166,67	421.393.286,67	241.864.880,00
36	Kecamatan Karusen Janang	811.414.195,00	344.244.565,00	467.169.630,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.994.217.862,00	1.316.782.891,33	677.434.970,67
	Jumlah Beban Barang dan Jasa-LO	273.879.145.280,65	197.815.626.159,44	76.063.519.121,21

5.4.2.1.3. Beban Subsidi

Beban Subsidi-LO merupakan realisasi atas subsidi kepada PDAM yang secara penganggaran berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Belanja Subsidi pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 151. Beban Subsidi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Beban Subsidi kepada BUMD-LO	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

5.4.2.1.4. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp52.852.672.985,10 Rp53.353.819.037,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 152. Beban Hibah

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Hibah-LO	52.852.672.985,10	53.353.819.037,00	(501.146.051,90)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.560.000.000,00	0,00	10.560.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.486.912.000,00	3.710.743.610,00	(1.223.831.610,00)
Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	281.802.260,00	0,00	281.802.260,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah	142.600.000,00	0,00	142.600.000,00
Beban Hibah Barang kepada BUMN	0,00	111.759.842,00	(111.759.842,00)
Beban Hibah Barang kepada BUMD	3.745.075.055,10	7.077.546.113,00	(3.332.471.057,90)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	110.000.000,00	(85.000.000,00)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	199.694.500,00	141.994.500,00	57.700.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.478.412.400,00	14.868.645.575,00	4.609.766.825,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	399.100.000,00	830.593.600,00	(431.493.600,00)
Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.927.769.000,00	2.837.117.000,00	90.652.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.684.500.000,00	750.030.000,00	3.934.470.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,	6.701.750.230,00	9.278.983.271,00	(2.577.233.041,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			
Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	47.652.540,00	0,00	47.652.540,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri/Swasta	279.680.000,0	12.743.680.526,00	(12.464.000.526,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	892.725.000,00	892.725.000,00	0,00

Beban Hibah-LO per SKPD disajikan sebagaimana berikut.

Tabel 153. Beban Hibah per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	3.296.530.000,00	15.590.797.526,00	(12.294.267.526,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.204.719.235,10	18.265.868.735,00	(9.061.149.499,90)
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	40.000.000,00	37.624.000,00	2.376.000,00
4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1.506.962.400,00	296.970.000,00	1.209.992.400,00
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.996.658.950,00	0,00	1.996.658.950,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.253.077.400,00	2.936.482.201,00	316.595.199,00
7	Sekretariat Daerah	20.977.200.000,00	14.781.021.575,00	6.196.178.425,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	508.000.000,00	147.330.000,00	360.670.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	0,00	42.300.000,00	(42.300.000,00)
10	Kecamatan Dusun Tengah	387.600.000,00	290.700.000,00	96.900.000,00
11	Kecamatan Dusun Timur	157.200.000,00	0,00	157.200.000,00
	Kecamatan Benua Lima	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.452.725.000,00	892.725.000,00	10.560.000.000,00
	Jumlah Beban Hibah-LO	52.852.672.985,10	53.353.819.037,00	(501.146.051,90)



5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.421.780.000,00 dan Rp1.754.532.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 154. Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Bantuan Sosial-LO	2.421.780.000,00	1.754.532.000,00	667.248.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.497.300.000,00	88.100.000,00	1.409.200.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	88.400.000,00	0,00	88.400.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	356.200.000,00	1.533.000.000,00	(1.176.800.000,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	41.880.000,00	126.932.000,00	(85.052.000,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	438.000.000,00	6.500.000,00	431.500.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per SKPD sebagaimana berikut.

Tabel 155. Beban Bantuan Sosial per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	55.380.000,00	133.432.000,00	(78.052.000,00)
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial	124.700.000,00	19.200.000,00	105.500.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.739.500.000,00	1.097.900.000,00	641.600.000,00
4	Kecamatan Dusun Tengah	214.200.000,00	216.000.000,00	(1.800.000,00)
5	Kecamatan Dusun Timur	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
6	Kecamatan Benua Lima	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial-LO	2.421.780.000,00	1.754.532.000,00	667.248.000,00



5.4.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.469.684.403,67 dan Rp1.027.597.542,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 156. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Penyisihan Piutang-LO	2.469.684.403,67	1.027.597.542,18	1.442.086.861,49
Beban Penyisihan Piutang PBBP2-LO	2.486.515.830,97	710.511.637,18	1.776.004.193,79
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	6.023.970,00	27.049.500,00	(21.025.530,00)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	(45.792.947,80)	290.036.405,00	(335.829.352,80)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.937.550,50	0,00	22.937.550,50

Beban Penyisihan Piutang-LO per SKPD, sebagaimana berikut.

Tabel 157. Beban Penyisihan Piutang per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	(4.529.000,00)	18.192.000,00	(22.721.000,00)
2	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(45.792.947,80)	290.036.405,00	(335.829.352,80)
3	Badan Pendapatan Daerah	2.497.068.800,97	719.369.137,18	1.777.699.663,79
4	BLUD-RSUD	22.937.550,50	0,00	22.937.550,50
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang-LO	2.469.684.403,67	1.027.597.542,18	1.442.086.861,49

5.4.2.1.7. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang berasal dari Aset ekstrakomtable aset tetap Tahun 2023. Beban Lain-lain pada Tahun 2023 dan 2022 berdasarkan SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 158. Beban Lain-Lain

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	2.500.000,00	1.075.000,00	1.425.000,00
2	Dinas Kesehatan	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.645.864.977,00	796.995.355,00	1.848.869.622,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	24.236.850,00	0,00	24.236.850,00
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	8.302.400,00	1.020.000,00	7.282.400,00
6	Inspektorat	0,00	3.630.000,00	(3.630.000,00)
	Jumlah Beban Lain-Lain-LO	2.693.654.227,00	802.720.355,00	1.890.933.872,00

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2023 dan 2022 pada Aset Tetap sebesar Rp127.635.927.895,46 dan Rp129.510.684.147,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 159. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.635.927.895,46	129.510.684.147,82	(1.874.756.252,36)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO	26.166.498.745,43	26.602.969.589,33	(436.470.843,90)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO	34.910.387.186,25	33.733.540.272,49	1.176.846.913,76
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan-LO	66.515.833.323,78	69.170.175.286,00	(2.654.341.962,22)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-LO	43.208.640,00	3.999.000,00	39.209.640,00

Adapun Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per SKPD Tahun 2023 dan 2022 sebagaimana berikut.

Tabel 160. Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	16.643.851.194,43	15.426.305.426,14	1.217.545.768,29
2	Dinas Kesehatan	11.286.276.271,50	10.874.801.893,50	411.474.378,00
3	BLUD RSUD Tamiang Layang	9.466.303.152,00	8.806.151.711,92	660.151.440,08
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	67.458.043.236,78	69.618.601.713,00	(2.160.558.476,22)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	110.021.836,00	111.354.661,00	(1.332.825,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	746.667.845,00	1.420.414.186,00	(673.746.341,00)
7	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	674.582.393,00	637.328.239,00	37.254.154,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	584.563.368,00	656.870.773,00	(72.307.405,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	868.540.340,00	800.608.730,00	67.931.610,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	404.019.740,00	387.795.914,00	16.223.826,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	189.200.647,00	193.852.039,00	(4.651.392,00)
12	Dinas Perhubungan	1.113.872.327,00	1.095.791.762,00	18.080.565,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	213.111.089,00	189.732.427,00	23.378.662,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.370.331,00	135.265.333,00	(3.895.002,00)
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	885.664.853,00	970.016.486,00	(84.351.633,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	144.930.065,00	134.441.810,00	10.488.255,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.575.122.456,00	1.994.302.751,00	(419.180.295,00)
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.581.326.974,00	1.821.717.352,00	(240.390.378,00)
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.414.251.523,00	2.050.132.173,00	(635.880.650,00)
20	Sekretariat Daerah	7.188.619.033,33	6.645.704.066,00	542.914.967,33
21	Inspektorat	231.338.192,00	216.247.804,00	15.090.388,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	418.437.435,00	502.650.322,00	(84.212.887,00)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.165.581.643,00	1.294.719.744,00	(129.138.101,00)
24	Badan Pendapatan Daerah	294.613.640,00	272.991.331,00	21.622.309,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	227.529.594,00	227.716.977,00	(187.383,00)
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	858.681.044,42	1.415.367.738,26	(556.686.693,84)
27	Kecamatan Dusun Tengah	502.139.229,00	375.932.043,00	126.207.186,00
28	Kecamatan Pematang Karau	105.332.019,00	116.657.664,00	(11.325.645,00)
29	Kecamatan Awang	91.959.707,00	99.472.654,00	(7.512.947,00)
30	Kecamatan Patangkep Tutui	61.584.589,00	111.821.354,00	(50.236.765,00)
31	Kecamatan Dusun Timur	187.788.214,00	170.103.338,00	17.684.876,00



No.	SKPD	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
		2023	2022	
32	Kecamatan Benua Lima	224.006.879,00	199.194.561,00	24.812.318,00
33	Kecamatan Paku	131.586.672,00	97.355.798,00	34.230.874,00
34	Kecamatan Paju Epat	97.234.244,00	99.492.210,00	(2.257.966,00)
35	Kecamatan Raren Batuah	109.867.487,00	105.185.511,00	4.681.976,00
36	Kecamatan Karusen Janang	100.455.387,00	91.300.912,00	9.154.475,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	147.453.245,00	143.284.740,00	4.168.505,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.635.927.895,46	129.510.684.147,82	(1.874.756.252,36)

5.4.2.3. Beban Transfer

Beban Transfer pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp66.807.194.831,00 dan Rp73.380.810.577,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 161. Beban Transfer

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Transfer-Lo	66.807.194.831,00	73.380.810.577,00	(6.573.615.746,00)
Beban Bagi Hasil-LO	4.104.711.131,00	2.843.905.141,00	1.260.805.990,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO	4.104.711.131,00	2.843.905.141,00	1.260.805.990,00
Beban Bantuan Keuangan-LO	62.702.483.700,00	70.536.905.436,00	(7.834.421.736,00)
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-LO	223.060.800,00	14.200.091.336,00	(13.977.030.536,00)
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-LO	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-LO	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa-LO	62.234.422.900,00	55.851.814.100,00	6.382.608.800,00

5.4.2.4. Beban Tidak Terduga

Realisasi Beban Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.533.187.200,00 dan Rp7.299.505.070,79 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 162. Beban Tidak Terduga

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Beban Tidak Terduga-Lo	2.533.187.200,00	7.299.505.070,79	(4.766.317.870,79)
Beban Tak Terduga-LO	2.533.187.200,00	7.299.505.070,79	(4.766.317.870,79)

5.4.2.5. Surplus Non Operasional

Surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp11.711.559,00 merupakan hasil reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Lainnya, sebagaimana telah dijelaskan secara singkat pada bagian Neraca kategori Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 163. Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Non Operasional	11.711.559,00	0,00	(11.711.559,00)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	11.711.559,00	0,00	(11.711.559,00)

5.4.2.6. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional di Tahun 2023 sebesar Rp3.863.351.000,00 sebagai berikut.

Tabel 164. Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kegiatan Non Operasional			
Defisit Non Operasional	3.863.351.500,00	0,00	(3.863.351.500,00)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	3.863.351.500,00	0,00	(3.863.351.500,00)

Defisit ini terjadi karena penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Bupati Barito Timur Nomor 180/351/HUK/2023 dan 180/422/HUK/2023 dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 165. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Rincian Aset Tetap yang dihapus	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Kendaraan Bermotor Penumpang	346.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.749.161.500,00



No	SKPD	Rincian Aset Tetap yang dihapus	Nilai
3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	342.628.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	425.062.000,00
	Jumlah		3.863.351.500,00

5.4.2.7. Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp175.650.714.299,39 dan Tahun 2022 adalah Rp70.040.534.370,32.

Tabel 166. Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	175.650.714.299,39	70.040.534.370,32	105.610.179.929,07

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris serta Saldo Kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Rincian Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 167. Laporan Arus Kas

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	124.962.995.013,99	175.816.568.871,65	(50.853.573.857,66)
Jumlah Arus Kas Masuk	983.324.076.415,03	966.036.183.873,74	17.287.892.541,29
Jumlah Arus Kas Keluar	858.361.081.401,04	790.219.615.002,09	68.141.466.398,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(211.970.634.559,37)	(114.524.098.767,00)	(97.446.535.792,37)
Jumlah Arus Kas Masuk	164.913.200,00	0,00	164.913.200,00
Jumlah Arus Kas Keluar	212.135.547.759,37	114.524.098.767,00	97.611.448.992,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	14.606,82	(39.139.367,00)	39.153.973,82
Jumlah Arus Kas Masuk	56.985.600.352,82	43.891.828.264,00	13.093.772.088,82
Jumlah Arus Kas Keluar	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00	13.054.618.115,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(87.007.624.938,56)	61.253.330.737,65	(148.260.955.676,21)
Saldo Awal Kas	241.295.296.477,19	180.041.965.739,54	61.253.330.737,65
Saldo Akhir Kas	154.287.671.538,63	241.295.296.477,19	(87.007.624.938,56)

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp124.962.995.013,99 dan Rp175.816.568.871,65.

Tabel 168. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	124.962.995.013,99	175.816.568.871,65	(50.853.573.857,66)
Jumlah Arus Kas Masuk	983.324.076.415,03	966.036.183.873,74	17.287.892.541,29
Jumlah Arus Kas Keluar	858.361.081.401,04	790.219.615.002,09	68.141.466.398,95

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing menunjukkan saldo sebesar Rp983.324.076.415,03 dan Rp966.036.183.873,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 169. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	983.324.076.415,03	966.036.183.873,74	17.287.892.541,29
Penerimaan Pajak Daerah	18.347.176.559,04	11.593.759.007,25	6.753.417.551,79
Penerimaan Retribusi Daerah	2.766.598.933,00	2.545.019.804,00	221.579.129,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.049.142,65	14.158.036.468,00	(14.130.987.325,35)
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	38.870.170.107,34	55.350.895.481,20	(16.480.725.373,86)



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Penerimaan Dana Bagi Hasil	191.068.698.189,00	194.252.890.381,00	(3.184.192.192,00)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	457.131.088.950,00	436.257.086.999,00	20.874.001.951,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.417.638.397,00	52.354.260.414,00	63.377.983,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	83.915.805.092,00	69.580.903.271,00	14.334.901.821,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	4.984.971.000,00	(4.984.971.000,00)
Penerimaan Dana Desa	77.935.147.800,00	73.795.812.000,00	4.139.335.800,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	60.819.703.245,00	48.961.524.021,29	11.858.179.223,71
Penerimaan Hibah	25.000.000,00	2.201.025.027,00	(2.176.025.027,00)

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 menunjukkan saldo masing-masing sebesar Rp858.361.081.401,04 dan Rp790.219.615.002,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 170. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	858.361.081.401,04	790.219.615.002,09	68.141.466.398,95
Pembayaran Pegawai	351.104.087.669,76	347.439.505.593,09	3.664.582.076,67
Pembayaran Barang dan Jasa	290.601.816.469,18	228.529.659.212,00	62.072.157.257,18
Pembayaran Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	50.754.619.535,10	47.657.860.937,00	3.096.758.598,10
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.421.780.000,00	9.275.004.600,00	(6.853.224.600,00)
Pembayaran Tak Terduga	2.533.187.200,00	9.540.962.083,00	(7.007.774.883,00)
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	4.104.711.131,00	2.843.905.141,00	1.260.805.990,00



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.240.879.396,00	144.332.717.436,00	11.908.161.960,00

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Barito Timur kepada masyarakat di masa yang akan datang. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp211.970.634.559,37) dan (Rp114.524.098.767,00).

Tabel 171. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(211.970.634.559,37)	(114.524.098.767,00)	(97.446.535.792,37)
Jumlah Arus Kas Masuk	164.913.200,00	0,00	164.913.200,00
Jumlah Arus Kas Keluar	212.135.547.759,37	114.524.098.767,00	97.611.448.992,37

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 menunjukkan saldo masing-masing sebesar Rp164.913.200,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 172. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	164.913.200,00	0,00	164.913.200,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	152.913.200,00	0,00	152.913.200,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00



Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Penerimaan Kembali Investasi	0,00	0,00	0,00

5.5.2.2. Arus Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi atau Belanja Daerah yang dapat dikapitalisasi ke aset daerah atau Belanja Modal Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 173. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	212.135.547.759,37	114.524.098.767,00	97.611.448.992,37
Perolehan Tanah	0,00	1.098.858.088,00	(1.098.858.088,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin	21.045.840.294,00	16.700.733.622,00	4.345.106.672,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.140.779.038,98	29.782.859.321,00	11.357.919.717,98
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.082.480.220,39	55.462.710.136,00	82.619.770.084,39
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.091.448.206,00	207.889.400,00	883.558.806,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	196.048.200,00	(196.048.200,00)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.775.000.000,00	11.075.000.000,00	(300.000.000,00)

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2023 dan 2022, tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan atau sebesar Rp0,00.

Tabel 174. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris, Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dan Arus Kas Bersih dari



Aktivitas Transitoris. Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp14.606,82) dan (Rp39.139.367,00).

Tabel 175. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	14.606,82	(39.139.367,00)	39.153.973,82
Jumlah Arus Kas Masuk	56.985.600.352,82	43.891.828.264,00	13.093.772.088,82
Jumlah Arus Kas Keluar	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00	13.054.618.115,00

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun 2023 dan 2022 dan Kas di bendahara Penerimaan atas Jasa Giro.

Tabel 176. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	56.985.600.352,82	43.891.828.264,00	13.093.772.088,82
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.985.593.566,00	43.891.828.264,00	13.093.765.302,00
Kas di Bendahara Penerimaan Bapenda atas Jasa Giro pada Bank Mandiri	6.786,82	0	6.786,82

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun 2023 dan 2022.

Tabel 177. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00	13.054.618.115,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00	13.054.618.115,00

Penerimaan PFK dan Pengeluaran PFK berbeda sebesar **Rp7.820,00** disebabkan ada Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Awang yang merupakan PFK yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023.



5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan/(Penurunan) Kas merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas bersih dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transitoris untuk tahun 2023 dan 2022 yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 178. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun		Bertambah/ (Berkurang)
	2023	2022	
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(87.007.624.938,56)	61.253.330.737,65	(148.260.955.676,21)
Rincian Saldo Awal Kas Pemda Kab. Barito Timur	241.295.296.477,19	180.041.965.739,54	61.253.330.737,65
- Saldo Awal Kas di BUD	210.654.411.612,83	142.996.573.894,18	67.657.837.718,65
- Saldo Awal Kas BLUD	30.573.109.149,40	36.904.430.888,40	(6.331.321.739,00)
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)	114.513,96	88.495.822,96	(88.381.309,00)
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	14.750.701,00	52.465.134,00	(37.714.433,00)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	52.910.500,00	0,00	52.910.500,00
Rincian Saldo Akhir Kas Pemda Kab. Barito Timur	154.287.671.538,63	241.295.296.477,19	(87.007.624.938,56)
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	130.879.164.943,04	210.654.411.612,83	(79.775.246.669,79)
- Saldo Akhir Kas di BLUD	22.345.698.167,97	30.573.109.149,40	(8.227.410.981,43)
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)	1.004.369.608,80	114.513,96	1.004.255.094,84
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	44.551.858,00	14.750.701,00	29.801.157,00
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	13.879.140,82	0,00	13.879.140,82
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	7.820,00	52.910.500,00	(52.902.680,00)

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal berasal dari akumulasi Ekuitas tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang merupakan Ekuitas Awal Tahun 2022 Sebesar Rp1.500.774.486.945,12.



5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Nilai Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp175.650.714.299,39 merupakan Surplus-LO yang menambah nilai ekuitas awal pada Tahun 2023.

5.6.3. Lain-Lain

Pada Tahun 2023 nilai Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp1.177.795.472,05. Adapun rincian (Lain-Lain) yang merupakan koreksi Ekuitas, sebagaimana berikut.

Tabel 179. Koreksi Ekuitas

No.	Jenis Koreksi Ekuitas	SKPD	Debet	Kredit
1	Penyesuaian penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan transfer dari DPUPR	Disdik		5.993.191.717,00
2	Penyesuaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan reklas ke ekstrakomtable	Disdik	2.111.159,18	
3	Penyesuaian pengurangan Akumulasi Aset Peralatan dan Mesin ke ekstrakomtable	Disdik		7.763.033,18
4	Penyesuaian penghapusan Akumulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Bupati Bartim Nomor 180/351/HUK/2023	Dinkes		346.500.000,00
5	Penyesuaian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan transfer dari DPUPR	Dinkes		9.473.732.100,00
6	Penyesuaian Pengurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklas ke ekstrakomtable	BLUD-RSUD	482.624,00	
7	Penyesuaian Penambahan Aset Tetap JIJ transfer dr DPUPR sesuai BA serah terima nomor 600/490/DPUPRPERKIM-BT/XII/2023 tanggal 29-12-2023	BLUD-RSUD		199.800.466,00
8	Penyesuaian penambahan Aset Tetap JIJ transfer dr DPUPR sesuai BA serah terima nomor 600/490/DPUPRPERKIM-BT/XII/2023 tanggal 29-12-2023	BLUD-RSUD		299.400.000,00
9	Penyesuaian Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Gangunan transfer ke SKPD lain	DPUPR	18.177.236.099,98	
10	Penyesuaian transfer Aset Tetap JIJ ke BLUD/RSUD Tamiang Layang	DPUPR	199.800.466,00	
11	Penyesuaian saldo awal Peralatan dan Mesin	Disdukcapil		1,00
12	Penyesuaian pengurangan Persediaan Dalam Proses Lainnya berdasarkan BA Serah Terima Barang Nomor:027/03/DPMDSOS/2022	DPMDSos	6.695.000,00	



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023

No.	Jenis Koreksi Ekuitas	SKPD	Debet	Kredit
13	Penyesuaian Pengurangan Aset Tetap Tanah Hibah ke Pihak ke III berdasarkan BA Hibah Nomor 180/411/HUK/2023	Dishub	260.100,00	
14	Penyesuaian pengurangan aset tetap tanah hibah ke Rutan berdasarkan SK Penghapusan Bupati Bartim Nomor 180/410/HUK/2023	Setda	1.803.745.000,00	
15	Penyesuaian penghapusan akumulasi aset tetap peralatan dan mesin hasil penjualan berdasarkan SK Bupati Barito Timur Nomor 180/(351&422)/HUK/2023	Setda		2.749.161.500,00
16	Penyesuaian penambahan aset tetap gedung dan bangunan transfer dari DPUPR	Setda		2.180.333.460,00
17	Penyesuaian hibah aset tetap lainnya ke GKE berdasarkan SK Penghapusan Bupati Bartim Nomor 180/409/HUK/2023	Setda	57.420.000,00	
18	Penyesuaian penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berdasarkan sk penghapusan Keputusan Bupati nomor 180/351/HUK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah	Bapedalitbang		342.628.000,00
19	Penyesuaian penghapusan aset lainnya aset rusak berat berdasarkan Keputusan Bupati nomor 180/201/HUK/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	154.735.830,00	
20	Penyesuaian penghapusan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sesuai sk penghapusan bupati nomor 180/422/HUK/2023	BPKAD		287.802.395,00
21	Koreksi atas Aset Lancar Piutang Bagian Lancar TGR	BPKAD	530.609.743,97	
22	Penyesuaian penambahan aset tetap gedung dan bangunan transfer dari DPUPR	Kec. Dusteng		124.480.000,00
23	Penyesuaian penambahan aset tetap gedung dan bangunan transfer dari dinas PUPR berdasarkan BAST Nomor 600/484/DPUPRPERKIM-BT/XII/2023	Kec. Benua Lima		106.098.823,00
	Jumlah		20.933.096.023,13	22.110.891.495,18
	Nilai Koreksi Ekuitas (Lain-Lain)			1.177.795.472,05

5.6.4.

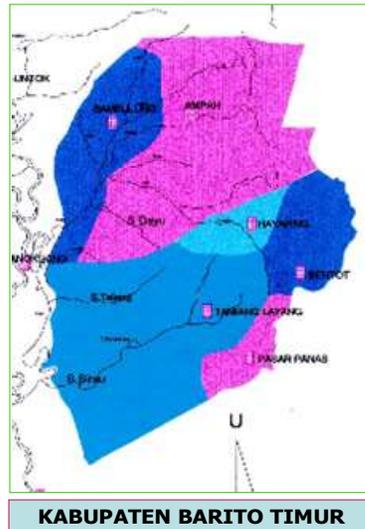
Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.677.602.996.716,56 yang merupakan Nilai Ekuitas pada Neraca Per 31 Desember 2023.

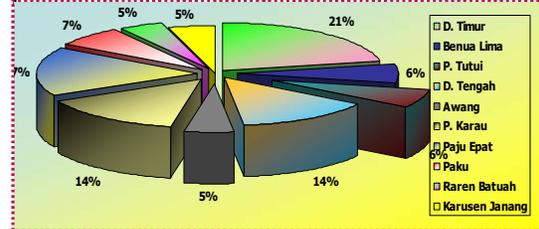


Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut.

LUAS WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR



Kecamatan 2003-2011	Luas Wilayah	(%)
1. Dusun Timur	867,70 Km ²	22,63
2. Benua Lima	258,00 Km ²	6,73
3. Patangkep Tutui	255,00 Km ²	6,65
4. Dusun Tengah	549,00 Km ²	14,32
5. Awang	203,00 Km ²	5,29
6. Pematang Karau	579,00 Km ²	15,10
7. Paku	272,00 Km ²	7,09
8. Paju Epat	664,30 Km ²	17,33
9. Raren Batuah	186,00 Km ²	4,85
10. Karusen Janang		
Total Area	3.834,00 Km²	100,00



6.1.3. Topografis

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Barito Timur pada bagian utara dan timur sebagian besar berada di wilayah daratan dengan tingkat ketinggian antara 0-50 meter di atas permukaan laut (DPL) dan tingkat kemiringan antara 0-8%, sedangkan pada bagian barat dan selatan terdiri atas daerah rawa. Berdasarkan fisiografi wilayah Kabupaten Barito Timur dapat digolongkan 4 (empat) bagian utama sebagai berikut:

- Hutan belantara seluas 146.765 Ha
- Rawa-rawa seluas 122.001 Ha.
- Sungai/Danau/Genangan air 10.467 Ha.
- Tanah lainnya 104.400 Ha.

Wilayah Barito Timur yang sebagian besar berada pada wilayah daratan dan perbukitan dengan tanah mineral, terutama ordo tanah Ultisol, Oxisol, Alfisol dan Mollisol pada lahan kering sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan (ladang) dan perkebunan (terutama kebun karet dan rotan). Adapun karakteristik iklim (curah hujan) di wilayah Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu bagian wilayahnya (dengan asumsi bahwa kondisi secara umum iklim di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah hampir sama), dengan karakteristik iklim sebagai berikut.



Tabel 180. Topografis Wilayah Barito Timur

Uraian	Satuan	Nilai
Luas Wilayah	Km ²	3.834
Temperatur	°C	35,3
Tekanan Udara	Mb	1.006,1
Kelembaban Relatif	Persen	81,7
Rata-Rata Curah Hujan/Bulan	Mm	279,5
Hari Hujan	Hari	216

6.1.4. Demografis

Penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2023 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur adalah sebanyak 116.664 jiwa, terdiri atas 59.787 laki-laki dan 56.877 perempuan. Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Timur mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 115.200 jiwa. Sebaran per kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 181. Demografis Penduduk Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun Timur	14.735	14.299	29.034
2	Banua Lima	3.358	3.201	6.559
3	Patangkep Tutui	3.673	3.457	7.130
4	Awang	3.249	3.099	6.348
5	Dusun Tengah	12.692	12.151	24.843
6	Pematang Karau	6.761	6.316	13.077
7	Paju Epat	3.388	3.143	6.531
8	Raren Batuah	4.479	4.253	8.732
9	Paku	4.713	4.395	9.108
10	Karusen Janang	2.739	2.563	5.302
Jumlah		59.787	56.877	116.664

6.2. Gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Barito Timur

6.2.1. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tahun 2023 berjumlah 3.354 Orang terdiri dari:



- a) 1.455 Pegawai Laki-Laki atau 43,38%
b) 1.899 Pegawai Perempuan atau 56,61%

Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 182. Jumlah Pegawai PNS Barito Timur

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT TINGKAT
KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022-2023**

No.	Pangkat/Golongan/Ruang	2022			2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I/A (Juru Muda)	2		2	2		2
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1		1	1		1
3	I/C (Juru)	4		4	3		3
4	I/D (Juru Tingkat I)	11	2	13	9		9
	Jumlah Golongan I	18	2	20	15	-	15
5	II/A (Pengatur Muda)	12	4	16	10	6	16
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	24	19	43	21	12	33
7	II/C (Pengatur)	73	99	172	63	91	154
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	190	110	300	133	58	191
	Jumlah Golongan II	299	232	531	227	167	394
9	III/A (Penata Muda)	157	208	365	203	243	446
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	207	375	582	167	315	482
11	III/C (Penata)	207	312	519	215	336	551
12	III/D (Penata Tingkat I)	305	384	689	303	401	704
	Jumlah Golongan III	876	1.279	2.155	888	1.295	2.183
13	IV/A (Pembina)	178	219	397	155	207	362
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	150	228	378	151	227	378
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	19	3	22	18	3	21
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1		1	1		1
17	IV/E (Pembina Utama)						
	Jumlah Golongan IV	348	450	798	325	437	762
	Total	1.541	1.963	3.504	1.455	1.899	3.354

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Barito Timur Tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 4,28% dibandingkan Tahun 2022 dari 3.504 orang menjadi 3.354 orang. Penurunan jumlah ini disebabkan mutasi pegawai keluar daerah, pensiun dan meninggal dunia. Berdasarkan kepangkatan maka PNS Daerah terbanyak yaitu 2.183 orang Golongan III, Golongan IV 762 orang, Golongan II 394 orang, dan Golongan I sebanyak 15 orang. Berikut rincian jumlah PNS menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2022-2023.

Tabel 183. Jumlah Pegawai PNS Barito Timur Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	9	-	9	9	3	12
SLTP/Sederajat	18	2	20	20	3	23
SMA/Sederajat	285	151	436	277	136	413
Diploma I, II/Akta I, II	54	71	125	37	55	92
Diploma III/Sarjana Muda	103	265	368	118	282	400
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1.072	1.474	2.546	994	1.420	2.414
Jumlah	1.541	1.963	3.504	1.455	1.899	3.354



6.2.2. Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 280 Orang dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 184. Jumlah Pegawai PPPK Barito Timur

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Guru	45	193	238
Kesehatan	0	22	22
Penyuluh Pertanian	9	11	20
Total	54	226	280



BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi *Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas* dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD serta BLUD. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Periode Akuntansi dan Pelaporan 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

7.2. Ikhtisar Laporan Keuangan

7.2.1. Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran

- a) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp983.488.989.615,03.
- b) Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.059.721.629.160,41.
- c) Pembiayaan dibagi menjadi Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Pembiayaan Netto:
 - 1) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 untuk Penggunaan SiLPA sebesar Rp241.287.047.039,17;
 - 2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.775.000.000,00;
 - 3) Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp230.512.047.039,17; dan
 - 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp154.279.407.493,79.

7.2.2. Ikhtisar Neraca

- a) Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah Rp1.682.290.180.590,42;
- b) Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah Rp4.687.183.873,86; dan
- c) Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah 1.677.602.996.716,56.

7.2.3. Ikhtisar Laporan Operasional

- a) Pendapatan Rp1.062.501.801.376,03;
- b) Beban Rp880.466.259.935,64;
- c) Defisit Non Operasional (Rp3.851.639.941,00); dan
- d) Surplus/(Defisit) – LO Rp175.650.714.299,39.



7.2.4. Ikhtisar Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2023 menunjukkan posisi Kas Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah sebesar Rp154.287.671.538,63

7.2.5. Ikhtisar Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal Rp241.287.047.039,17;
- b) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp241.287.047.039,17;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp154.279.407.493,79; dan
- d) Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp154.279.407.493,79.

7.2.6. Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas

- a) Ekuitas Awal Rp1.500.774.486.945,12;
- b) Surplus/(Defisit) – LO Rp175.650.714.299,39;
- c) Lain-Lain Rp1.177.795.472,05; dan
- d) Ekuitas Akhir Rp1.677.602.996.716,56.

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan 

